

POLITIK EKONOMI PELESTARIAN WARISAN BUDAYA TROWULAN

Oleh :
Sugih Biantoro
Endang Turmudi



Editor :
Endang Turmudi



PMB-LIPI



PT Gading Inti Prima



© 2013 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan*

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Politik Ekonomi Pelestarian Warisan Budaya Trowulan/Sugih
Biantoro, Endang Turmudi – Jakarta, 2013.

iv hlm + 105 hlm.; 14,8 x 21 cm

ISBN :978-602-221-223-2

1. Cagar Budaya – Politik Ekonomi
2. Situs - Majapahit

398. 234

Penerbit:

PT. Gading Inti Prima (anggota IKAPI)

Jl. Hibrida Raya Blok PD 14 No. 7

Kelapa Gading

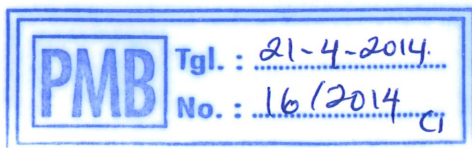
Jakarta 14250

Telp: (021) 4508142



LIPI

*Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Widya Graha Lt. VI dan IX,
Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 10
Jakarta, 12710
Telp.: 021-5701232
Faks.: 021-5701232



=====**KATA PENGANTAR**=====

Kegiatan penelitian “Kajian Politik Ekonomi Pengelolaan Cagar Budaya: Situs Majapahit di Trowulan” merupakan salah satu kegiatan penelitian yang dilakukan di Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB-LIPI) dan salah satu bagian dari kegiatan penelitian payung “Kajian Politik Ekonomi Pengelolaan Cagar Budaya” yang dilaksanakan selama tiga tahun (tahun 2012-2014).

Setelah pada tahun pertama (2012), hasil penelitian disusun dalam buku mengenai narasi pengelolaan cagar budaya, identifikasi *stakeholder* dalam pengelolaan cagar budaya, serta kebijakan yang terkait pengelolaan cagar budaya kawasan Majapahit di Trowulan, pada buku tahun kedua ini tim memfokuskan pembahasan pada uraian dan analisis mengenai interaksi dan kontestasi *stakeholder* dalam pengelolaan kawasan cagar budaya kawasan Majapahit di Trowulan. Pembahasan kontestasi *stakeholder* ini sangat penting karena akan memberikan gambaran nyata dan jelas atas persoalan yang melingkupi pengelolaan suatu cagar budaya, khususnya pada tingkat lokal beserta implikasi yang mengikutinya pada satu pengelolaan.

Sebagai tahap akhir kegiatan penelitian, pada tahun ketiga (2014), seluruh hasil dari tahun pertama dan kedua akan menjadi sumber utama dalam penyusunan sintesa hasil penelitian “Kajian Politik Ekonomi Pengelolaan Cagar Budaya” dan formulasi rekomendasi kebijakan untuk pengelolaan cagar budaya di Indonesia.

Kami mengakui bahwa buku ini tidak terlepas dari berbagai kekurangan atau kekeliruan namun besar harapan kami, buku ini dapat memberikan manfaat bagi khalayak luas, termasuk kalangan akademisi, praktisi yang terkait dalam pengelolaan cagar budaya dan penyusun kebijakan.

Jakarta, Desember 2013

Kepala Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan
Kebudayaan-LIPI

Ttd.

Dr. Endang Turmudi, MA

PENGANTAR PENERBIT

Persoalan pelestarian warisan budaya di Indonesia nampaknya menjadi beban besar bagi pemerintah saat ini. Berbagai studi dilakukan para ahli untuk membantu mereka merumuskan program-program solutif. Termasuk buku ini, yang merupakan hasil kajian mendalam yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan-LIPI untuk ikut ambil bagian dalam memecahkan persoalan yang mendera warisan budaya di Trowulan.

Pendekatan politik-ekonomi yang diusung dalam tulisan ini, menjadi pendekatan baru dalam melihat persoalan warisan budaya. Buku ini adalah hasil penelitian tahun kedua, yang memfokuskan pada persoalan kontestasi *stakeholder* yang berlangsung di Trowulan. Berbagai relasi dan konflik dibahas berdasarkan kasus-kasus besar yang pernah terjadi di Trowulan.

Pada bab kedua, buku ini mengawali pembahasannya tentang upaya konservasi pada masa kolonial Inggris dan Belanda. Bab ini juga menjelaskan tentang peradaban Majapahit yang identik dengan peninggalan situs-situs di Trowulan telah dikonstruksi oleh para nasionalis menjadi sebuah gagasan kebangsaan Indonesia.

Pada bab ketiga dan bab keempat, buku ini menjelaskan bagaimana politik ekonomi berlangsung dalam upaya pelestarian yang dijalankan oleh pemerintah. Implikasi dari muatan politis dan ekonomi dalam program-program pelestarian memunculkan kontestasi, terutama di antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan akademisi. Media dan NGO juga berperan dalam keberlangsungan kontestasi di Trowulan. Masyarakat kepercayaan dan kesenian menjadi kelompok yang menginginkan kejayaan Majapahit bangkit kembali. Ide itu banyak menimbulkan resistensi di kalangan masyarakat Trowulan yang mayoritas Islam.

Buku *Politik Ekonomi Pelestarian Warisan Budaya Trowulan* ini patut dilihat sebagai sumbangan pemikiran yang dapat memperkaya khasanah pemikiran dan pengetahuan terhadap keberadaan warisan budaya di Trowulan.

Semoga buku ini dapat memberi manfaat bagi pembaca dalam menumbuhkan kesadaran akan pentingnya keberadaan warisan budaya di Indonesia.

Jakarta, Desember 2013

Penerbit,

PT. Gading Inti Prima

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PENGANTAR PENERBIT.....	iii
DAFTAR ISI.....	v

BAB I

PENDAHULUAN 1

1.1 Pendekatan Politik-Ekonomi: Tinjauan Singkat	7
1.2 Politik Ekonomi Warisan Budaya	10

BAB 2

KONSERVASI TROWULAN-MAJAPAHIT 'SEBUAH POLITIK KEBUDAYAAN' 19

2.1 Minat Kolonial	21
2.2 Menjadi Urusan Negara	26
2.3 Gagasan Nasionalisme	33

BAB 3

POLITIK EKONOMI PELESTARIAN 39

3.1 Upaya Mengatur Kembali	41
3.2 Rencana Induk Arkeologi	43
3.3 Masyarakat Trowulan	49
3.4 Membangun Negosiasi.....	60
3.5 Pusat Informasi Majapahit	68
3.6 Akademisi, NGO, dan Media: Posisi Kritis?	82

BAB 4

RUANG KONTESTASI..... 87

4.1 Pabrik Baja	88
4.2 Para Pencinta Majapahit	96

4.3 Masyarakat Islam Santri 106

BAB V
P E N U T U P 115

DAFTAR PUSTAKA 121

BAB I

PENDAHULUAN

Sebagai negeri yang kaya warisan budaya, memungkinkan bagi Indonesia untuk menggiring masyarakat dunia ke sebuah pandangan, bahwa upaya-upaya pelestarian yang mereka lakukan dapat menjadi contoh atau acuan bagi negara lainnya. Namun begitu ironis, ketika peringatan oleh lembaga internasional yang ditunjukkan kepada Indonesia, misalnya ancaman UNESCO pada pencabutan status Borobudur sebagai salah satu warisan dunia tahun 2011 dan Situs Peninggalan Majapahit di Trowulan yang masuk ke dalam situs yang terancam di dunia oleh *World Monument Fund* (WMF) tahun 2013, telah memburyarkan pandangan tersebut.

Sebetulnya telah banyak program pelestarian warisan budaya dijalankan oleh pemerintah Indonesia. Data yang kami dapatkan hingga tahun 2007, telah dilakukan inventarisasi 7.374 situs, penetapan 400 situs, pemugaran 422 situs, pemeliharaan 1.872 situs dan perlindungan 148 situs.¹ Namun, berbagai program tersebut dirasakan belum cukup efektif dalam menyelesaikan persoalan pelestarian. Bahkan akhir-akhir ini, sempat muncul persoalan terkait program pemerintah yang diduga telah keluar dari kepentingan awal, bukan melindungi namun sebaliknya ikut merusak sisa-sisa peninggalan budaya. Persoalan seperti itu hadir karena dipengaruhi oleh berbagai keterbatasan baik dari dalam (*intern*), maupun luar (*ekstern*) negara.

Apabila, faktor intern dapat diindikasikan pada keterbatasan sumber daya manusia, sistem negara, dan kepentingan-kepentingan aktor tertentu dalam pemerintahan, maka faktor luar berlangsung sebagai

¹Direktorat Peninggalan Purbakala, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. 2007. Rekapitulasi data pelestarian situs/benda cagar budaya tidak bergerak seluruh Indonesia sampai dengan Februari 2007.

bentuk respon pihak-pihak *non-state* terhadap program-program pelestarian warisan budaya oleh pemerintah.

Persoalan warisan budaya biasanya hadir dalam bentuk dualitas, antara kepentingan "*heritage*" dan ekonomi. Di mana kepentingan ideologi untuk menjadikan warisan budaya sebagai identitas negara-bangsa, harus berhadapan dengan kepentingan ekonomi masyarakat. Muncul anggapan, bahwa selama ini sebagian besar program pelestarian pemerintah kurang memberikan perhatian pada keberadaan masyarakat. Bahkan, sebagian lainnya lebih menganggap berbagai program pelestarian tersebut, hanya sebatas proyek.

Dalam kasus tertentu, pemerintah cenderung memberikan akses lebih untuk kelompok dunia usaha (swasta) dalam memanfaatkan warisan budaya. Kondisi yang menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, di mana kebutuhan ekonomi mereka cukup bergantung dari keberadaan warisan budaya. Rasa khawatir yang lantas terakumulasi dalam bentuk ketidakpercayaan pada pemerintah. Pada akhirnya, melahirkan sebuah '*defense*' terhadap program pelestarian, dalam berbagai bentuk strategi politik dan ekonomi. Strategi yang bertujuan untuk tetap memelihara akses pemanfaatan warisan budaya oleh masyarakat.

Namun, bukan berarti program pelestarian pemerintah selalu berakhir dengan kegagalan. Bagaimanapun, terdapat juga program pelestarian yang telah membawa manfaat dan perubahan bagi masyarakat. Sudah sejak zaman kolonial, upaya pelestarian warisan budaya berlangsung dan terus berjalan secara berkelanjutan. Proses tersebut berlangsung sejalan dengan perubahan arah dan konsep pelestarian yang digunakan setiap zamannya.

Secara umum, konsep-konsep pelestarian warisan budaya di Indonesia telah dipengaruhi oleh berbagai cara pandang ahli, baik dari kalangan birokrat ataupun akademisi. Pemerintah biasanya menggunakan bantuan mereka dalam merumuskan arah suatu program pelestarian warisan budaya. Sikap objektif dalam keterlibatan para ahli patut dipertanyakan, ketika mereka cenderung untuk tidak menempatkan diri pada posisi kritis. Mereka seolah berubah peran menjadi sekedar alat

justifikasi bagi pemerintah. Kondisi tersebut, mirip yang terjadi pada zaman Belanda, ketika KITLV sebagai lembaga penelitian ilmiah dikontrol kuat oleh pemerintah dan bekerja demi kepentingan kolonial secara luas.

Para ahli dari luar lingkungan pemerintah, seperti kalangan akademisi, kadang memanfaatkan kedekatan mereka dengan para birokrat sebagai cara untuk membuka akses dalam keterlibatan di sebuah program pelestarian warisan budaya. Desakan pemerintah untuk menjalankan arah pelestarian pada tujuan tertentu, telah melupakan posisi akademis mereka. Bahkan, sebagian dari mereka bekerja diluar kaidah keilmuan yang ada. Sebagian yang lain tetap menempatkan diri pada posisi kritis, dan cenderung menghindari dari intervensi politik. Namun, posisi mereka terbilang rentan untuk tidak dilibatkan kembali dalam suatu perumusan kebijakan. Kondisi tersebut, secara umum telah memaksa para akademisi untuk berpikir lebih fleksibel, ketika ingin tetap menjadi bagian dari perumus berbagai program pelestarian warisan budaya.

Para akademisi telah menempatkan diri mereka pada kedudukan penting dalam banyak program pelestarian pemerintah. Selama proses perumusan berlangsung, para ahli menunjukkan bahwa mereka bukan pada posisi yang tunggal. Mereka memiliki perbedaan pemahaman dalam menentukan arah pelestarian, dan biasanya mereka -terutama akademisi- mewakili kepentingan mempengaruhi jalannya proses pelestarian secara umum ke depannya. Bagi mereka yang sejalan dengan pemerintah akan bertanggungjawab mengawal jalannya program, sedangkan bagi mereka yang tidak dilibatkan, menempatkan diri pada posisi kritis untuk terus mengevaluasi berbagai kelemahan program pelestarian yang akan dan sedang berlangsung.

Kecilnya manfaat berbagai program pelestarian warisan budaya yang telah berakhir, menjadi salah satu faktor munculnya berbagai kelompok baru yang mengklaim ikut bertanggungjawab dalam pelestarian warisan budaya. Upaya mereka terwadahi dalam bentuk organisasi, komunitas, atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Mereka

mengklaim sebagai pihak yang berhak melindungi berbagai warisan budaya dan kepentingan masyarakat sekitar. Dalam mencapai suatu tujuan, mereka memberikan pemahaman, advokasi dan bantuan lain kepada masyarakat. Kadang mereka berdiri di belakang masyarakat yang sedang mengalami konflik dengan pemerintah atau dunia usaha. Pada dasarnya, cara kerja mereka tidak jauh berbeda dengan pemerintah yang memberikan sosialisasi, alternatif, dan berbagai arahan kepada masyarakat.

LSM sendiri kadang bekerja mewakili kepentingan lembaga donor atau pendonornya. Dapat juga menjadi alat kelompok tertentu yang sedang berkonflik. Tujuan mereka dalam membantu masyarakat kembali dipertanyakan, saat tujuan baik mereka di awal, berubah selama proses berlangsung karena mendapat berbagai tekanan politik.

Tulisan ini ingin menggambarkan bagaimana upaya pelestarian salah satu warisan budaya di Indonesia berlangsung secara kompleks, karena pengaturan sendiri tidak seluruhnya berada dalam wewenang pemerintah. Pelestarian melibatkan berbagai stakeholder yang memiliki perbedaan cara pandang, dan biasanya lebih mewakili kepentingan kelompok daripada kepentingan nasional. Dugaan tersebut, diperkuat oleh hasil penelitian kami di tahun pertama (2012), yang memfokuskan pada identifikasi stakeholder pada pelestarian warisan budaya di Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Dalam penelitian, kami memperoleh suatu hipotesis yang memperlihatkan kompleksitas pelestarian warisan budaya di Trowulan syarat dengan kepentingan politik dan ekonomi, dan membentuk pola distribusi kekuasaan yang menyebar di antara stakeholder. Masing-masing stakeholder secara *termanage* berupaya menjalankan berbagai strategi dan relasi kekuasaan untuk mendapatkan sumber daya potensial di Trowulan.

Hasil penelitian tahun pertama menjelaskan bahwa stakeholder di Trowulan, secara garis besar terdiri dari lima kelompok, yaitu pemerintah, masyarakat, dunia usaha (swasta), akademisi, dan LSM. Masing-masing kelompok tersebut tidak tunggal, karena terbagi kedalam kelompok yang lebih kecil. Muncul beragam kepentingan,

dari yang memang peduli pelestarian, hingga mereka yang hanya ingin menjalankan kepentingan politik dan ekonomi semata. Generalisasi satu kelompok tertentu, akan menjadi persoalan dalam proses pencapaian suatu keberhasilan program pelestarian warisan budaya.

Pada tahun kedua (2013) ini, pembahasan diarahkan pada persoalan praktek-praktek dalam lingkup pendekatan politik-ekonomi yang berlangsung di Trowulan. Politik-ekonomi yang dimaksud berfokus pada bagaimana kekuasaan dan sumber daya didistribusikan dan diperebutkan oleh masing-masing stakeholder dalam konteks yang berbeda, dan implikasinya untuk hasil-hasil pembangunan kebudayaan. Perspektif politik-ekonomi diawali dari kebijakan program pelestarian di Trowulan yang dirumuskan oleh pemerintah. Program tersebut, menyiratkan adanya kepentingan politik dan ekonomi di dalamnya, yang terjadi baik di luar rencana awal atau memang sudah diarahkan sebelumnya.

Dalam ranah para ahli, baik dari lingkungan birokrat maupun akademisi, politik-ekonomi berlangsung ketika mereka cenderung mengikuti cara pandang pemerintah daripada menempatkan diri sebagai pihak netral dan objektif. Implikasi dari ketidakberhasilan program pelestarian di Trowulan dalam suatu warisan budaya telah menciptakan cara pandang 'negatif' di kalangan masyarakat, LSM, dan lainnya, yang kemudian mereka menciptakan strategi dan relasi dengan pihak lain agar tetap ikut merasakan kemanfaatan warisan budaya di Trowulan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Beberapa metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur, pengamatan (*Observation*), wawancara mendalam (*depth interview*), dan *Focus Group Discussion* (FGD). Pada tahapan pertama, adalah studi literatur, yaitu menelaah berbagai tulisan yang terkait dengan warisan budaya, politik-ekonomi dan pelestarian warisan budaya di Trowulan. Studi literatur sangat bermanfaat untuk memperkaya wawasan kami yang memang masih tergolong baru dalam menyelami persoalan warisan

budaya. Selain itu, metode ini dapat memberikan arah bagi konsep teori dan model analisis yang akan digunakan pada langkah berikutnya.

Tahapan kedua adalah pengamatan (*observation*) yang dilakukan di Trowulan. Lingkup spasial Trowulan yang dimaksud dalam tulisan ini mencakup Kabupaten Mojokerto dan sebagian kecil Kabupaten Jombang. Pengamatan dimaksudkan untuk mencatat berbagai hal penting berkaitan dengan tujuan penelitian, seperti kondisi geografi lokasi, demografi dan berbagai hal yang berkaitan dengan kependudukan, serta informasi aktual kehidupan sosial budaya di Trowulan. Pada tahap ini, dilakukan juga pengambilan gambar atau foto yang relevan dengan tujuan penelitian. Dalam tahap ini, peneliti membuat *rapport* dengan calon narasumber dan responden untuk mempermudah penelitian di lapangan.

Tahapan ketiga adalah wawancara. Teknik pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui wawancara mendalam (*depth interview*) dengan informan dari berbagai latar belakang. Informan diberi kesempatan untuk menyampaikan informasi penting lain yang relevan dengan maksud penelitian. Hal tersebut dilakukan karena acapkali informan memiliki informasi di luar batasan penelitian, dan ternyata itu penting karena mendukung substansi tulisan secara keseluruhan.

Tahapan keempat adalah *Focus Group Discussion* (FGD), yaitu melakukan pertemuan dan diskusi dengan informan dalam jumlah terbatas yang diduga mengetahui berbagai persoalan kebudayaan dan fenomena sosial yang terjadi selama program-program pelestarian warisan budaya di Trowulan berlangsung. Tahapan ini, selain untuk ajang cek dan ricek data yang diperoleh melalui wawancara dan pengamatan, juga dapat mengkritisi hasil penelitian di lapangan.

Analisis data kualitatif dalam penelitian ini memiliki tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan berbagai data kasar yang berasal dari catatan di lapangan. Dalam reduksi data, kami menajamkan, mengarahkan, dan membuang data yang tidak perlu. Setelah itu dilakukan penyajian data, di mana

sekumpulan data disusun hingga kesimpulan akhir dapat diambil. Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Kesimpulan dirumuskan secara longgar, namun setelahnya dibuat menjadi lebih rinci yang sesuai dengan tujuan awal.

Persoalan politik ekonomi pelestarian warisan budaya di Trowulan bukan kajian yang mudah untuk dilakukan. Kami menyadari keterbatasan sudah mulai dirasakan sejak awal penelitian berlangsung. Menduduki posisi sebagai bagian dari pemerintah adalah sebuah keterbatasan yang mau tidak mau mempengaruhi subjektifitas kami sebagai peneliti dan upaya dalam mengkonstruksi teks berdasarkan data-data di lapangan.

Tulisan ini tidak banyak memberikan solusi terbaik yang harus dilakukan oleh stakeholder dalam upaya melestarikan warisan budaya di Trowulan. Namun, kami berusaha untuk mengarahkan pada sebuah cara pandang, bahwa proses politik-ekonomi merupakan aspek penting yang perlu dipertimbangkan oleh segenap pihak, terutama pemerintah untuk menyusun rancangan program pelestarian warisan budaya di Indonesia. Besar harapan kami, tulisan ini dapat mendorong pemikiran para pihak yang lebih kritis dan efektif dalam membuat sebuah model pelestarian warisan budaya di Indonesia. Tentunya, kami menaruh harapan di tahun ketiga, agar dapat memberikan solusi yang konkret untuk pembuat kebijakan dalam membangun strategi pelestarian warisan budaya di Trowulan.

1.1. Pendekatan Politik-Ekonomi: Tinjauan Singkat

Secara umum, analisis politik-ekonomi berfokus pada bagaimana kekuasaan dan sumber daya didistribusikan dan diperebutkan dalam konteks yang berbeda. Analisis politik-ekonomi berhubungan dengan interaksi politik dan proses ekonomi dalam sistem negara dan masyarakat, distribusi kekuasaan dan kekayaan antara kelompok dan individu yang berbeda, serta proses yang menciptakan, mempertahankan dan mengubah hubungan kekuasaan dari waktu ke

waktu. *Pertama*, pengertian ini menggambarkan perhatian khusus terhadap politik, yang dipahami dalam kerangka kontestasi dan tawar-menawar antara berbagai kelompok kepentingan (*stakeholder*) melalui klaim dan persaingan untuk mendapatkan hak atas sumber daya. *Kedua*, berkaitan dengan proses ekonomi yang menghasilkan kekayaan dan pengaruh bagaimana pilihan politik dibuat.

Pada kenyataannya, kedua proses tersebut saling erat berkaitan dan merupakan bagian dari rangkaian terpadu yang dapat mempengaruhi hasil pembangunan. Analisis politik-ekonomi sangat berguna bagi para praktisi, karena dapat membantu dalam memahami penyebab yang mendorong perilaku politik, bagaimana bentuk kebijakan dan program, siapa yang menjadi "pemenang" dan "yang kalah", serta implikasinya untuk strategi pengembangan dan program-program kedepan.

Secara khusus, analisis politik-ekonomi berhubungan dengan tiga aspek. *Pertama*, pemahaman kepentingan yang dihadapi berbagai kelompok berbeda, terutama elit politik, dan bagaimana menghasilkan hasil kebijakan tertentu yang dapat mendorong atau menghambat pembangunan. *Kedua*, peran lembaga formal dan informal dalam membentuk interaksi manusia dan persaingan politik dan ekonomi. *Ketiga*, dampak dari nilai-nilai dan ide-ide, termasuk ideologi politik, agama dan keyakinan budaya, perilaku politik dan kebijakan publik. Melalui cara ini, analisis politik-ekonomi membantu kita untuk memahami bagaimana lembaga membentuk ide-ide dan hasil tindakan politik dan pembangunan.²

Analisis politik-ekonomi dapat dibedakan ke dalam tiga bagian, yang *pertama* adalah analisis di tingkat makro, negara. Tingkat ini bertujuan untuk memahami lingkungan politik-ekonomi yang lebih luas pada konteks negara. Hal ini dapat berguna untuk menginformasikan proses perencanaan negara dan strategi secara keseluruhan. Terdapat interaksi yang dinamis di antara tiga faktor dalam tingkat ini yaitu struktur,

²DFID. *Political Economy Analysis How To Note*, A DFID Practice Paper, July 2009.

lembaga, dan agen. *Struktur* didefinisikan sebagai faktor-faktor kontekstual jangka panjang. Pada umumnya, tidak mudah untuk dipengaruhi oleh kondisi geografi, kekayaan sumber daya alam, pergeseran demografi, perubahan iklim, dan kemajuan teknologi. *Lembaga* dapat bersifat formal seperti aturan konstitusi dan hukum, maupun informal dalam arti norma-norma politik, sosial dan budaya. Dalam kasus tertentu, muncul ketegangan antara aturan formal dan hubungan kekuasaan informal. *Agen*, termasuk aktor internal seperti pemimpin politik, partai politik, pengusaha, serikat pekerja, LSM dan lain-lain, dan eksternal aktor seperti pemerintah asing, organisasi-organisasi regional, lembaga donor dan perusahaan multinasional.³

Kedua, adalah analisis tingkat sektor, yang bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan dan kesempatan dalam sektor-sektor tertentu. Setelah stakeholder utama ter-identifikasi, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi aktor paling berpengaruh, apa kepentingan dan insentif mereka, dan bagaimana melakukan bentuk dinamika keseluruhan sektor, termasuk kelayakan diusulkan reformasi kebijakan. Beberapa persoalan yang termasuk dalam analisis ini, misalnya tentang “peran”, siapa saja pemangku kepentingan utama yang bermain pada sektor tertentu? Apa peran dari pemain yang berbeda? Apakah ada keseimbangan antara pusat dan daerah? Kemudian tentang, “hubungan kekuasaan”, sampai sejauh mana kekuasaan yang diberikan di tangan individu-individu tertentu atau kelompok? bagaimana kelompok kepentingan yang berbeda di luar pemerintahan, misalnya sektor dunia usaha, LSM, atau media berusaha untuk mempengaruhi kebijakan?⁴

Ketiga, adalah analisis masalah, diarahkan untuk memahami dan menyelesaikan masalah tertentu di tingkat program, atau dalam kaitannya dengan isu kebijakan tertentu. Analisis politik-ekonomi juga dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman dan menyelesaikan

³DFID. *Political Economy Analysis How To Note*, A DFID Practice Paper, July 2009.

⁴DFID. *Political Economy Analysis How To Note*, A DFID Practice Paper, July 2009.

masalah tertentu di tingkat proyek, atau dalam kaitannya dengan spesifik masalah kebijakan, yang dapat melintasi sejumlah sektor. Kerangka kerja ini dapat mendorong pengguna untuk mengidentifikasi masalah, isu atau kerentanan yang harus ditangani dan memetakan kelemahan kelembagaan dan tata kelola yang mendukung permasalahan tersebut.⁵

1.2 Politik Ekonomi Warisan Budaya

Pelaksanaan berbagai program pelestarian warisan budaya di Trowulan telah berlangsung sejak masa kolonial. Pada awalnya, komunitas-komunitas pecinta barang antik sebagai agen pemrakarsa konsep pelestarian saat itu. Ketika Inggris dibawah Raffles, berkuasa di Jawa (1811-1816), perlindungan warisan budaya berada dibawah kendali negara. Kepentingan untuk menguasai Jawa yang memiliki warisan budaya bernilai tinggi, dapat melahirkan kebanggaan bagi Inggris di mata negara-negara Eropa kolonial lainnya. Kesadaran Raffles atas pentingnya keberadaan warisan budaya, menjadi pembelajaran bagi Belanda saat kembali menguasai Jawa, yang kemudian mengambil alih urusan warisan budaya melalui pembentukan lembaga kebudayaan dibawah naungan pemerintah. Diperkuat dengan pembuatan aturan hukum telah mengukuhkan pemerintah Belanda sebagai satu-satunya pihak yang berwenang penuh atas pelestarian warisan budaya.

Benedict Anderson (2001) meyakini ada tiga alasan perhatian warisan budaya, *pertama* perhatian arkeologis bertindihan dengan pergulatan politis terutama kebijakan pendidikan negara. Konservasi arkeologis dipandang sebagai program konservatif untuk menjadikan kaum pribumi tetap pribumi. *Kedua*, program ideologis formal rekonstruksi itu senantiasa menempatkan para pembangun monumen kuno berbeda ras dengan penduduk pribumi. *Ketiga*, negara kolonial dianggap paling pantas sebagai penjaga tradisi tinggalan-tinggalan kuno tersebut. Para kolonial menanggapi pribumi tidak mampu meneruskan peradaban

⁵DFID. *Political Economy Analysis How To Note*, A DFID Practice Paper, July 2009.

tinggi tersebut. Mereka menganggap masyarakat pribumi terbelakang dan miskin, sehingga pihak yang paling pantas menjaga warisan budaya adalah para kolonial, yang juga memiliki peradaban tinggi.⁶

Belanda nampaknya tidak terlalu memikirkan implikasi dari lahirnya program-program pelestarian warisan budaya terhadap kebangkitan identitas oleh *indigineous people*, seperti implikasi politik yang datang setelah penerapan politik etis. Ketidakhirauan pemerintah Belanda, secara tidak langsung melahirkan tokoh-tokoh pribumi memanfaatkan secara politik keberadaan warisan budaya, seperti di Trowulan melalui kebesaran Majapahit-nya, telah dikonstruksi oleh Sjahrir dan Yamin menjadi suatu gagasan nasionalis dan menunjukkan kesatuan luas wilayah Indonesia menjelang kemerdekaan.

Upaya pelestarian warisan budaya oleh pemerintah Belanda sendiri tidak berjalan mudah. Mereka harus menghadapi berbagai persoalan, dimulai sejak terjadinya Perang Jawa, hingga periode tumbuhnya kapitalisme dan industrialisasi. Dampak dari gejala politik dan ekonomi tersebut, mendorong pemerintah Belanda untuk mengesampingkan upaya-upaya pelestarian warisan budaya di Trowulan. Barulah, setelah kondusif, berbagai upaya pelestarian kembali digalakkan.

Setelah Indonesia merdeka, keberadaan warisan budaya di Trowulan tetap menjadi potensi penting. Pelestarian warisan budaya dengan tujuan ideologis menjadi ciri awal kepentingan pemerintah saat itu. Secara umum, berbagai program pelestarian telah berlangsung di beberapa warisan budaya, terpilih oleh negara secara terukur dan representatif melalui nilai-nilai pentingnya.

Namun, tidak semua program tersebut mampu mencapai tujuan awal pelestarian. Bahkan, terdapat program yang malah ikut mengambil bagian dalam perusakan warisan budaya. Kepentingan terhadap warisan budaya semakin beragam, sejalan dengan kemunculan berbagai kelompok yang mengklaim memiliki hak atas pemanfaatan

⁶Benedict Anderson. 2001. *Imagined Communities*. Yogyakarta: Insist Press, hlm. 276-278.

warisan budaya. Relasi dan konflik yang kerap terjadi di antara mereka, melahirkan sebuah kontestasi, yang mempengaruhi tingkat keberhasilan berbagai program pelestarian tersebut.

Muatan politis yang diusung oleh kelompok tertentu di pemerintahan dengan mudah dapat melekat di dalam program-program pelestarian. Para birokrat, yang memiliki kekuasaan besar, tidak sulit untuk merancang sebuah program, tanpa diketahui oleh banyak pihak, kalau program tersebut kental dengan kepentingan politis maupun ekonomi. Tujuan nyata mereka tidak nampak di permukaan, karena kalah dengan isu klaim pelestarian.

Pertentangan akan hadir saat sebagian dari para birokrat menyadari perkembangan situasi yang hanya diketahui oleh kalangan terbatas. Mereka yang banyak berasal dari latar belakang akademisi, mencoba untuk menempatkan diri pada posisi yang netral, sesuai kaidah keilmuan, dan objektif. Posisi mereka menjadi strategis, saat menduduki suatu yang memegang wewenang atas program pelestarian pemerintah. Jadi, masih banyak orang-orang di pemerintahan yang tetap berupaya memperbaiki persoalan yang hadir dalam pelestarian warisan budaya. Dalam beberapa kasus, hal itu secara kebetulan terjadi di tengah-tengah munculnya kepentingan pemerintah yang bermuatan politis dalam pengaturan warisan budaya.⁷

Di tingkat masyarakat, warisan budaya merupakan bagian dari lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi mereka. Jauh sebelum pemerintah secara lebih “ketat” membatasi pemanfaatan warisan budaya, mereka sudah paham betul bagaimana menjadikan warisan budaya sebagai komoditas. Di kalangan masyarakat sendiri, banyak klaim dan persaingan berlangsung dalam perebutan hak pemilikan warisan budaya. Sehingga keberadaan masyarakat dapat dikatakan juga tidak “tunggal”. Mereka tidak selamanya berada dalam pihak yang lemah, karena kekuasaan tetap hadir dan menyebar di banyak aktor.

⁷John Pemberton. 2010. (Dis)Orientasi Budaya “Jawa” dalam Budi Susanto (ed). *Indonesia di Mata (mata-i) Postkolonialitas*. Yogyakarta: Kanusius, hlm. 71-75.

Pada tingkat lokal, masing-masing memiliki peran dalam membentuk suatu sistem kepemilikan warisan budaya, yang bisa sejalan atau berbeda dengan pemahaman pemerintah.

Dampak yang hadir, ketika pemerintah berniat untuk mengambil alih pengaturan warisan budaya, masyarakat merasa terganggu hak kepemilikannya. Program pelestarian warisan budaya oleh pemerintah dianggap kurang memperhatikan aspirasi dan kebutuhan mereka. Pembatasan dalam berbagai bentuk pemanfaatan warisan budaya diperkuat oleh aturan hukum yang berlaku. Artinya, kekuasaan pemerintah pada dasarnya jauh lebih besar daripada kekuasaan yang hadir di tingkat masyarakat. Namun, masyarakat mampu memanfaatkan berbagai isu, seperti persoalan HAM, kesejahteraan masyarakat, -sebagian besar didukung oleh LSM- menjadi suatu strategi dalam menyuarakan betapa pentingnya keberadaan mereka.

Bagi elit lokal, menjalin relasi dengan pemerintah daerah atau pusat terkait pemanfaatan warisan budaya, adalah bagian lain dari upaya untuk tetap dapat memperoleh keuntungan dari keberadaan warisan budaya. Namun, biasanya hanya kalangan terbatas yang merasakan dampak dari relasi tersebut.

Dalam merumuskan suatu program pelestarian, pemerintah tidak sendiri karena dibantu oleh para ahli yang mayoritas berasal dari kalangan akademisi. Banyak kasus, keberadaan para ahli ini menyiratkan hadirnya sebuah *power of knowledge* yang besar untuk menyusun atau memperbaiki berbagai program pemerintah yang tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Banyak *statemen* mereka begitu “ampuh” untuk mempengaruhi perumusan suatu program pelestarian.

Namun, sebenarnya di antara para ahli tersebut tidak seluruhnya memiliki kesamaan persepsi dalam memberikan suatu model. Beberapa diantaranya, telah mengarahkan pemikiran sejalan dengan kepentingan pemerintah, sehingga dianggap sudah tidak bebas nilai. Sebagian lain, menempatkan diri sebagai kelompok kritis, tetap mengedepankan profesional mereka sebagai akademisi.

Sejalan dengan itu, kurang efektifnya program pelestarian pemerintah, dapat saja terjadi ketika mereka terlalu menyederhanakan persoalan di lapangan. Tania Murray Li (2012) menjelaskan bahwa praktek pokok yang diperlukan untuk menerjemahkan pengaturan menjadi program-program yang eksplisit ada dua. *Pertama* problematisasi, yaitu langkah pengenalan berbagai kekurangan yang perlu dibenahi. *Kedua* adalah teknikalisis permasalahan, yaitu serangkaian praktik yang menampilkan urusan yang hendak diatur sebagai suatu ranah yang mudah dimengerti, yang tegas cakupannya, jelas ciri-cirinya,... dan mengembangkan teknik untuk menggerakkan kekuatan serta unsur-unsur yang telah ditampilkan tadi.⁸

Dalam konteks ini, pemerintah cenderung lebih memilih untuk melibatkan para ahli yang dapat sejalan dengan pemikiran-pemikiran mereka. Dalam teknikalisis permasalahan, dapat menjadi awal dari penegas kepakaran dan memisahkan pada ahli dan pemerintah sebagai pihak yang memiliki kemampuan untuk menganalisa persoalan dengan masyarakat sebagai objek yang tidak mengerti apa-apa. Seperti halnya, dalam berbagai kasus pelestarian warisan budaya, masyarakat tidak mendapatkan ruang lebih dalam rancangan program, sebaliknya mereka ditempatkan sebagai kelompok perusak warisan budaya yang harus diatur sebaik mungkin.

Dalam teknikalisis permasalahan, segala urusan tentang warisan budaya dilucuti aspek-aspek politiknya menjadi gejala non-politis. Para ahli dari kalangan pemerintah atau akademisi yang dilibatkan dalam proyek-proyek pemerintah dilatih untuk menerjemahkan berbagai persoalan politis menjadi masalah teknis yang dapat diperbaiki melalui intervensi pembangunan.⁹ Kami melihat, bahwa ada dimensi dari program-program pelestarian yang sepertinya dirancang sebagai langkah untuk mempertahankan kekuasaan.

⁸Tania Murray Li. 2012. *The Will To Improve*, Tangerang: Marjin Kiri, hlm. 13. Ia meminjam istilah Rose, dalam *Power of Freedom* tentang penerjemahan teknis atau mentekniskan (*rendering technical*).

⁹Tania Murray Li. 2012, hlm. 14.

Ketika membahas tentang program pembangunan di Sulawesi Tengah, Tania sendiri tidak berpendapat bahwa upaya pembangunan adalah semata-mata untuk memelihara dominasi kelas tertentu. Namun, dalam kasus warisan budaya, terdapat program yang cenderung dirancang untuk tujuan politis tertentu dan memiliki alasan kuat untuk meragukan sejumlah klaim yang dibuat atas nama pelestarian. Walaupun bukan menjadi bahasan dalam tulisan ini, kasus Gunung Padang yang akhir-akhir ini menjadi persoalan dalam pelestarian warisan budaya mungkin dapat mewakili pemikiran tersebut.

Memang sikap yang mencurigai adanya niat tersembunyi untuk mengejar keuntungan sepihak atau dominasi tertentu dalam kasus-kasus pelestarian warisan budaya hanya akan mempersempit ruang analisa.¹⁰ Awal pemikiran dalam tulisan ini menyiratkan bahwa apa yang menjadi fokus pembahasan lebih merujuk pada warisan budaya yang bersifat kebendaan (*tangible*) seperti cagar budaya.

Warisan budaya itu sendiri secara garis besar dibagi menjadi dua, yang sifatnya *tangible* dan *intangible* (tak benda). Namun, selain justifikasi yang telah dipersiapkan, ternyata fokus pembahasan tulisan ini juga didukung dengan instrumen negara tentang peraturan warisan budaya yang memang lebih mendahulukan urusan *tangible* daripada *intangible*. Sejak *Monumenten Ordonnantie* Nomor 21 Tahun 1934 (*Staatsblad* Tahun 1934 Nomor 515) pada masa kolonial hingga saat ini di mana pengaturan berada di bawah UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Oleh negara saat ini, cagar budaya diartikan sebagai warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.¹¹

Di Indonesia, terdapat program pelestarian warisan budaya diawali atas kepercayaan terhadap simbol-simbol spiritual tertentu. Para pemimpin,

¹⁰Tania Murray Li. 2012, hlm. 14.

¹¹Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

meyakini dengan memelihara atau membangun suatu situs tertentu, dapat menyeimbangkan tugas mereka sebagai seorang pemimpin dan sebagai makhluk spritual. Dalam konteks tersebut, warisan budaya sebagai ruang spiritual dapat dipelihara melalui berbagai program pelestarian selama mereka berkuasa. Di mana, para birokrat bawahan, ditunjuk untuk menerjemahkan kemauan mereka tersebut. Inisiatif para birokrat bawahan, untuk memenuhi keinginan atasan mereka dapat terjadi secara sadar karena mereka juga memiliki kepentingan tertentu.

Dapat juga sebaliknya, mereka yang tunduk, sering tidak menyadari bahwa kekuasaan itu sedang dijalankan. Kekuasaan cenderung bersifat subjektif, kesediaan semacam ini dapat ditanamkan kepada orang yang bersangkutan secara sengaja, misalnya lewat persuasi. Kondisi itu disebut sebagai pengkondisian secara eksplisit atau kesediaan memang sudah menjadi bagian dari budaya, di mana sikap tunduk dipandang sebagai normal, tepat dan benar menurut tradisi. Penerapan kekuasaan yang membuat orang lain tunduk yang ada dalam sistem, dijalankan bukan sekadar lewat adanya pilihan-pilihan yang dibuat individu, namun juga melalui perilaku kelompok yang terstruktur secara sosial dan budaya dan lewat praktek-praktek institusi, yang memang bisa muncul dalam bentuk keengganan orang untuk bertindak atau untuk menentang kekuasaan.¹²

Walaupun dilakukan secara tidak sadar dan terkait stuktur tertentu, mereka mampu mengenali keadaan untuk memanfaatkan kepentingan – dan bukan kebutuhan- tertentu yang menjadi bagian dari rancangan berbagai program pelestarian. Pada tingkatan tersebut, persoalan semakin kompleks karena muncul aktor-aktor kepentingan yang *notabene* adalah bagian dari pemerintah. Di sisi lain, para ahli bermain melalui pengetahuan mereka, untuk memberikan cara terbaik yang perlu dijalankan oleh pemerintah.

¹²James A. Caporaso dan Davis P. Levine. 2008. *Teori-Teori Ekonomi Politik*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta, hlm. 424-438.

Antara keduanya (birokrat dan para ahli) dapat sejalan atau sebaliknya, dan karena kekuasaan ada di tangan pemerintah maka mereka yang dapat menyesuaikan dengan kepentingan birokrat yang dapat terlibat, sedangkan yang berada pada posisi kritis akan berjuang melalui media tertentu, untuk membentuk opini dalam mengkritik atau mengevaluasi berbagai program pelestarian pemerintah yang dianggap menyimpang dari tujuan awal.

Biasanya, suatu program yang dipaksakan akan menimbulkan persoalan baru. Dampak dari program yang seperti itu adalah kemunculan posisi-posisi baru yang ingin memanfaatkan keadaan, mereka dapat menjadi bagian dari pihak yang pro-pemerintah atau sebaliknya. Hubungan antara posisi-posisi tersebut; antara para ahli, birokrat, media, masyarakat, LSM, dan kelompok lainnya, telah membangun sebuah kontestasi pelestarian cagar budaya.

Analisa atas bentuk-bentuk kontestasi dapat membantu dalam memahami cara-cara bagaimana posisi-posisi kritis hadir ketika berhadapan dengan program-program pemerintah. Kontestasi adalah *“the action or process of disputing or arguing”*. Kontestasi yang dimaksud dalam tulisan ini adalah hal yang intrinsik dan menjadi sebuah bagian yang tak terelakkan dari sebuah sistem pelestarian cagar budaya. Kontestasi itu sendiri mencakup pertentangan dalam semua dimensi warisan budaya, hal-hal yang berkaitan dengan kepemilikan, pengelolaan, dan dualitas kepentingan antara warisan budaya sebagai identitas atau komoditas.¹³

Olsen dan Timothy (2002) menguraikan tiga tipe kontestasi. *Pertama*, di mana perbedaan klaim kelompok-kelompok sosial berbeda terhadap tempat, peristiwa, dan artefak warisan budaya yang sama. Contohnya, satu kelompok warisan budaya mungkin digantikan seluruhnya oleh kelompok lain. banyak kasus terjadi, masing-masing kelompok mengklaim kebenaran objektif masa lalu. *Variasi yang kedua* pada

¹³Tolina Loulanski. 2006. “Revising the Concept for Cultural Heritage: The Argument for a Functional Approach” dalam *International Journal of Cultural Property* 13, hlm. 207–233.

kontestasi adalah ketika warisan budaya diinterpretasi dan digunakan secara berbeda oleh bagian-bagian berbeda dalam satu kelompok, misalnya suatu populasi nasional atau agama. Adakalanya, sub-sub kelompok dalam kelompok lebih besar menginterpretasikan warisan budaya secara berbeda, juga menghasilkan kontestasi. *Kategori terakhir* pada kontestasi warisan budaya terjadi dalam konteks masa lalu yang paralel, atau ketika lebih dari satu sejarah terjadi pada tempat dan waktu yang sama.¹⁴

Kontestasi yang berlangsung di Kawasan Trowulan, kami duga merupakan suatu kondisi yang diperkuat akibat kurang efektifnya program pelestarian pemerintah. Kontestasi tersebut, berlangsung sebagai dampak dari distribusi kekuasaan atas kepemilikan hak atas warisan budaya yang tidak merata. Masing-masing stakeholder, baik pemerintah, masyarakat, akademisi, dan dunia usaha (swasta) membangun sebuah strategi politik untuk tetap berada pada suatu posisi yang menguntungkan agar tetap dapat memanfaatkan warisan budaya di Trowulan. Relasi kekuasaan berlangsung sedemikian rupa, dan secara tidak sadar membangun sebuah sistem yang menampilkan dominasi kelompok tertentu di antara yang lain.

¹⁴Dallen J Timothy dan Gyan P. Nyaupane (ed). 2009. *Cultural Heritage and Tourism in the Developing World: A Regional Perspective*. London and New York: Routledge, hlm. 42. Tania Muray Li dalam artikelnya yang berjudul "*Articulating Indigenous Identity in Indonesia: Resource Politics and the Tribal Slot*" membahas bagaimana masyarakat di Sulawesi tengah mencari sebuah kebenaran sejarah untuk mengartikulasikan diri mereka yang terpinggirkan dalam proses pembangunan. Sejarah dibangkitkan kembali menjadi sebuah identitas yang selama ini terpendam. Sejarah kembali dikonstruksi sebagai alat perjuangan ditengah-tengah ketidakadilan penguasa. Lihat Tania Murray Li. 2000. *Articulating Indigenous Identity in Indonesia: Resource Politics and the Tribal Slot. Comparative Studies in Society and History*, Vol. 42, No. 1. (Januari, 2000), hlm. 149-179.

BAB 2

KONSERVASI TROWULAN-MAJAPAHIT 'SEBUAH POLITIK KEBUDAYAAN'

Minat besar yang ditunjukkan oleh para ahli kolonial pada sejumlah warisan budaya di Nusantara, mengundang berbagai pertanyaan dari sejumlah kalangan ahli budaya pasca kemerdekaan. Pada awalnya, pemerintah Belanda di Hindia Belanda, belum memiliki perhatian besar pada warisan budaya. Kelompok yang menaruh perhatian waktu itu, datang dari komunitas-komunitas pecinta barang antik.

Pemerintah Belanda mulai mengetahui betapa pentingnya warisan budaya, setelah Raffles memberikan kesadaran bahwa warisan budaya memiliki nilai penting terutama bagi mengangkat citra Inggris di mata negara Eropa lainnya. Memperkenalkan dan melindungi warisan budaya di tanah jajahan adalah sebuah kebanggaan bagi mereka dan membangun rasa untuk memiliki warisan budaya. Seperti upaya Raffles dalam melakukan preservasi di Trowulan, yang kemudian diikuti oleh pemerintah Belanda saat kembali berkuasa di Hindia Belanda. Salah satu perhatian yang dilakukan oleh pemerintah Belanda saat itu adalah membentuk lembaga yang fokus mengurus kebudayaan.

Trowulan dikenal setelah Raffles mengungkapkannya dalam sebuah karya ilmiah, berjudul *History of Java*. Walaupun secara umum, Trowulan tidak banyak dibahas dalam karya tersebut, upaya Raffles meminta utusannya bernama Wardenaar untuk melakukan penelitian di daerah tersebut adalah suatu bentuk perhatian terhadap warisan budaya di Hindia Belanda, yang jarang hadir pada periode sebelumnya. Sebagai pemrakarsa dimulainya suatu penelitian sistematis di Trowulan, Raffles telah mengaktifkan sisa-sisa peninggalan di daerah tersebut dengan Kerajaan Majapahit.

Setelah Raffles, segala aktivitas pelestarian di Trowulan menjadi kewenangan pemerintah Belanda. Selain membentuk sebuah lembaga kebudayaan, pada periode ini ditandai dengan kehadiran seorang arsitek Belanda bernama Maclaine Pont yang membentuk lembaga penelitian khusus di Trowulan bernama *Oudheidkundige Vereeniging Majapahit* (OVM). Lembaga yang didirikan atas kerjasamanya dengan seorang bangsawan pribumi tersebut, bertujuan untuk memayungi berbagai kegiatan penelitian di Trowulan.

Bangunan kantor tempat lembaga itu berdiri, difungsikan juga sebagai ruang koleksi berbagai peninggalan arkeologi yang berhasil ditemukan selama penelitian berlangsung, baik oleh Maclaine Pont dan jajarannya maupun masyarakat sekitar. Namun ternyata, banyak benda peninggalan yang dibawa oleh Maclaine Pont ke luar negeri, suatu aktivitas yang mengingatkan kembali pada upaya Raffles ketika 'membawa' benda-benda pusaka saat menaklukkan Keraton Yogyakarta pada tahun 1812.

Secara umum, program pelestarian yang dijalankan oleh pemerintah Belanda lebih dimaknai sebagai preservasi, yaitu suatu upaya pelestarian yang mengedepankan pada perlindungan fisik bangunan. Konsep tersebut diimplementasikan dengan mengembalikan bentuk suatu bangunan atau situs kuno persis seperti keadaan semula. Marieke Bloembergen menyebut istilah ini sebagai '*anastylosis*'.¹⁵

Metode rekonstruksi bangunan tersebut, juga nampak jelas berlangsung di Trowulan. Tujuan pemerintah Belanda mengumpulkan sisa-sisa

¹⁵ '*Anastylosis*' pertama kali dikembangkan di Yunani, sebuah proses dalam prinsip rekonstruksi yang hanya dimungkinkan dengan menggunakan bahan-bahan asli. Dinas Purbakala pada zaman Belanda –yang sebelumnya tidak pernah menggunakan istilah ini- mengembangkan metode ini di Asia. Untuk pertama kali sistem ini diterapkan pada Candi Panataran tahun 1917 – 1918. Lihat Marieke Blombergen dan Martijn Eickhoff. *Conserving The Past, Mobilizing The Indonesian Future: Archaeological Sites, Regime Change and Heritage Politics in Indonesia in the 1950s*. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Vol. 167, No. 4 (2011), hlm. 405 – 436.

peninggalan berbeda dengan tujuan komunitas benda kuno yang hanya menjadikan benda-benda tersebut sebagai koleksi. Sebuah kebanggaan bagi pemerintah Belanda mampu menjadi pewaris untuk melindungi warisan budaya di negeri jajahan mereka, apalagi warisan budaya tersebut mengindikasikan suatu peradaban yang tinggi.

Banyak benda peninggalan Majapahit asal Trowulan dipamerkan dalam suatu eksebisi internasional yang dihadiri oleh banyak negara Eropa. Benda-benda kuno yang dipamerkan dapat menjadi komoditas budaya, karena dapat menjadi daya tarik masyarakat Eropa untuk berkunjung ke Hindia Belanda. Kondisi yang sejalan dengan upaya pemerintah Belanda dalam mengembangkan sektor pariwisata di daerah jajahan.

Pemerintah Belanda telah mengawali sebuah politik kebudayaan di negeri jajahan mereka, melalui pendirian lembaga-lembaga formal pemerintah. Para ahli dari kalangan birokrat dan akademisi juga terlibat saat itu, untuk melakukan rekonstruksi sisa-sisa peninggalan kuno di berbagai daerah jajahan. Sebagaimana MO 1934 sebagai aturan cagar budaya saat itu, telah memperkuat status hukum berbagai upaya pelestarian yang dijalankan.

2.1 Minat Kolonial

Minat terhadap warisan budaya di Indonesia sudah muncul sejak masa kolonial awal abad ke-18, ketika beberapa orang Eropa mulai menaruh perhatian pada artefak dan bangunan kuno. Mereka terdiri dari individu atau komunitas yang memiliki latar belakang berbeda, mayoritas adalah naturalis dan pejabat pemerintah. G.E. Rumphuis, seorang ahli botani dan zoologi, dianggap sebagai salah satu ahli pemrakarsa minat penelitian warisan budaya di Indonesia. Pada tahun 1705, Rumphuis menerbitkan buku berjudul "*D'Amboinsche Rariteitkamer*" tentang benda-benda peninggalan kuno dan mitos dibalik benda-benda tersebut.¹⁶

¹⁶Daud A. Tanudirjo. 1995. "Theoretical trends in Indonesian archaeology" dalam Peter J. Ucko (ed.), *Theory In Archaeology: A World Perspective*. London: Routledge, hlm. 63.

Konsepsi orang Eropa mengenai benda budaya cenderung berbeda dibandingkan dengan masyarakat Jawa. Di dalam masyarakat kuno, seperti di Pasundan, Jawa, maupun Bali, penghargaan terhadap benda budaya tidak didasari keindahan estetis atau kekunoannya tetapi atas dasar kesaktiannya. Sebuah benda yang tidak bernilai estetis dapat dianggap luar biasa jika konon pernah dimiliki oleh seorang pahlawan atau menjadi bagian dari perangkat suatu kerajaan. Benda-benda dapat diyakini memiliki kesaktian dan diperlakukan dengan sangat hormat. Makna hakiki pusaka itu berasal dari masa lalu yang terkadang sangat kuno dan bertahan hingga kini.¹⁷ Sering terjadi benda-benda yang dianggap tidak berarti sama sekali oleh banyak orang Indonesia, oleh orang Eropa dianggap berharga karena sarat dengan makna historis. Keramik Cina yang dicari oleh kolektor Eropa, menjelang akhir 1960-an dipergunakan oleh Orang Jawa, Bali dan Sumatera sebagai barang pecah belah sehari-hari. Pengaruh Hindu Jawa sama sekali tidak menarik minat masyarakat yang telah di-Islamkan. Begitu pula dengan bangunan VOC tampak seperti tidak bernilai bagi para pejabat negara Indonesia merdeka, dan kadang-kadang mereka bahkan memerintahkan untuk menghancurkannya.¹⁸

Akibat tidak mengenal lagi pengertian pusaka, orang Eropa, terutama sejak awal abad ke-19, memasukkan konsepsi mereka sendiri mengenai benda budaya, atas dasar pertimbangan usia, ditambah kriteria kehalusan. Maka orang Belanda mengirimkan koleksi arca Indonesia yang pertama ke Eropa dan pada saat yang sama memperkenalkan pengertian museum di Hindia. Sejak saat itu, banyak peminat benda-benda kuno dan antik tertarik untuk melakukan penelitian dan pengkoleksian di Indonesia. Sejak abad ke-17, kapak perunggu dari zaman protosejarah dipajang di Ruang Benda Langka di Museum Rumphuis di Ambon, dan pada tahun 1733 Coyett telah memboyong

¹⁷Denys Lombard. 2005. *Nusa Jawa: Silang Budaya 1, Batas-Batas Pembaratan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 212.

¹⁸Denys Lombard. 2005, hlm. 212.

beberapa arca dari Jawa Tengah yang dipajang dikediamannya di Batavia.¹⁹

Pada tahun 1778, berdiri organisasi peminat dan peneliti benda seni dan antik yang bernama “*Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen*”.²⁰ Usaha komisi ini diantaranya mengumpulkan koleksi arkeologis, mata uang, dan naskah. Setelah diperkaya selama abad ke-19 dan ke-20, dan ditambah dengan ruang etnografi, berbagai koleksi itu kini merupakan khazanah Museum Nasional Jakarta, museum yang terkaya di seluruh Asia Tenggara.²¹

Perhatian terhadap sisa-sisa peninggalan kuno meningkat sejak pemerintahan Letnan Gubernur Jenderal Inggris, Sir Thomas Stamford Raffles (1811-1816). Ia sendiri tergolong pejabat yang menaruh perhatian besar terhadap kebudayaan dan masyarakat Jawa. Walaupun tergolong singkat menduduki jabatan penguasa tertinggi Inggris di Jawa, Raffles telah menghasilkan karya monumental yang berjudul “*The History of Java*” (1817). Sebuah karya komprehensif tentang sejarah dan kebudayaan Jawa. *The History of Java*, ditulis di Inggris dalam banyak hal adalah karya yang mengesankan. Karya tersebut, ditulis lebih baik dan jauh lebih mudah dibaca daripada tulisan pada pendahulunya, dan ia menuliskan karya dengan simpati besar pada penduduk asli Indonesia yang dalam sebagian besar karya sebelumnya belum pernah ada.²²

Dikenalnya peninggalan Majapahit di suatu desa - yang kemudian diperkenalkan dengan nama Trowulan-, juga dipengaruhi oleh kebijakan Raffles. Berita tentang sisa-sisa peninggalan kuno di Trowulan, mendorong Raffles membentuk komisi yang bertugas

¹⁹Denys Lombard. 2005, hlm. 212.

²⁰Daud A. Tanudirjo. 1995. “Theoretical trends in Indonesian archaeology” dalam Peter J. Ucko (ed.), *Theory In Archaeology: A World Perspective*. London: Routledge, hlm. 63.

²¹Denys Lombard. 2005, hlm. 212-213.

²²Bernard H.M. Vlekke. 2008. *Nusantara: Sejarah Indonesia*. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), hlm. 302-303.

melakukan survey pembuktian atas berita tersebut. Ia meminta mantan kapten di kesatuan insinyur tentara kolonial Belanda, Johannes Willem Bartolomeus Wardenaar (1785-1869) sebagai penanggungjawab. Sekitar tiga bulan melakukan survey (September sampai Oktober 1815) di Trowulan, ia berhasil menemukan sisa-sisa peninggalan kuno dalam bentuk candi dan bangunan. Amat disayangkan, peta Wardenaar tidak pernah dipublikasikan. Namun, hasil temuannya tetap menjadi bagian dari pengkayaan *History of Java*.²³ Keterkaitan nama Majapahit dan sisa-sisa peninggalan kuno di Trowulan secara jelas termaktub dalam karya tersebut. *History of Java* telah menasbihkan Raffles sebagai birokrat asing yang mampu menghadirkan suatu revolusi dalam historiografi Indonesia melalui penulisan sejarah yang *Indonesiasentris* bahkan *Javosentris*.²⁴

Sisa-sisa peninggalan Majapahit di Trowulan sendiri tidak banyak diulas dalam *History of Java*, yang kemudian mengundang teka-teki apakah memang Raffles sendiri tidak pernah menaruh ketertarikan besar terhadap sisa-sisa peninggalan di Trowulan. Apabila dikaitkan dalam konteks periode saat itu, kemegahan Borobudur sebagai bangunan tunggal tentu lebih menarik daripada sisa-sisa peninggalan Majapahit yang menyebar di antara semak-semak hutan jati.

Raffles sebagai pemrakarsa konservasi di Trowulan dan situs-situs lain patut dipertanyakan. Keraguan atas status tersebut, muncul di kalangan para ahli ketika bukti rekam jejak Raffles sebagai salah satu pihak yang membawa banyak temuan sisa-sisa peninggalan kuno di Trowulan ke

²³Thomas Stamford Raffles. 2008. *The History of Java*. Hamongan Simanjuntak dan Revianto B. Santosa (ed). Yogyakarta: Penerbit Narasi, hlm. 397-398. Amrit Gomperts, Arnoud Haag and Peter Carey menyatakan telah menemukan kembali "Plan of Majapahit" yang tidak dipublikasikan oleh Wardenaar di Drake Collection of the British Museum, Lihat Amrit Gomperts, Arnoud Haag and Peter Carey. 2008. *Stutterheim's Enigma: The mystery of his mapping of the Majapahit kraton at Trowulan in 1941*. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde (BKI)* 164-4 (2008), hlm. 421.

²⁴Hasan Djafar. 2012. *Masa Akhir Majapahit: Girindrawardhana dan Masalahnya*. Depok: Komunitas Bambu, hlm. 33.

negara asalnya. Apalagi, ia juga dianggap sebagai pihak orang yang bertanggung jawab atas 'perampasan' benda-benda keraton Yogyakarta.²⁵ Ironis, di satu sisi adalah seorang pemrakarsa, namun disisi lain bertindak ibarat pencuri. Tuduhan itu bisa saja salah, ketika dihadapkan pada satu hipotesis, bahwa tindakan tersebut memang telah dipersiapkan oleh Raffles sebagai bentuk penyelamatan sisa-sisa peninggalan kuno dari ancaman perdagangan ilegal barang-barang antik yang telah berkembang sejak masa itu.

Kepentingan Raffles tidak dapat dipisahkan dari kebijakan Inggris dalam melakukan okupasi terhadap Jawa. Inggris berkuasa di Jawa menggantikan kedudukan Belanda. Bagi para Direktur Perusahaan Inggris, prospek menyerang Jawa tidaklah menarik. Mereka tidak mau memperoleh kedaulatan atas Jawa, karena mereka sangat memandang rendah nilai ekonomis pulau tersebut. Pemerintah Inggris ingin melakukan ekspedisi itu karena alasan strategis, walaupun dapat mengklaim Jawa untuk tahta Britania, mereka tidak tertarik menduduki pulau Jawa secara permanen. Penyerangan Inggris ke Jawa dirancang sebagai ekspedisi hukuman untuk Belanda, menghancurkan benteng dan merampas senjata mereka.²⁶

Kepentingan Inggris tersebut nampaknya tidak sejalan dengan tindakan Gubernur Jenderal India, Lord Minto yang mempersiapkan ekspedisi penyerangan terhadap Belanda dengan mengumpulkan sejumlah orang yang memiliki minat terhadap sejarah, adat istiadat Indonesia dan bahasa Melayu, yaitu orang yang memiliki pandangan humaniter seperti dirinya. Salah satunya adalah Dr. John C. Leyden yang kemudian merekomendasikan Raffles untuk membantu rencana Lord Minto di

²⁵Istrinya, Olivia Marianne merintis Kebun Raya Bogor yang merupakan tempat penelitian tanaman di Indonesia, tetapi Raffles sendiri banyak mengangkut benda-benda bersejarah dari Indonesia guna melengkapi Museum Calcutta milik EIC. Lihat Supartono Widoyosiswoyo. 2006. *Sejarah Kebudayaan Indonesia (edisi revisi)*. Jakarta: Universitas Trisakti, hlm. 164-165.

²⁶Bernard H.M. Vlekke. 2008, hlm. 286-287.

Jawa. Pada akhir abad ke-18, ditandai kemunculan anti kolonial, yang telah memberi tempat bagi para intelektual Eropa Barat. Mereka menolak ekspansi Eropa berdasarkan alasan kemanusiaan dan ekonomi.

Raffles termasuk pihak yang cenderung progresif untuk menentang kebijakan Belanda di Jawa. Ia menghendaki orang Melayu memiliki wakil dalam parlemen. Perhatian Raffles terhadap kebudayaan Jawa terlihat ketika ia menyarankan dihidupkan kembali kekuasaan raja-raja Majapahit dengan tujuan membantu pengawasan terhadap bangsa melayu.²⁷ Namun, ternyata dibalik itu, ada kemungkinan Raffles memiliki kepentingan lain terkait dengan kekuasaannya saat itu. Seperti halnya, Bernard H.M. Vlekke (2008) yang menduga bahwa kebijakan Raffles tersebut dapat memudahkan Inggris berkuasa atas Hindia Belanda dan memperoleh dukungan dari raja-raja lokal.²⁸

2.2 Menjadi Urusan Negara

Sejumlah potensi yang ada dalam warisan budaya, mendorong Pemerintah Belanda membentuk komisi khusus pada tahun 1822. Pada saat itu, untuk pertama kalinya, pelestarian warisan budaya menjadi urusan lembaga pemerintah, meskipun kerja komisi tersebut sebenarnya tidak cukup efektif.

Setelah Raffles angkat kaki dari Pulau Jawa, upaya konservasi melalui berbagai penelitian arkeologi dan sejarah di Trowulan sempat terhambat pada periode 1825-1830.²⁹ Pada saat itu, berlangsung peristiwa

²⁷Menghidupkan kembali raja-raja Majapahit, berarti turut menghidupkan kembali simbol-simbol peradaban, dan upaya konservasi dengan mengembalikan sisa-sisa bangunan kuno seperti bentuk awalnya mendukung kepentingan Raffles saat itu.

²⁸Bernard H.M. Vlekke. 2008, hlm. 290.

²⁹Proses konservasi untuk melanjutkan upaya Raffles menjadi berhenti sementara dan periode ini telah menggambarkan suatu keterbatasan yang harus ditempuh oleh pemerintah kolonial ketika upaya-upaya konservasi sedang dijalankan. Konservasi yang dimaksud adalah upaya-upaya yang

besar di Jawa, ketika muncul pergerakan yang dipimpin oleh anak dari bangsawan Jawa menentang kebijakan kolonial. Pergerakan yang dikenal sebagai Perang Jawa (1825-1830) tersebut, telah mampu mencuri perhatian Belanda untuk segera mengerahkan segenap kekuatan dalam berbagai upaya penumpasan.

Setelah Perang Jawa berakhir, Jawa Timur menjadi daerah yang terbuka dan intensif bagi pertanian tebu. Industri gula telah muncul dan berkembang, termasuk di Mojokerto. Dampak yang nyata adalah perubahan lanskap dan demografi penduduk, karena banyak masyarakat dari daerah lain yang didatangkan oleh Belanda untuk menjadi pekerja perkebunan tebu dan industri gula.³⁰ Pembangunan industri gula di Mojokerto telah menjadi persoalan konservasi selanjutnya. Kota-kota Madiun, Kediri dan terutama Mojokerto bersama Sidoarjo, merupakan titik-titik pusat perkebunan gula. Di dalam Karesidenan Surabaya saja pada tahun 1930 sudah terdapat 36 pabrik gula. Di dalam sistim sentra produksi, Mojokerto mempunyai tempat yang khusus. Oleh karena letaknya di Delta Brantas yang rendah, keadaannya amat bagus untuk padi dan tebu. Meskipun tanahnya yang banyak mengandung air, namun pada pertengahan abad ke-19 dapat diselesaikan pembangunannya.³¹

Setelah Perang Jawa berakhir dan dibarengi dengan pertumbuhan industri di Pulau Jawa, Belanda memikirkan kembali persoalan kebudayaan Hindia Belanda sebagai urusan negara. Upaya kolonial Belanda menggali pemahaman yang komprehensif tentang Hindia Belanda secara umum dapat dihubungkan dengan iklim intelektual di Eropa saat itu. Sebagaimana para akademisi Eropa lainnya, akademisi

dimulai sejak penemuan awal, penggalian arkeologi yang dibantu oleh pembacaan naskah-naskah kuno, perlindungan dan upaya me-rekonstruksi peninggalan arkeologi.

³⁰Amrit Gomperts, Arnoud Haag and Peter Carey. *Rediscovering The Royal Capital of Majapahit*. The Newsletter, No.53, Spring 2010.

³¹Handinoto. *Kebijakan Politik Dan Ekonomi Pemerintah Kolonial Belanda Yang Berpengaruh Pada Morfologi (Bentuk Dan Struktur) Beberapa Kota Di Jawa*. Dimensi Teknik Arsitektur Vol. 32, No. 1, Juli 2004: 19 – 27.

Belanda merasa perlu untuk memahami masyarakat mereka sendiri maupun masyarakat asing, yang menjadikan periode itu sebagai era eksplorasi intelektual. Kebutuhan Belanda untuk memahami Hindia Belanda juga didorong oleh pengalaman bersentuhan dengan masyarakat lokal di masa lalu, khususnya keberhasilan mengalahkan Pangeran Diponegoro (dalam Perang Jawa 1825-1830) dan Tuanku Imam Bonjol (dalam Perang Padri, 1830-1837).³²

Pada tahun 1851, pemerintah belanda mendirikan *Koninklijk Instituut voor Taal-, Land-en Volkenkunde* (KITLV) bertempat di Leiden. Lembaga tersebut, telah memberi sumbangan penting dalam membangun pengetahuan tentang penduduk, kebudayaan, dan masyarakat Hindia Belanda melalui cabang ilmu bernama *Indologie* atau *Indonesainistiek* (studi tentang bahasa dan kebudayaan Indonesia). Sesuai dengan namanya, KITLV dikontrol kuat oleh Belanda. Peran negara terlihat dalam berbagai hal seperti upaya mendorong berbagai penelitian, menjembatani hubungan di antara para akademisi, dan menyelaraskan dinamika di dunia akademik dengan dinamika birokrasi kolonial Hindia Belanda.³³

Kebanyakan di antara para pencetus dan pengembang indologi adalah para birokrat. Mereka merupakan tulang punggung indologi, yang berasal dari berbagai tingkat pemerintahan. Kegiatan indologi semakin intensif sejak berlangsung politik etis pada akhir abad ke-19, sebab para birokrat diminta untuk melakukan observasi. Kendati politik etis tidak berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat pibumi sebagaimana yang diharapkan, intervensi negara terhadap kehidupan orang-orang pribumi tidak didasarkan pada kebutuhan mereka, melainkan pada apa yang pihak kolonial pikir baik bagi mereka.³⁴

³²Hanneman Samuel. 2010. *Genealogi Kekuasaan, Ilmu Sosial Indonesia: dari Kolonialisme Belanda hingga Modernisme Amerika*. Depok: Kepik Ungu, hlm. 12-13.

³³Hanneman Samuel. 2010, hlm. 12.

³⁴Hanneman Samuel. 2010, hlm. 16.

Awalnya KITLV didirikan melalui kolaborasi di antara para politisi di Belanda dengan para ilmuwan terkemuka dari negara tersebut. Tokoh-tokohnya antara lain, J.C. Baud, mantan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, T. Roorda, dan guru besar kajian Jawa di *Koninklijke Academie*. Tokoh-tokoh tersebut, tidak hanya memiliki pengetahuan luas tentang Hindia Belanda, namun juga mampu bekerja sama dalam pengembangan kajian Hindia Belanda bagi kepentingan kolonial secara luas. Pada konteks itu, kita dapat melihat bagaimana kepentingan kolonial melekat erat dengan hasrat intelektual.

Di samping untuk menjawab kebutuhan para intelektual untuk memahami Hindia Belanda, KITLV juga ditujukan guna memenuhi kebutuhan pemerintah kolonial dalam mengatur Hindia Belanda. Secara khusus, KITLV dirancang untuk menggantikan peran para misionaris yang sebelumnya berperan melakukan penyelidikan terhadap masyarakat jajahan. Negara memang diuntungkan dengan usaha para misionaris itu, namun mereka juga harus memikirkan keadaan politik sezaman. Pada saat itu, negara meyakini bahwa penggantian misionaris dengan lembaga penelitian sekuler dapat mengurangi konflik antara para misionaris Belanda dengan para pemimpin Muslim.

KITLV juga bertujuan menjembatani para akademisi yang memiliki kesamaan minat untuk mempelajari Hindia Belanda. Dialog di kalangan para ilmuwan terbangun melalui penerbitan *Bijdragen* (*Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volunde*). Kepentingan akademik, yang terwakili dalam terbitan *Bijdragen*, cenderung sejalan dengan kepentingan kolonial. Hubungan antara negara dengan dunia keilmuan begitu baik, sehingga citra tentang Hindia Belanda yang berkembang di masyarakat Belanda merupakan hasil rekonstruksi para ilmuwan. Akibatnya studi-studi yang kurang memiliki relevansi terhadap kebijakan negara ditinggalkan.

Pada tahun 1900, benda-benda warisan budaya Indonesia dipamerkan dalam pameran kolonial internasional di Paris dan mendapatkan perhatian luar biasa dari banyak negara Eropa. Sukses tersebut, mendorong pemerintah Belanda untuk menggiatkan lagi komisi yang

dulu pernah ada. Penelitian arkeologi kemudian menjadi agenda resmi kegiatan pemerintah Belanda, karena pada tahun 1901 dibentuklah *Commissie in Nederlandsch-Indie voor Oudheidkundig onderzoek op Java en Madura*. J.L.A. Brandes ditunjuk untuk menjadi ketua lembaga tersebut.

Komisi tersebut menangani kajian dan pemugaran candi di Jawa, dan memupuk minat terhadap berbagai arca dan benda perunggu dari zaman dulu. Komisi bekerja efektif hanya sampai tahun 1905. Kinerja mereka mengalami kemerosotan setelah ditinggal Brandes yang wafat pada tahun itu. Penggantinya, N.J. Krom, baru ditunjuk pada tahun 1910. Krom menganggap pengelolaan warisan budaya tidak mungkin hanya ditangani oleh sebuah komisi, karena begitu banyak dan ragam warisan budaya yang ada. Oleh karena itu, Krom mengusulkan agar 'komisi' tadi ditingkatkan menjadi 'jawatan' atau 'dinas' dengan diperkuat oleh para peneliti arkeologi dan sejarah yang handal.

Atas desakan Krom, pada tanggal 14 Juni 1913, Pemerintah Belanda mendirikan *Oudheidkundige Dienst in Nederlandsche-Indie* (Dinas Purbakala Hindia Belanda). Sejak saat itu, semua urusan yang berkaitan dengan warisan budaya di Hindia Belanda menjadi urusan negara. Di lingkungan Arkeologi, pelebagaan urusan warisan budaya disebut sebagai "*archaeology in the service of the state*" atau 'Arkeologi pengabdian negara'.³⁵ Terlebih lagi, setelah penetapan *Monumenten Ordonnantie no. 19 tahun 1931 Staatblad 238* (diperbaiki tahun 1934), kewenangan negara semakin besar. Pada dasarnya MO 1934 merupakan upaya pemerintah Belanda untuk menjamin keluasaan akses mereka terhadap warisan budaya di Hindia Belanda. Implikasinya adalah keluasaan dalam eksplorasi sumber daya budaya

³⁵Daud A. Tanudirjo. *Warisan Budaya Untuk Semua Arah Kebijakan Pengelolaan Warisan Budaya Indonesia Di Masa Mendatang*. Jurusan Arkeologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Makalah Disampaikan Dalam Kongres Kebudayaan V Di Bukittinggi, Sumatra Barat Pada Sumatera Barat 19 -23 Oktober 2003.

oleh para peneliti dan peminat benda cagar budaya yang mayoritas orang Eropa.

Seorang insinyur bernama Roger Verbeek (1845-1926) mengadakan kunjungan ke Trowulan dan menerbitkan teks tentang daftar gambar pada peta Wardenaar, laporannya terdapat dalam artikel *Oudheden van Majapahit in 1815 en 1887* dalam TBG XXXIII tahun 1889.³⁶ Penelitian berlanjut tidak hanya fokus pada peninggalan fisik, terutama setelah ditemukannya naskah *Negarakertagama* oleh Dr. Brandes di kompleks Istana Cakranegara Lombok pada tahun 1894.³⁷ Sumber tentang majapahit saat itu, tidak hanya didasarkan pada objek, namun juga teks. *Negarakertagama* adalah naskah Mpu Prapanca yang berisi berbagai informasi Kerajaan Majapahit. Kern menerjemahkan *Negarakertagama* sebagai seri artikel di *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* BKI antara tahun 1905-1914. Periode ini ditandai dengan munculnya berbagai interpretasi teks *Negarakertagama* oleh para ahli kolonial.

Pada tahun 1920-an, Maclaine Pont, seorang arsitek dari Belanda menghubungkan gambaran Kota Majapahit dalam *Negara- kertagama* dengan peninggalan arkeologi di Trowulan.³⁸ Maclaine Pont menguatkan hipotesis Raffles, dengan melakukan penggalian di hampir seluruh Trowulan pada tahun 1924-1926. Hasil penelitiannya menunjukkan keberadaan pondasi bangunan, saluran air, dan waduk. Ia berhasil membuat sketsa “kota” Majapahit di Trowulan. Maclaine Pont turut mendirikan lembaga bernama *Oudheidkundige Vereeniging Majapahit* (OVM) tahun 1924 yang bertujuan untuk memayungi kegiatan penelitian arkeologi di Trowulan. Sekitar dua tahun kemudian,

³⁶Lihat I Made Kusumajaya. tt. *Mengenal Kepurbakalaan Majapahit Di Daerah Trowulan*, Mojokerto: BPCB Jawa Timur.

³⁷Soewarsono, dkk. 2007. *Nasionalisme dalam Konteks Otonomi Daerah: Pemekaran dan Implikasinya*. LIPI Press, Jakarta, hlm. 39.

³⁸Naskah *Negarakertagama*, pupuh VIII-XII, merupakan sumber tertulis yang penting untuk mengetahui gambaran Kota Majapahit sekitar tahun 1350 M.

Maclaine Pont bekerjasama dengan RAA Kromodjojo Adinegoro merintis pendirian Museum Trowulan yang pertama.³⁹

Pendirian Museum Trowulan tersebut tidak dapat dilepaskan dari konteks perkembangan museum yang banyak didukung oleh pemerintah Belanda saat itu.⁴⁰ Sekitar tahun 1880-an, pemerintah Belanda memprakarsai kelahiran perkumpulan peminat tinggalkan sejarah dan purbakala amatir, yang bermuara pada terbentuknya museum. Setelah Perang Dunia I berakhir, gerakan museum kembali muncul dengan kelembagaan yang lebih sistematis, seperti; Museum Sonobudoyo di Yogya, Museum Radyopustoko di Surakarta, Museum Denpasar di Bali, Museum Kota Raja, Pematang Siantar, dan lainnya. Lembaga pelestari tersebut, yang menyimpan benda-benda tanpa pemilik dan memamerkannya ke mata sembarang orang, hanya memuaskan kelompok kecil yang tersentuh oleh gagasan-gagasan baru.⁴¹

Raffles, dan para ahli kolonial lainnya adalah seorang indolog dan orientalis, mengembangkan sebuah pengetahuan ilmiah yang ada di Hindia Belanda. Namun, tentu penjelasan sebelumnya telah memperlihatkan bahwa sebenarnya pengetahuan dan kekuasaan kolonial berhubungan erat. Seperti halnya, Edward Said (1978, 1994) menyatakan:

“...Merupakan cara yang sudah mengurat akar dalam berurusan dengan Timur – dengan cara membuat klaim-

³⁹Menjamurnya museum-museum di sepanjang wilayah Asia Tenggara sekarang ini menyiratkan adanya proses umum pewarisan politis yang tengah berlangsung. Hingga abad ke-19, para penguasa kolonial di Asia Tenggara mempertontonkan minat yang sangat tipis terhadap monumen-monumen antik peradaban-peradaban yang mereka taklukan di sana, lihat Benedict Anderson. 2001. *Imagined Communities*. Yogyakarta: Insist Press. hlm. 276.

⁴⁰lihat buku Soediman. 1965. *Pusaka Madjapahit di Trowulan*. Mojokerto, hlm. 12.

⁴¹Denys Lombard. 2005, hlm. 212-213.

klaim tentang mereka, melegitimasi prasangka tentang mereka, menggambarkan mereka, mengajari mereka, menguasai mereka, memerintah mereka, singkatnya orientalisme merupakan gaya barat untuk mendominasi, merestrukturasi, dan menguasai Timur... ”⁴²

Edward Said membedah relasi kekuasaan yang terdapat di balik orientalisme sebagai asumsi ideologis yang dipegang Eropa dalam mendefinisikan siapa mereka. Eropa menceritakan dirinya superior, berkebalikan dengan orang-orang dibelahan dunia lain yang mereka anggap inferior.

Kelekatan kuat antara indologi dengan kolonialisme Belanda terlihat dalam karakter kelembagaan indologi dan substansi pengetahuan. Dalam substansinya, indologi mencitrakan Hindia Belanda dan masyarakatnya sebagai sesuatu yang inferior, berkebalikan dengan Belanda dan pihak Eropa Barat pada umumnya. Citra tentang Timur tersebut, tak hanya dimiliki oleh para indolog, tetapi juga dianut oleh masyarakat Eropa Barat pada abad ke-18 hingga ke-20.

Belanda telah memosisikan diri sebagai penjaga tradisi warisan budaya di Trowulan. Menyiratkan bahwa mereka adalah pihak yang pantas untuk meneruskan peradaban tinggi tersebut. Berbagai upaya perlindungan, pemugaran, dan bentuk pelestarian lainnya seolah telah membangkitkan kembali peradaban Majapahit. Belanda juga melahirkan kembali Trowulan sebagai tempat pemujaan ‘baru’. Beberapa situs seperti Candi Tikus, Candi Brahu, dan banyak lainnya menjadi tempat spritual oleh sebagian masyarakat hingga saat ini.

2.3 Gagasan Nasionalisme

Keberadaan OVM di Trowulan sebagai lembaga penelitian sekaligus tempat koleksi temuan sisa peninggalan Majapahit, telah memperkenalkan lebih luas warisan budaya tersebut kepada masyarakat pribumi,

⁴²Hanneman Samuel. 2010, hlm. 20, untuk selengkapnya lihat Edward Said. 1977. *Orientalism*. London: Penguin.

terutama tokoh nasionalis. Mereka yang sedang mencari bentuk ideal negara-bangsa, menggunakan simbol kebesaran Majapahit sebagai klaim atas kesatuan wilayah Indonesia.⁴³

Pada tahun 1934, Yamin membangun sebuah konstruksi atas teks *Negarakertagama* sebagai justifikasi gagasan nasionalisme ditengah-tengah kesibukan para pemuda saat itu yang sedang mencari bentuk negara-bangsa. Gagasan nasionalisme Yamin tercermin dalam sebuah novel berjudul *Ken Arok dan Ken Dedes*, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah 'The Modern Majapahit'.⁴⁴ Begitu pula dengan Sutan Sjahrir (1909-1966), yang secara tegas pernah menunjuk Sriwijaya dan Majapahit sebagai pelopor sejarah kesatuan Indonesia.⁴⁵

Yamin dan Sjahrir bukan tokoh nasionalis pertama yang memasukkan Majapahit dalam sebuah gagasan nasionalisme. Sebelum Muhammad Yamin, telah ada kelompok yang menggunakan Majapahit sebagai tanda pembeda antara Jawa dengan daerah lain di Hindia Belanda. Kelompok yang memiliki tokoh utama bernama Soetatmo Soeriokoesoemo itu, dapat diidentifikasi sebagai kelompok yang mengusung nasionalisme Jawa.

Perbedaan Yamin dengan para nasionalis Jawa tersebut, bukan hanya ketika Yamin menempatkan Majapahit dalam konteks Indonesia, namun juga karena ia menafsirkan Majapahit pada teks *Negarakertagama*. Melalui naskah tersebut, Yamin menerjemahkan

⁴³ Amrit Gomperts, Arnoud Haag and Peter Carey. *Rediscovering The Royal Capital of Majapahit*. The Newsletter, No.53, Spring 2010, lihat juga Daud A. Tanudirjo. tt. *Warisan Budaya Majapahit dalam Perspektif Manajemen Sumber Daya Arkeologi*, hlm. 3 (unpublished)

⁴⁴ Soewarsono, dkk. 2007. *Nasionalisme Indonesia dalam Konteks Otonomi Daerah*. LIPI Press, Jakarta, hlm. 85. Soewarsono mencuplik Nidhi Aeusrivongse, "Fiction as History: A Study of Pre-War Indonesian Novels and Novelists (1920-1949)", Ph.D dissertation, University of Michifan, 1976, hlm. 306.

⁴⁵ Amrit Gomperts, Arnoud Haag and Peter Carey. *Rediscovering The Royal Capital of Majapahit*. The Newsletter, No.53, Spring 2010.

kekuasaan wilayah Majapahit sebagai batas-batas Indonesia. Menggunakan kata Nusantara – sebuah istilah dalam *Negarakertagama* – Yamin menunjukkan bentangan Indonesia terdiri dari “*eight groups of islands...the Malay peninsula, the islands of Sumatra, of Kalimantan (Borneo), of Java...the group now know as ...Southeastern Islands, the islands of Sulawesi, the groups of the Moluccas and the territory of West Irian.*”⁴⁶

Gagasan Yamin sendiri berbeda dengan nasionalisme Indonesianya Soekarno. Soekarno melihat Indonesia identik dengan Hindia-Belanda, bahwa wilayah Indonesia setelah merdeka adalah bekas wilayah Hindia-Belanda. Gagasan Soekarno ini bersifat “*colonial nationalism*”. Berbeda dengan Muhammad Yamin yang melihat Indonesia adalah kata lain dari Nusantara. Gagasan Muhammad Yamin ini bersifat “*something inherited from the ancient past*”, di mana bekas wilayah Majapahit adalah wilayah Republik Indonesia. Walaupun, dalam sidang BPUPKI 1 Juni 1945, Soekarno mengatakan bahwa Indonesia mengalami *nationale staat* dua kali (Sriwijaya dan Majapahit), namun Soekarno tidak mengkontekskan negara yang akan didirikan pada kedua kerajaan tersebut.⁴⁷

Ketika muncul persoalan Irian Barat sejak tahun 1950, gagasan Yamin tentang wilayah Nusantara mampu mempengaruhi jalan pemikiran Soekarno, yang pada akhirnya presiden pertama itu tetap menghendaki Irian Barat menjadi bagian dari Republik Indonesia.⁴⁸ Tidak berhenti sampai di Irian Barat, upaya untuk mendaku Kalimantan Utara dan Singapura menjadi bagian dari RI adalah pengaruh dari luas wilayah Majapahit. Pada zaman Orde Baru, gagasan nasionalisme “Majapahit” Yamin kembali terwarisi dalam kasus integrasi Timor Portugis ke dalam negara Republik Indonesia.

Sangat menarik bahwa arsitek utama dari gagasan nasionalisme berbasis Jawa mengenai masa silam Indonesia, bukan seorang Jawa,

⁴⁶Soewarsono, dkk. 2008, hlm. 38-40.

⁴⁷Soewarsono, dkk. 2008, hlm. 45.

⁴⁸Soewarsono, dkk. 2007, hlm. 76-77.

tetapi Yamin yang berasal dari Sumatera Barat. Menurut pandangannya, peta Indonesia sudah tersusun pada zaman kejayaan Majapahit dengan pemimpin militer yang dapat diteladani dan cocok dengan semangat perjuangan revolusi. Namun, tidak semua orang setuju dengan pandangan tersebut. Kaum intelektual, seperti Muhammad Hatta, takdir Alisjahbana, dan para pemuka politik di luar Jawa menentang “imperialisme Majapahit Baru” yang terpusat di Jawa.

Hatta dan Tan Malaka mengemukakan penekanan pada warisan feodal dari kerajaan lama dan periode kolonial.⁴⁹ Sebagian kalangan menganggap masa depan negara Indonesia dari segi militer versi Majapahit didasarkan pada tafsir yang salah atas *Negarakertagama*, yakni Majapahit menguasai seluruh kepulauan, termasuk Timor Timur, sebagai semacam kediklatatoran militer. Meskipun Supomo sudah dari dulu menunjukkan bahwa mitos ini menyesatkan, versi ini masih tetap dipertahankan di Indonesia pasca-Soeharto.⁵⁰

Persepsi mayoritas bangsa Indonesia terhadap kebesaran Majapahit terus terpelihara selama Orde Baru. Ungkapan “Bhinneka Tunggal Ika” diangkat menjadi semboyan bangsa Indonesia dalam menghargai keragaman budaya. “Sumpah Palapa” dijadikan nama satelit komunikasi, “Majapahit”, “Gajah Mada”, dan “Hayam Wuruk” diabadikan menjadi nama tempat dan jalan di berbagai provinsi di Indonesia.

⁴⁹Henk Schulte Nordholt, Bambang Purwanto, dan Ratna Hapsari. 2008. “Memikir Ulang Historiografi Indonesia” dalam Henk Schulte Nordholt, Bambang Purwanto, dan Ratna Hapsari (ed). *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, KITLV – Jakarta; Denpasar: Pustaka Larasan, hlm. 8-10. Lihat juga Restu Gunawan 2005. *Muhammad Yamin dan cita-cita persatuan*. Yogyakarta: Ombak.

⁵⁰Adrian Vickers. 2008. “Mengapa tahun 1950-an penting bagi Kajian Indonesia” dalam dalam Henk Schulte Nordholt, Bambang Purwanto, dan Ratna Hapsari (ed). *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, KITLV – Jakarta; Denpasar: Pustaka Larasan, hlm. 71.

Pertanyaan menarik adalah mengapa Majapahit begitu istimewa di hati bangsa Indonesia. Padahal secara jumlah maupun kualitas candi-candi Majapahit tidak dapat menyamai candi-candi Masa Mataram. Begitu pula ketika dibandingkan dengan Sriwijaya yang pernah menjadi pusat pendidikan pada zamannya, hingga saat ini belum ditemukan bukti Kerajaan Majapahit pernah menjadi pusat pendidikan seperti itu. Majapahit memang memiliki struktur pemerintahan yang cukup kompleks dengan sistem birokrasi dan tata hukum yang mapan dan mungkin saja benar wilayah Majapahit termasuk yang terluas di antara wilayah kerajaan lain di Indonesia. Namun, gambaran luas wilayah itu lebih banyak disandarkan pada tafsiran beberapa pupuh *Negara-kertagama* dan *Pararaton*.⁵¹

Fenomena penggunaan simbol Majapahit diatas dapat menjadi alasan apabila “kejayaan Majapahit” bukan terjadi pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, namun justru menjelang dan setelah kemerdekaan Indonesia. Karena saat itu, Majapahit menjadi begitu dikenal di kalangan para pemimpin bangsa dan masyarakat luas, bahkan dapat menjadi ilham untuk menyusun berbagai aspek kenegaraan Indonesia.⁵² Dalam kasus Majapahit ini, lebih tepat dikatakan ‘arkeologi adalah politik’.⁵³

⁵¹Daud Tanudirdjo. tt. *Warisan Budaya Majapahit dalam Perspektif Manajemen Sumberdaya Arkeologi*. (unpublished), hlm. 1.

⁵²Daud Tanudirdjo. tt. *Warisan Budaya Majapahit dalam Perspektif Manajemen Sumberdaya Arkeologi*. (unpublished), hlm. 3.

⁵³Amrit Gomperts, Arnoud Haag and Peter Carey. *Rediscovering The Royal Capital of Majapahit*. The Newsletter, No.53, Spring 2010.

BAB 3

POLITIK EKONOMI PELESTARIAN

Sejalan dengan konstruksi kebesaran Majapahit pada era Orde Baru, berbagai upaya pelestarian dalam bentuk preservasi berlangsung secara lebih sistematis. Pelestarian warisan budaya di Trowulan telah melibatkan banyak ahli Indonesia, yang sebelumnya telah menempuh pendidikan di luar negeri. Pada era tersebut, juga ditandai lahirnya aturan hukum baru, yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Undang-Undang ini merupakan pengganti MO 1934 yang menjadi aturan pelestarian pada masa kolonial.⁵⁴

Pada era Orde Baru dan Reformasi, para akademisi memegang peran besar dalam mempengaruhi kebijakan pelestarian di Trowulan. Salah satu produk awal kebijakan pelestarian adalah Rencana Induk Arkeologi (RIA) Bekas Kota Kerajaan Majapahit Trowulan tahun 1986. Saat itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai perwakilan dari pemerintah menjadi pengampu dalam proses perumusan *masterplan* tersebut.

RIA Bekas Kota Kerajaan Majapahit menjadi acuan dalam pelestarian Trowulan saat itu. *Masterplan* itu, juga diharapkan dapat membantu memecahkan persoalan di lingkungan situs. Persoalan yang dimaksud terkait dengan indikasi pengrusakan oleh masyarakat di lahan Trowulan, yang didalamnya masih banyak mengandung sisa-sisa peninggalan Majapahit.

⁵⁴Menurut beberapa kalangan, aturan pengganti tersebut lebih seperti MO 1934 versi bahasa Indonesia. Anggapan itu muncul ketika substansi UU No. 5 Tahun 1992 tidak jauh berbeda dengan pendahulunya, seperti aturan yang menempatkan negara sebagai pihak yang paling berwenang dalam pelestarian warisan budaya.

Saat itu, masyarakat belum banyak dilibatkan dalam program pelestarian. Kondisi tersebut merupakan implikasi dari cara pandang yang menempatkan mereka sebagai pihak yang tidak mengerti apa-apa tentang warisan budaya. Bahkan cenderung sebagai pihak yang bersalah atas pengrusakan. Paradigma itu berkembang sejalan dengan keberlangsungan program RIA Bekas Kota Kerajaan Majapahit, yang hanya melihat pelestarian dalam konteks perlindungan benda dan bangunan. Berbagai situs di Trowulan memang berhasil dipugar, namun perusakan tetap berlangsung. Kondisi itu merupakan konsekuensi cara pandang yang tidak memperhatikan keberadaan masyarakat.

Pada tahun 2008, pemerintah mencanangkan program pengembangan Trowulan bernama Pusat Informasi Majapahit (PIM). Awalnya program ditujukan untuk mengembangkan Trowulan sebagai ruang budaya sekaligus destinasi wisata unggulan. Namun, dalam proses pembangunan, PIM malah disinyalir ikut merusak situs di lokasi pendirian. Implikasinya begitu besar, karena masyarakat luas telah menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab penuh. Program yang diampu oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata itu, seharusnya mengusung etika pelestarian, bukan sebaliknya.

Pemerintah telah gagal mengusung politik kebudayaan di Trowulan, karena pembangunan PIM malah menyiratkan sebuah kepentingan yang cenderung politis dan ekonomi. Dapat saja, ini merupakan program yang sebetulnya disiapkan secara matang, namun dimanfaatkan oleh oknum di dalam pemerintah sendiri untuk memperoleh atau ikut merasakan keuntungan dibalik program bernilai miliaran rupiah tersebut.

Dampak PIM kedepannya begitu kompleks. Tidak hanya menimbulkan kesenjangan yang semakin besar antara pemerintah dengan masyarakat, namun turut melahirkan berbagai kelompok baru yang mengklaim ikut bertanggungjawab dalam pelestarian Trowulan. Berbagai kelompok, membangun klaim identitas, relasi, gerakan-gerakan sosial politik, agar

dapat merasakan sumber daya di Trowulan. Masing-masing pihak berkontestasi sejalan dengan isu yang semakin mengglobal, ketika lembaga internasional ikut mempengaruhi situasi yang tengah berlangsung. Berbagai isu internasional yang ada, seperti HAM dan kesejahteraan masyarakat, bahwa warisan budaya bukan hanya milik negara, namun juga menyangkut hak warga negara dan masyarakat dunia.

3.1 Upaya Mengatur Kembali

Pada masa pendudukan Jepang (1942), upaya pelestarian warisan budaya di Trowulan telah dibatasi. Museum yang dijadikan sebagai pusat informasi di Trowulan ditutup untuk umum oleh pemerintah Jepang, karena Maclaine Pont saat itu dijadikan tawanan Jepang. Pada Orde baru (1965 – 1998), pengaturan warisan budaya kembali dijalankan. Diawali oleh lembaga pemerintah dibawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, juga ikut terlibat LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional), yang pernah membuat foto udara di Trowulan pada tahun 1970-an.

Selain LAPAN, Bakosurtanal (Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional) juga pernah melakukan penelitian di Trowulan bekerjasama dengan para akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Banyak lainnya penelitian yang dilakukan oleh para ahli, baik dilakukan atas minat sendiri maupun bantuan dari lembaga donor. Hasil-hasil penelitian yang ada saat itu, lebih memperkuat data-data yang sudah ada sebelumnya dan mendukung hipotesis keberadaan Trowulan adalah bekas kota Majapahit.

Pada tahun 1991 sampai 1993, Pusat Arkeologi Nasional yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan kerjasama dengan *Ford Foundation* mengadakan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Arkeologi Indonesia (*Indonesian Field School of Archeology / IFSA*). Kegiatan tersebut melibatkan kurang lebih 100 instansi bidang kebudayaan. Program tersebut berlangsung tidak lama

setelah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan RIA Bekas Kota Kerajaan Majapahit Trowulan pada tahun 1986.

Program-program pelestarian pemerintah periode 1980-1990, lebih diarahkan pada peninggalan fisik bangunan. Marieke Bloembergen menyebut istilah ini sebagai '*anastylosis*'.⁵⁵ Sifatnya sama dengan konsep preservasi, yaitu melindungi satu bangunan tertentu dengan kecenderungan kurang mepedulikan masyarakat dan lingkungan sekitar. Konsep ini sejalan dengan konteks 'situs' yang digunakan saat itu, di mana pelestarian dibatasi pada perlindungan bangunan dan sedikit lahan di sekitarnya. Kurang dilibatkannya masyarakat sekitar, membawa implikasi pada ketidaktahuan mereka terhadap makna 'pelestarian' dan 'situs'.

Lahan yang berada di sekitar situs adalah lahan milik mereka, karena tidak dibeli oleh pemerintah. Mereka merasa berhak untuk memanfaatkan lahan tersebut, sehingga aktivitas penggalian lahan oleh masyarakat tetap berlangsung sejalan dengan preservasi oleh pemerintah. Kondisi itu berlangsung cukup lama, dan nampaknya pemerintah semakin sulit untuk mengatasi situasi tersebut karena berbagai keterbatasan.

Pertama, terkait dengan anggaran pemerintah yang belum mampu membebaskan semua lahan di Trowulan. Kiranya, anggaran pemerintah yang tidak terlalu besar dapat disiasati melalui kekuasaan Orde Baru, yang memiliki kekuatan besar untuk mendisplinkan masyarakat.

⁵⁵ '*Anastylosis*' pertama kali dikembangkan di Yunani, sebuah proses dalam prinsip rekonstruksi yang hanya dimungkinkan dengan menggunakan bahan-bahan asli. Dinas Purbakala pada zaman Belanda –yang sebelumnya tidak pernah menggunakan istilah ini- mengembangkan metod ini di Asia dengan percobaan dan kekeliruan, untuk pertama kali sistem ini diterapkan pada Candi Panataran tahun 1917–1918. Lihat Marieke Blombergen dan Martijn Eickhoff. *Conserving The Past, Mobilizing The Indonesian Future: Archaeological Sites, Regime Change and Haritage Politics in Indonesia in the 1950s*. Bijdragen tot de Taal-, Land-en Volkenkunde, Vol. 167, No. 4 (2011), hlm. 405 – 436.

Artinya, apabila itu digunakan, maka dapat memudahkan langkah pemerintah membebaskan lahan di Trowulan. Tentunya, tetap mengutamakan kepentingan masyarakat. *Kedua*, konsekuensi RIA Bekas Kota Kerajaan Majapahit sebagai pedoman pelestarian yang mengedepankan konsep 'situs' dan bukan 'kawasan'. Padahal, pada periode yang sama, konsep 'kawasan' sudah ada sejak pemerintah bekerjasama dengan lembaga internasional untuk melestarikan Borobudur.⁵⁶

Pada subbab berikutnya menjelaskan RIA Bekas Kota Kerajaan Majapahit sebagai program pelestarian pemerintah yang membawa implikasi besar terhadap berbagai program pelestarian di Trowulan sesudahnya. Program RIA Bekas Kota Kerajaan Majapahit lebih bersifat *object oriented* daripada *function oriented*. Dominannya para arkeolog yang terlibat dalam *masterplan* tersebut, turut mempengaruhi konsep pelestarian saat itu. Konsep tersebut juga sejalan dengan aturan hukum yang berlaku saat itu, yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya yang menempatkan benda sebagai objek pelestarian.

3.2 Rencana Induk Arkeologi

RIA Bekas Kota Kerajaan Majapahit disusun tahun 1983 hingga 1985 oleh pemerintah yang diwakili Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebanyak 64 ahli arkeologi dari birokrat dan perguruan tinggi terlibat dalam penyusunan *masterplan* tersebut. Pembuatan RIA Bekas Kota Kerajaan Majapahit cenderung sebagai bentuk represif pemerintah atas berbagai kondisi yang berlangsung di Trowulan saat itu, diantaranya adalah pengrusakan peninggalan purbakala dan situs di Trowulan, baik yang diakibatkan oleh faktor alam, maupun oleh aktivitas manusia.

⁵⁶Pada tahun 1973, pemerintah Indonesia dibantu oleh UNESCO dan melibatkan JICA telah membuat *masterplan* dari Proyek Taman Purbakala Nasional (*National Archaeological Project*).

Mengacu pada naskah dokumen RIA Bekas Kota Kerajaan Majapahit, tujuan dari *masterplan* itu menyiratkan suatu program yang tidak hanya bersifat arkeologis. Namun, juga mengandung wawasan luas berkenaan dengan usaha melestarikan, memasyarakatkan, dan memanfaatkan peninggalan purbakala untuk kepentingan nasional secara lintas sektoral dan berkesinambungan.⁵⁷ Bahkan selain pemanfaatan bagi sektor pendidikan dan penelitian, RIA Bekas Kota Kerajaan Majapahit juga memberi kemungkinan seluas-luasnya bagi usaha pengembangan pariwisata.

Tujuan untuk pariwisata juga dipertegas dalam kata pengantar RIA Bekas Kota Kerajaan Majapahit oleh Direktur Jenderal Kebudayaan saat itu.

*"... Karena keadaan yang rumit, maka pemugaran yang telah dilaksanakan serta rencan guna kelanjutan bukan bertujuan untuk mengembalikan bentuk fisik, tetapi untuk melestarikan berbagai jenis peninggalan sejauh masih mungkin dipugar serta mengamankannya sebagai tujuan pariwisata. Dengan demikian, persyaratan bahwa setiap pemugaran mesti bisa difungsikan untuk kepentingan masyarakat umum sekaligus terpenuhi."*⁵⁸

Selama kajian RIA Bekas Kota Kerajaan Majapahit berlangsung, para peneliti berhadapan dengan kenyataan sosial yang memperlihatkan adanya pengrusakan oleh sebagian masyarakat di sekitar lahan penelitian mereka. Seperti pernyataan ketua tim dalam kata pengantarnya di dokumen *masterplan* tersebut:

⁵⁷Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1986. *Rencana Induk Arkeologi, Bekas Kota Kerajaan Majapahit Trowulan*. Proyek Pemugaran dan Pemeliharaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Jakarta, hlm. 2.

⁵⁸Kata pengantar RIA Bekas Kota Kerajaan Majapahit oleh Direktur Jenderal Kebudayaan, dalam Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1986. *Rencana Induk Arkeologi, Bekas Kota Kerajaan Majapahit Trowulan*. Proyek Pemugaran dan Pemeliharaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Jakarta.

“Pengumpulan data di lapangan beserta pengkajiannya telah dilakukan anggota tim dengan penuh kewaspadaan dalam suasana yang seringkali meresahkan, karena bersamaan dengan studi itu, di Trowulan berlangsung pula proses perusakan situs dan bangunan purbakala oleh sebagian penduduk yang sedang bergelut mengatasi pemenuhan kebutuhan hidupnya.”⁵⁹

Proses pemugaran dalam RIA berorientasi pada sistem sel, yaitu melakukan pemilihan wilayah-wilayah tertentu yang dianggap penting untuk dikelola. Sel tidak lain merupakan bangunan-bangunan kuno beserta situs lingkungannya, yang telah dipertimbangkan dianggap potensial untuk segera dikembangkan. Sel-sel pengembangan yang letaknya berdekatan harus pula diberi kemungkinan seluasnya untuk dikelompokkan dan dikembangkan secara terpadu di dalam satu satuan ruang pengelolaan yang lebih besar.⁶⁰

Pada akhirnya, pemerintah mampu melakukan pemugaran berbagai bangunan kuno di Trowulan, dan mengelompokkannya ke dalam tujuh sektor, sebagai berikut:

No.	Nama Sektor	Nama Situs	Jumlah
1	Wilayah A	Kolam Segaran, Candi Minak Jinggo, Makam Putri Campa, dan Kubur Panjang	4
2	Wilayah B	Candi Tikus dan Gapura Bajang Ratu	2
3	Wilayah C	Pemukiman Sentonorejo, Pemukiman Nglinguk, Candi Kedaton, makam Troloyo, Kubur Panggung	5
4	Wilayah D	Candi Brahu dan Candi Gentong	2
5	Wilayah E	Gapura Waringin Lawang	1

⁵⁹Kata pengantar Ketua Tim, dalam Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1986. *Rencana Induk Arkeologi, Bekas Kota Kerajaan Majapahit Trowulan*. Proyek Pemugaran dan Pemeliharaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Jakarta.

⁶⁰Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1986. *Rencana Induk Arkeologi, Bekas Kota Kerajaan Majapahit Trowulan*, hlm, 28.

No.	Nama Sektor	Nama Situs	Jumlah
6	Wilayah F	Candi Siti Hinggil	1
7	Wilayah G	Candi Bhre Kahuripan dan sekitarnya	1

Sumber: Depdikbud, 1986. *Rencana Induk Arkeologi Bekas Kota Kerajaan Majapahit Trowulan* (dengan modifikasi).

Namun, perlindungan terhadap lingkungan sektor-sektor wilayah tersebut tidak berjalan efektif, karena masyarakat masih memiliki hak atas lahan di sekitar situs. Seolah menyiratkan bahwa program pemerintah melalui RIA Bekas Kota Kerajaan Majapahit telah melupakan fakta, bahwa Trowulan terdiri dari berbagai situs yang menyebar di antara lahan-lahan dan pemukiman penduduk. Pada akhirnya, pemugaran setiap sel memang tampak rapi dan terawat, namun di sekitarnya terus berlangsung pemanfaatan lahan oleh masyarakat yang sebagian besar disinyalir ikut merusak sisa-sisa peninggalan Majapahit.

Upaya untuk menjadikan Trowulan sebagai destinasi wisata budaya sesuai dengan tujuan RIA Bekas Kota Kerajaan Majapahit, belum terlaksana saat itu. Koordinasi antara pemerintah pusat yang diwakili Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan pemerintah daerah, baru nampak tahun 1999, ketika Dinas Pariwisata Kabupaten Mojokerto mendapatkan izin dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membuat Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) di Trowulan.⁶¹

Dinas Pariwisata Kabupaten Mojokerto mengumpulkan beberapa akademisi dari perguruan tinggi dari Univeritas Airlangga Surabaya dan Universitas Brawijaya Malang untuk membantu dalam merumuskan konsep *masterplan* pengembangan pariwisata di Trowulan. Pada rancangannya, RIPP dibuat untuk jangka panjang hingga 2014-2015. Namun, sepertinya program ini tidak dikawal

⁶¹ Ilhami. *Pengembangan Kawasan Pariwisata Majapahit Trowulan-Mojokerto*, bahan dalam Rapat Evaluasi Hasil Pemugaran Bekas Kota Kerajaan Majapahit, Jombang, 25-26 Februari 2000. Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Mojokerto, 2000.

dengan baik, pergantian jabatan Gubernur, Kepala Dinas, dan aparat lainnya merubah program-program lama menjadi program baru yang mendukung kepentingan pejabat yang sedang berkuasa.

Terfokusnya pada upaya perlindungan situs dan pengembangan wisata budaya di Trowulan –padahal konsep kesinambungan antara perlindungan dan pariwisata masih diperdebatkan– membawa konsekuensi lain, yaitu kurang tersentuhnya persoalan kepemilikan lahan masyarakat dan batas kawasan. Kajian yang bertujuan untuk mengevaluasi terhadap RIA Bekas Kota Kerajaan Majapahit juga tidak banyak dilakukan, sehingga alur berpikir ‘sel’ tetap digunakan.

Ketika konsep tata ruang dan kawasan mulai dikenal, dan telah disadari oleh pemerintah pentingnya sebuah batas dalam kawasan, berbagai sisa peninggalan Majapahit telah tergerus, rusak, dan sebagian telah menghiasi lemari-lemari koleksi para kolektor. Ironis, hingga saat ini, benda-benda kuno yang ditemukan di Trowulan telah berubah fungsi menjadi komoditas perdagangan ilegal benda antik.

Jika memang RIA Bekas Kota Kerajaan Majapahit dapat menjadi pedoman untuk menetapkan Trowulan sebagai kawasan cagar budaya dan solusi persoalan yang terus berlangsung saat ini, sudah seharusnya pemerintah serius mengevaluasi, memperbaiki, dan menjalankan *masterplan* tersebut. Termasuk mencari solusi atas kekurangan pendekatan ‘sel’ yang lebih berorientasi pada preservasi bangunan dan situs, walaupun istilah kawasan belum dikenal saat itu.

Namun terkait itu, kita juga bisa membandingkan upaya pelestarian di Trowulan dengan upaya pengelolaan di Candi Borobudur. Sebelum tahun 1986 di mana proyek RIA bekas Kota Kerajaan Majapahit selesai, tepatnya pada tahun 1973, JICA dan UNESCO telah membantu pemerintah Indonesia membuat *masterplan* untuk Proyek Taman Purbakala Nasional di Borobudur. Di dalam *masterplan* tersebut, telah menyiratkan adanya suatu konsep keruangan yang bukan hanya

memperhatikan bangunan candi, namun juga lingkungan sekitar, yang kemudian ditetapkan zonasi kawasan Borobudur.⁶²

Munculnya persoalan yang mendera Trowulan akhir-akhir ini, membuat pemerintah dan para ahli sibuk mencari akar permasalahan. Salah satu solusi yang sering menjadi bahan pembahasan dalam berbagai pertemuan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga penelitian, universitas, maupun tingkat LSM, adalah penetapan Trowulan sebagai kawasan cagar budaya. Dapat dibuktikan saat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menanggapi petisi yang diajukan oleh pihak-pihak yang menolak pendirian pabrik baja di Trowulan tahun 2013. Dalam salah satu tanggapannya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa:

“Rekomendasi dari Tim Ahli Nasional Cagar Budaya sebagai bagian dari proses penetapan Trowulan sebagai Kawasan Cagar Budaya Nasional telah disusun (amanat dari UU RI No 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya). Rekomendasi tersebut akan dijadikan dasar oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk menetapkan Trowulan sebagai Kawasan Cagar Budaya Nasional dalam waktu dekat.”⁶³

Sejalan dengan pernyataan Prof. Mundardjito yang dulu merupakan ketua tim RIA Bekas Kota Kerajaan Majapahit, dalam sebuah kesempatan di media tahun 2013, Prof. Mundardijto menjelaskan bahwa *masterplan* Bekas Kota Kerajaan Majapahit bisa menjadi acuan untuk menetapkan Trowulan sebagai kawasan cagar budaya. Hanya saat rencana induk itu dibuat, Indonesia belum mengenal istilah

⁶²Daud Aris Tanudirdjo. *Cultural Landscape Heritage Management in Indonesia An Archaeological Perspective*. Makalah dalam First International Symposium on Borobudur Cultural Landscape Heritage 2007, di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 20 April 2007.

⁶³Jawaban atas petisi yang dibuat oleh organisasi masyarakat peduli Majapahit 23 Juli 2013.

kawasan cagar budaya, tetapi baru sebatas perlindungan terhadap benda cagar budaya.⁶⁴

Permasalahan yang muncul akibat pendekatan 'situs' juga dialami oleh salah satu birokrat dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ketika ditunjuk sebagai salah satu pimpinan yang mengurus persoalan warisan budaya, ia menyatakan telah menemui persoalan dengan situs-situs besar yang tidak dapat dilindungi secara luas. Walaupun, saat itu persepsi para ahli telah menggunakan konsep artefak-bangunan-kompleks, tetapi tetap saja konsentrasi ada di situs.⁶⁵

3.3 Masyarakat Trowulan

Masyarakat Trowulan mayoritas bekerja sebagai petani. Namun, keadaan pertanian yang sering mengalami keterpurukan karena meningkatnya harga pupuk, menyebabkan banyak dari mereka yang mencari nafkah tambahan melalui berbagai bentuk pekerjaan lain. Sekitar tahun 1950-1970, banyak masyarakat melakukan pencarian emas di lahan-lahan milik mereka. Emas tersebut diduga kuat adalah peninggalan Majapahit yang masih banyak terpendam di dalam tanah. Pada periode itu, banyak emas yang berhasil ditemukan oleh masyarakat, baik dalam bentuk serpihan maupun perhiasan. Kegiatan pencarian emas telah berlangsung lama, hingga dianggap habis karena sudah sulit untuk ditemukan.⁶⁶

Masyarakat lantas beralih menjadi pencari bata merah kuno, yang banyak terdapat di bangunan-bangunan peninggalan Majapahit. Periode 1970-an, dianggap sebagai era kerusakan lingkungan arkeologis di Trowulan. Pada periode tersebut, banyak temuan bata merah dari masa

⁶⁴30 Tahun Status Trowulan Tidak Jelas. [http://sains.kompas.com/read/2013/07/25/0747585/30 Tahun Status Trowulan Tidak Jelas](http://sains.kompas.com/read/2013/07/25/0747585/30_Tahun_Status_Trowulan_Tidak_Jelas). Didownload pada tanggal 26 September 2013, pukul. 11.25.

⁶⁵Wawancara NJ (inisial) pada tanggal 20 November 2013.

⁶⁶Sugih Biantoro dan Endang Turmudi. 2012. *Kajian Ekonomi Politik Pelestarian Tinggalan Majapahit di Kawasan Trowulan*. Jakarta: PT. Gading Prima dan LIPI, hlm. 51.

Majapahit yang dimanfaatkan oleh penduduk setempat atau diangkut ke kota-kota sekitarnya untuk diolah sebagai 'semen merah' atau dipasang pada konstruksi dinding baru.⁶⁷ Sekitar tahun 1970-1980, bata merah jarang ditemukan oleh masyarakat. Masyarakat Trowulan yang sebagian besar adalah petani, memanfaatkan tanah yang mereka gali untuk mencari lapisan tanah subur sebagai bahan untuk membuat batu bata.

Politik ekonomi Belanda yang memberikan keleluasan bagi pihak swasta untuk menanamkan modal di bidang pertanian, telah mendorong didirikannya beberapa pabrik gula di sekitar Trowulan, yaitu Mojokerto dan Jombang tahun 1830. Kebijakan politik tanam paksa pada era Belanda, menyebabkan banyak lahan sawah berubah menjadi kebun tebu. Sejalan dengan itu, politik tanam paksa dan kebijakan Orde Baru yang mewajibkan target luas lahan produksi tebu terhadap pemerintah daerah, berdampak kondisi struktur kimiawi tanah yang mengeras, karena berbagai macam variasi pupuk untuk mendongkrak produktifitas.⁶⁸ Penggalan untuk mencari lapisan tanah subur telah menghadirkan pekerjaan baru bagi mereka sebagai pembuat batu bata, yang ketika itu dapat diterima di pasaran.

Pada perkembangnya, banyak masyarakat di Trowulan yang beralih menjadi perajin bata, dengan mempertimbangkan kemunculan linggan atau tempat pembuatan bata yang berjumlah sekitar 2.400 buah sampai pertengahan tahun 1990. Bahkan pernah mencapai 4000 linggan yang menyebar di seluruh Trowulan.⁶⁹

⁶⁷Perdesaan-Lahan-Budaya di Hadapan Industri Konstruksi Perkotaan. <http://lingkungan-kajianrowulan.blogspot.com/2009/03/perdesaan-lahan-budaya-di-hadapan.html>. didownload pada 24 September 2013, pukul. 22.52.

⁶⁸Perdesaan-Lahan-Budaya di Hadapan Industri Konstruksi Perkotaan. <http://lingkungan-kajianrowulan.blogspot.com/2009/03/perdesaan-lahan-budaya-di-hadapan.html>. didownload pada 24 September 2013, pukul. 22.52.

⁶⁹Sugih Biantoro dan Endang Turmudi. 2012. *Kajian Ekonomi Politik Pelestarian Tinggalan Majapahit di Kawasan Trowulan*. Jakarta: PT. Gading Prima dan LIPI, hlm. 46.

Penggalian tanah oleh masyarakat Trowulan banyak dilakukan di sekitar bangunan situs. Mengingat kedekatan lokasi, penggalian tersebut membawa implikasi terhadap keberadaan sisa-sisa peninggalan yang masih terpendam di dalam tanah. Konstruksi bekas kota Kerajaan Majapahit di Trowulan yang terdiri atas batu bata, dan tertanam di kedalaman 1 hingga 1,5 meter ikut mengalami kerusakan. Sekitar tahun 1990, banyak masyarakat yang tidak sengaja menemukan sisa-sisa peninggalan arkeologi, seperti mata uang, keramik, manik-manik, patung, dan artefak lainnya di dalam tanah Trowulan. Baik di kalangan pembuat batu bata maupun kalangan petani, banyak menjumpai berbagai temuan semacam itu.

Pada awalnya, masyarakat menyerahkan berbagai temuan kuno itu kepada pemerintah pusat, yang diwakili kantor purbakala atau Balai Penyelamatan Peninggalan Purbakala (BP3) Jawa Timur –sekarang Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Provinsi Jawa Timur- yang juga bertempat di Trowulan. Namun, dalam perkembangannya, hanya sedikit masyarakat yang menyerahkan, karena mereka lebih memilih untuk merawat sendiri temuan atau menjualnya kepada pengepul atau kolektor benda antik.

Kondisi itu disebabkan oleh beberapa faktor; *pertama*, kompensasi yang diberikan pemerintah tidak sebanding dengan nilai temuan yang diserahkan oleh masyarakat, ditambah proses administrasi yang dianggap mereka terlalu berbelit-belit dan membutuhkan waktu yang relatif lama. *Kedua*, keengganan masyarakat untuk menyerahkan temuan kepada BPCB Jawa Timur, karena mereka tidak mengetahui secara jelas posisi temuan kuno yang telah diserahkan. Ketidaktahuan masyarakat sejalan dengan kabar yang beredar di tengah-tengah mereka, tentang adanya oknum pemerintah yang terlibat dalam jaringan perdagangan benda kuno. Walaupun, kami tidak mendapatkan bukti yang valid, banyak masyarakat yang menjadi informan kami memiliki persepsi sama tentang persoalan tersebut.

Sudah menjadi rahasia umum, bahwa perdagangan benda-benda kuno memang tengah berlangsung di Trowulan. Bisnis tersebut menjadi daya

tarik bagi masyarakat karena hasil keuntungan yang besar. Di Trowulan, terdapat beberapa pengepul yang bertugas menjadi penadah temuan dari masyarakat. Benda-benda kuno itu, kemudian dipasarkan ke luar Trowulan, terutama Bali dan bahkan ke Mancanegara. Mereka bekerja secara rapi dan sistematis sehingga sulit terlacak oleh pemerintah, seperti BPCB Jawa Timur dan aparat kepolisian. Bahkan ketika mereka berhasil menemukan salah satu pelaku, mereka tidak dapat memproses secara hukum, karena ternyata ada oknum pejabat tinggi yang berada dibelakang jaringan tersebut.

Pada pertengahan tahun 1990, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan anggaran yang terbatas, harus berlomba dengan para pengusaha batu bata lokal dan para investor dari luar Trowulan, seperti Surabaya.⁷⁰ Para pengusaha itu memiliki modal relatif lebih besar daripada anggaran pemerintah. Masyarakat Trowulan merasa diuntungkan dengan keberadaan para pengusaha tersebut. Dapat dibayangkan apabila temuan kuno yang tak utuh saja dapat dihargai jutaan rupiah. Para pengepul, jauh lebih diuntungkan karena mereka menghargai benda temuan berkali lipat di pasaran. Penemuan 'tak sengaja' masyarakat, berubah menjadi penemuan 'sengaja' untuk bisnis yang syarat dengan keuntungan besar.

Sebagian para ahli, mencurigai kalau industri batu bata adalah kamufase untuk menyembunyikan tujuan utama, yaitu mencari benda-benda kuno bernilai tinggi. Salah satu arkeolog Indonesia, menyatakan adanya kepentingan lain dalam penggalian lahan di Trowulan, diluar tujuan yang terlihat di permukaan. Dugaan tersebut, hadir sejalan dengan kondisi di lapangan. Lahan yang digali oleh masyarakat hingga 1,5 sampai 4 meter, ditinggalkan begitu saja oleh mereka setelah

⁷⁰Perdesaan-Lahan-Budaya di Hadapan Industri Konstruksi Perkotaan. <http://lingkungan-kajiantrowulan.blogspot.com/2009/03/perdesaan-lahan-budaya-di-hadapan.html>. didownload pada tanggal pada 24 September 2013, pukul. 22.52. Diambil dari Galih Widjil Pangarsa. *Merah putih arsitektur Nusantara*. Yogyakarta: Penerbit Andi untuk Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya, 2006.

selesai. Kebetulan, kedalaman tersebut menjadi lapisan yang banyak ditemukan benda-benda kuno.⁷¹

Para pengepul benda-benda kuno, ikut memberikan fasilitasi pada para perajin bata, agar temuan dapat dijual ke mereka. Masyarakat dapat juga menjadi penjual langsung ke kolektor, tanpa melalui pengepul. Semua anggota masyarakat bisa terlibat dalam bisnis tersebut, tak terkecuali pihak BPCB Jawa Timur atau Museum Trowulan. Seperti yang dikatakan oleh seorang perajin di Trowulan:

“Museum bisa seenaknya, tetapi masyarakat menemukan bangunan di stop, gak jelas kompensasi, pegawai museum bukan menyelamatkan barang tapi balapan ‘sugih’, kalau berani bisa ‘sugih’ kalau tidak ya melarat...”⁷²

Menurutnya, banyak perajin batu bata yang sudah mengerti kisaran harga dari benda kuno yang mereka temukan. Informasi mereka dapat dari para pengepul yang nampaknya mengontrol harga distribusi perdagangan benda-benda kuno. Jadi, banyak dari mereka yang lebih memilih untuk menjual ke pengepul daripada diserahkan ke BPCB Jawa Timur.

“Perajin batu merah sudah mengerti semua, ngerti nemu diuruk lagi berani gak pulang, nanti malam diambil, kalau siang ramai banyak nonton, ketahuan orang nanti masuk polisi... sistem perdagangan, keluar... Mojoagung... ada yang menawarkan barang... bikin batu merah alasannya gak ada pekerjaan, paling mudah membuat batu merah...”⁷³

Dugaan adanya kepentingan lain dalam bisnis batu bata, diperkuat oleh data bahwa keuntungan yang dihasilkan dari bisnis batu bata tidaklah besar. Bisnis itu melibatkan beberapa pihak, *pertama* pemilik lahan yang menyewakan lahan untuk perajin batu bata, pemilik lahan juga

⁷¹Pernyataan Agus Aris Munandar dalam kegiatan hasil diskusi ‘Seminar Penelitian Cagar Budaya’, Pusat Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB), LIPI pada tanggal 28 November 2012.

⁷²Wawancara YD (inisial) pada tanggal 5 Maret 2013.

⁷³Wawancara YD (inisial) pada tanggal 5 Maret 2013.

dapat merangkap sebagai perajin. *Kedua* adalah pengusaha yang bertindak sebagai penyewa lahan dari pemilik, ia juga mempekerjakan masyarakat menjadi perajin batu bata. *Ketiga* adalah para perajin itu sendiri yang berasal dari masyarakat kelas bawah dan mereka biasanya tidak memiliki lahan. Pembagian keuntungan terdistribusi, dan apabila melihat modal dan resiko yang harus ditanggung, sulit rasanya kalau tidak ada kepentingan lain yang ingin dicapai dalam bisnis batu bata.⁷⁴

Sejak RIA Bekas Kota Kerajaan Majapahit selesai pada tahun 1986, upaya pelestarian di Trowulan telah mengalami banyak perkembangan, baik dalam tingkat konsep, maupun pelaksanaan di lapangan. Namun, perhatian terhadap keberadaan masyarakat masih belum nampak, dibandingkan kepedulian terhadap bangunan dan situs itu sendiri. Keberadaan warisan budaya di Trowulan, memang belum banyak memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Namun, itu tidak berlaku bagi mereka yang berani terlibat dalam bisnis perdagangan ilegal benda-benda kuno. Juga bagi para perajin dan seniman yang dapat memanfaatkan simbol-simbol Majapahit sebagai karakter produk-produk mereka.

Aturan hukum yang mengatur keberadaan warisan budaya di Trowulan, telah menempatkan masyarakat menjadi pihak yang harus menerima beban sejarah, untuk melindungi warisan budaya yang penting, bernilai, dan berkualitas tinggi. Ketika masyarakat terus-menerus diserbu oleh larangan, sementara mereka tidak mendapat apapun, maka yang terlintas di kepala mereka adalah bagaimana cara mendapatkan keuntungan dari keberadaan warisan budaya, misalnya terlibat dalam jaringan perdagangan benda-benda kuno.

Mengingat keuntungan yang dapat mereka peroleh, tidak jarang masyarakat mengecoh petugas BPCB Jawa Timur. Mereka memberikan ukiran tambahan pada benda kuno, untuk menyamarkan kegiatan penyelundupan. Cara lain yang mereka lakukan adalah membuat benda baru menjadi terlihat lama dengan menguburnya di dalam tanah dalam

⁷⁴Wawancara YD (inisial) pada tanggal 5 Maret 2013.

jangka waktu tertentu. Benda-benda asli tapi palsu, mereka jual kepada pembeli atau kolektor, dengan harapan pembeli tidak mengetahui keaslian benda yang mereka jual. Bahkan, ada perajin yang mencoba mengelabui petugas BPCB Jawa Timur dengan menyerahkan benda yang terlihat asli tersebut dengan tujuan memperoleh kompensasi.

Ketika pengumpulan data RIA Bekas Peninggalan Kerajaan Majapahit berlangsung, peneliti harus berhadapan dengan masyarakat yang sedang gencar membuat batu bata dan mencari benda-benda kuno. Kondisi tersebut, membuat *ruralscape* Trowulan menjadi tidak jelas. Sebagaimana terputusnya kesejarahan masyarakat Majapahit dengan masyarakat Trowulan saat ini. Tidak ada hubungan antara keterampilan membuat kriya masa lalu dan masa kini. Jika dulu, pembuatan terakota berhubungan dengan aktivitas keagamaan, kini lebih sekedar alat pemenuhan kebutuhan ekonomi.⁷⁵

Perubahan paling besar dari lingkungan Trowulan, diperkirakan berlangsung sejak awal tahun 1980. Saat itu, industri konstruksi sedang mengalami *booming* di berbagai daerah, seperti Surabaya dan kota sekitarnya. Batu bata Trowulan telah dikenal oleh pengusaha industri konstruksi, sebagai batu bata berkualitas terbaik untuk wilayah Jawa Timur. Bata bata Trowulan menjadi pilihan utama bahan bangunan. Pesanan batu bata terus meningkat sejak tahun 1980. Pernah menurun ketika pra dan pasca krisis moneter tahun 1998, industri batu bata di Trowulan kembali menggeliat tahun 2002.⁷⁶ Lahan yang terbatas,

⁷⁵Perdesaan-Lahan-Budaya di Hadapan Industri Konstruksi Perkotaan. <http://lingkungan-kajianrowulan.blogspot.com/2009/03/perdesaan-lahan-budaya-di-hadapan.html>. didownload pada tanggal pada 24 September 2013, pukul. 22.52. Diambil dari Galih Widjil Pangarsa. *Merah putih arsitektur Nusantara*. Yogyakarta: Penerbit Andi untuk Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya, 2006.

⁷⁶Perdesaan-Lahan-Budaya di Hadapan Industri Konstruksi Perkotaan. <http://lingkungan-kajianrowulan.blogspot.com/2009/03/perdesaan-lahan-budaya-di-hadapan.html>. didownload pada tanggal pada 24 September 2013, pukul. 22.52. Diambil dari Galih Widjil Pangarsa. *Merah putih arsitektur*

disiasati para perajin batu bata dengan cara mengambil bahan baku dari luar Trowulan. Kondisi tersebut, yang kemudian mengganjal bagi mereka yang menganggap bahwa penggalan lahan untuk membuat batu bata hanya kamufase. Seperti yang disampaikan oleh perajin di Trowulan:

“Pembuat batu bata adalah kepentingan murni, kalau menemukan sesuatu itu adalah kebetulan. Tapi saya sendiri tidak mengetahui apakah selalu dilaporkan atau kalau ketahuan saja baru dilaporkan...”⁷⁷

Ia menambahkan, sebagian pemilik lahan sulit untuk melakukan irigasi karena permukaan lahan yang semakin menurun, sehingga mengikuti masyarakat sekitarnya yang sudah terlebih dahulu menjadi pengusaha bata.

“Pemilik, penyewa, karena sawahnya sudah tidak bisa diirigasi karena kiri kanan lebih rendah lahannya. Bata dipasarkan luas hampir seluruh kota di sekitar sini, bata menjadi bahan material untuk membuat rumah.... Kalau temuan di daerah sini, bernilai atau tidak bernilai, orang-orang pasti setiap hari akan menemukan, misalnya di Candi Tikus, tidak ada pendangkalan tapi setelah ada tanah digali dua meter, kalau habis sewanya, didalamkan lagi, di sini tidak ada aturan, sawah di sini sudah turun semua, disewakan untuk pembuatan batu bata, nah ketika kondisi seperti itu, sawah yang diatas mau tidak mau digali juga karena sawah disekelilingnya lebih dalam, sehingga mengalami kesulitan dalam hal irigasi...”⁷⁸

Bagi sebagian masyarakat Trowulan yang tidak ingin terlibat dalam bisnis batu bata dan jual beli benda-benda kuno, lebih memilih untuk menjadi perajin patung, cor logam, terakota dan manik-manik. Bisnis tersebut, memiliki keuntungan yang cukup besar. Mereka juga

Nusantara. Yogyakarta: Penerbit Andi untuk Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya, 2006.

⁷⁷Wawancara IT (inisial) pada tanggal 4 Maret 2013.

⁷⁸Wawancara IT (inisial) pada tanggal 4 Maret 2013.

meyakini bahwa cara mereka menjadi salah satu bentuk lain dari upaya pelestarian terhadap peninggalan Majapahit.

"...Kalau melihat barang-barang seperti itu konon mahal, tapi saya tidak tahu. Saya sendiri sangat kuantal kalau ikut menggali lahan, saya kopi patung bisa dijual bisa menafkahi keluarga, kenapa harus yang asli. Komunitas pematung ikut andil dalam menyelamatkan situs, kalau tidak ada kopi, aslinya yang akan diserang. Membuat patung tidak munafik memang tujuan utama, tapi upaya penyelamatan adalah sedikit-sedikit saja..."⁷⁹

IT (inisial) adalah perajin patung yang termasuk sukses di Trowulan. Ia menjelaskan bagaimana awal berkembangnya perajin patung di desanya. Kisah hidupnya menyiratkan bahwa memang keahlian membuat patung di Trowulan tidak berhubungan dengan orang-orang Majapahit yang memang sudah memiliki kemampuan tersebut.

Saya menjadi pematung dari kecil, tapi bapak saya pandai besi membuat alat-alat pertanian, jadi dulu sebelum ada komunitas pematung disini banyak pandai besi. Saya menjadi pematung diawali dari senang saja, suka saja membuat patung karena di Trowulan banyak situs dan patung, dulu hanya dua orang yang menjadi pematung, dan pematung dulu belum disebut pekerjaan karena masih disambi dengan pandai besi, seperti saya dulu belajar pandai besi, membantu bapak menjadi pandai besi, dan untuk yang membuat jajan hanya dari penghasilan pandai besi. Bali belum menjadi pasar, dulu menjualnya masih di surabaya, di keputeran ada sederetan toko antik, sekarang dipindahkan di Benteng Pancasila, jualnya ukuran kecil, dipanggul, pakai bis. Lama kelamaan pasar Bali terbuka, melonjaknya krismon, waktu Dollar sampai 13.000 Rupiah, di sini menjadi komunitas pematung, waktu itu laku pesat. Saya dan teman-teman otodidak tidak ada basic dari pendidikan kesenian. Saya belajar mulai dari kelas 6, sendiri dan ada beberapa teman usianya di atas saya...Tidak ada pelatihan-pelatihan, cara

⁷⁹Wawancara IT (inisial) pada tanggal 4 Maret 2013.

memasarkan sendiri... masalah di industri patung adalah pemasaran, kalau modal, teman-teman perlu modal, tapi bisa menggunakan modalnya sendiri, beda dengan sistem koperasi seperti sepatu, dan lain-lain. Yang penting adalah pemasaran. Pekerja ada 7, dulu 30, pasar sepi apalagi termasuk Eropa kena krisis ekonomi, 90 persen adalah ekspor, hampir peminat dari Eropa. Hanya 1 -2 yang digunakan oleh orang lokal, untuk rumah, wihara, pura, tapi minim sekali. Khusus untuk pematung kurang lebih ada 60 kelompok pematung batu. Masing-masing kelompok punya jaringan, mencari jaringan sendiri-sendiri.⁸⁰

Selain kerajinan patung, juga ada kerajinan logam di Trowulan. Kerajinan ini bisa dilacak awal keberadaanya ketika masa kolonial. Maclaine Pont adalah arsitek Belanda dan seorang peneliti artefak di Trowulan yang berperan dalam mewarisi keterampilan membuat kerajinan logam.

Maclaine Pont yang tinggal di Trowulan antara tahun 1924-1943 membuat patung kuningan dan mengajari teknik pembuatannya kepada masyarakat lokal, salah satunya adalah Sabar. Ia mulai membuat kerajinan kuningan dengan “model Majapahitan”. Sekitar tahun 1980, bentuk model lebih menyesuaikan pesanan pelanggan. Salah satu keturunan Sabar yang kini juga berprofesi sebagai perajin, menjelaskan tentang sejarah awal industri patung logam di Trowulan.

“Tahun 1949 bapak saya (Sabar) kerja di museum Trowulan sebagai asisten orang Belanda, disuruh nunggu rumahnya dan koleksi patung-patung, kebetulan Mclaine Pont senang mengumpulkan barang-barang peninggalan Majapahit, sampai jadi kantor-kantor koleksinya, lama-lama jadi anak buah, lima waktu itu, di mana Pont seorang arsitektur bangunan juga taman, dan pematung, kebetulan Bapak itu sampai tahun 1967/68 mau pensiun, pensiun Bapak diajari bikin patung (Jesus) dari lilin sampai pembalutan, pengecorannya di Kediri, saya belum tahu (lokasi) itu, di

⁸⁰Wawancara IT (inisial) pada tanggal 4 Maret 2013.

Kediri malahan, satu minggu pulang patung jadi logam... finisihing, patung di pasang di gereja di Kediri... Bapak diajari bikin model-medel Siwa, Ganesha contoh patung batu, koleksinya patung-pating batu, awalnya terakota, terus bikin lilin-lilin, lilinya lilin batik, akhirnya Bapak pensiun, hampir setahun 1969/70, pensiun Bapak meneruskan itu usaha... Belanda pesannya masa depan bikin patung kerajinan cor perunggu mungkin lebih bagus... akhirnya Bapak pulang mandiri, bapaknya mengajarkan saya dan terus anak buah... Bapak punya tujuan ingin mengentaskan pengangguran... anak-anak yang putus sekolah diajak magang, setelah mandiri belajar tiga tahun, sambil belajar tiga tahun mandiri, pas sekolah sampai sekarang, terus sekarang nyebar satu desa sampai di luar desa..."⁸¹

Kini di Trowulan memang berkembang perajin patung batu, logam, terakota, dan manik-manik. Walaupun tidak seperti Bali yang menjadi destinasi wisata kerajinan, namun Bali telah menjadi daerah pemasaran utama bagi para perajin.⁸² Harga produk kerajinan yang dibanderol pun menjadi berkali-kali lipat dari harga yang biasanya di jual di Trowulan.

Selain perajin, juga terdapat masyarakat kesenian yang biasanya tergabung dalam komunitas kesenian atau dalam bentuk LSM. Saat ini banyak komunitas kesenian yang didirikan di Trowulan. Mereka biasanya melakukan pentas di lingkungan situs untuk membangkitkan identitas dan simbol ke-Majapahitan. Mereka membangun hubungan dengan lingkungan, dan itu menjadi bagian kecil dari suatu sistem kehidupan ekonomi mereka. Di antara para komunitas kesenian, juga memunculkan persaingan bisnis terkait dengan bantuan yang sering

⁸¹Wawancara YD (inisial) pada tanggal 5 Maret 2013.

⁸²Jejak McLaine Pont dan Kerajinan Logam. <http://tokoh-kajian-trowulan.blogspot.com/2009/03/jejak-mclaine-pont-dan-kerajinan-logam.html>. (didownload pada tanggal 24 September 2013, pukul 6.54 WIB). Diambil dari Galih Widjil Pangarsa. *Merah putih arsitektur Nusantara*. Yogyakarta: Penerbit Andi untuk Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya, 2006.

digelontorkan oleh pemerintah. Persoalan pakem 'Majapahit' juga kadang menjadi perbedaan di antara mereka.

Namun, dalam kasus perlindungan terhadap warisan budaya di Trowulan, mereka cenderung memiliki kesamaan cara pandang. Bagi mereka, tidak ada alasan untuk pengrusakan di situs-situs Majapahit yang memiliki nilai spiritual tinggi. Misalnya, dalam kasus pendirian pabrik baja di Trowulan tahun 2013. Mereka bersama-sama menentang pihak perusahaan untuk segera membatalkan niat pendirian pabrik tersebut. Pendirian pabrik baja akan membawa implikasi bagi Trowulan, yang berfungsi sebagai ruang budaya sekaligus ruang ekonomi bagi masyarakat kesenian.

Selain persoalan kemanfaatan ekonomi bagi masyarakat, Trowulan juga menjadi ruang spiritual bagi mereka yang membutuhkan petunjuk hidup. Walaupun secara ekonomi, Trowulan belum memberikan keuntungan yang optimal, namun dari aspek spiritual, beberapa situs di Trowulan telah memberikan kemanfaatan spiritual bagi masyarakat terutama kelompok masyarakat kepercayaan.

Mereka biasanya memiliki pemikiran yang sejalan dengan masyarakat kesenian, karena sama-sama mengagungkan peradaban Majapahit. Bahkan, para petinggi di negeri ini yang ingin atau sedang berkuasa di pemerintahan, tidak sah bila tidak mengunjungi situs di Trowulan. Salah satu situs yang dimaksud adalah Makam Troloyo dan Siti Hinggil. Saat ini, banyak kelompok masyarakat yang menginginkan kebangkitan Majapahit di Trowulan dan itu tidak terlepas dari nilai-nilai spiritual yang telah berkembang masa Majapahit.

3.4. Membangun Negosiasi

Berbagai program pelestarian setelah RIA Bekas Kota Kerajaan Majapahit, yang dirancang oleh pemerintah untuk mengurangi tingkat pengrusakan akibat aktivitas masyarakat belum berjalan efektif. Misalnya, proyek pembebasan lahan masyarakat di sekitar situs. Terbantur dengan keterbatasan anggaran, upaya tersebut sulit dilakukan secara lebih luas, karena masyarakat telah mengantisipasi kebijakan

semacam itu. Biasanya, masyarakat akan menaikkan harga tanah ketika memperoleh informasi pembebasan lahan dari pemerintah. Sebagian masyarakat sebetulnya tidak menolak apabila dipindah, asal kompensasi harga yang diberikan pemerintah sesuai dengan nilai tanah mereka. Namun, sebagian yang lain tetap menolak karena potensi sumber daya di Trowulan sudah dapat memberikan kesejahteraan bagi mereka.

Kondisi itu, membuat pemerintah menempatkan masyarakat sebagai pihak yang perlu diatur. Dampak dari dugaan pemerintah itu, membuat mereka cenderung untuk mengesampingkan masyarakat dalam setiap perumusan program pelestarian di Trowulan.

"...Mengapa Trowulan begini-begitu saja.. warga tidak terlibat, dalam arti karena situs-situs yang ada...sebetulnya ada kegiatan yang ada sangkut pautnya dengan situs itu sendiri, disini saya melihat tidak ada, warga tidak terlibat dalam acara, kalau Jolotundo warga masih terlibat, setiap tahun ada upacara tertentu, warga dilibatkan. Kalau di Trowulan sama sekali. Candi Bajang Ratu dan Brahu itu fungsinya untuk apa? Orang sekitar tidak tahu dan sepertinya tidak mau tahu..."⁸³

Menurut salah satu pegawai BPCB Jawa Timur, dirinya sempat membuat pelatihan yang berhubungan dengan budaya Jawa, namun ternyata kurang diterima oleh komunitas kesenian di Trowulan.⁸⁴ Kurangnya dukungan dari masyarakat, diakibatkan mereka sulit untuk mempercayai peran pemerintah. Misalnya saja dalam kasus pembebasan lahan yang cenderung merugikan masyarakat.

"...BP3 selama ini begitu-begitu saja, bahkan ada beberapa situs atau temuan yang sampai beberapa tahun ini belum terselesaikan dan persoalan pembebasan lahan, contoh Wates Umpak, warga sudah stop tapi pembebasan lahan

⁸³Wawancara IT (inisial) pada tanggal 4 Maret 2013.

⁸⁴Wawancara SN (inisial) pada tanggal 19 Oktober 2013.

belum selesai, kemudian di Kedaton, pembebasan lahan belum selesai juga...⁸⁵

Banyak masyarakat Trowulan yang belum mengerti tentang keberadaan situs-situs di sekitar mereka. Kurangnya sosialisasi dan keterlibatan masyarakat, sejalan dengan pengharapan mereka untuk bisa menikmati acara-acara yang diadakan di situs-situs Trowulan.

"...Misalnya warga terlibat, satu tahun sekali ada acara apa yang sesuai dengan fungsi salah satu situs. Sebagian atau saya rasa semua (masyarakat) tahu kalau Trowulan sebagai pusat Kota Majapahit, tapi kalau fungsinya untuk-untuk apa, hanya sebagian kecil saja...Kita tidak tahu Waringin Lawang sebagai apa, pintu gerbang atau apa, seperti dikaburkan, jadi saya bilang warga tidak ikut terlibat ya itu maksudnya, dan sekarang sepertinya tidak mau tahu... Saya sudah cukup dengan profesi saya, seniman kan harus berjalan sendiri, berdiri sendiri, kita tidak bisa mengharapkan kepada orang lain, kalau sudah sukses semua mau nempel, ini komunitas saya, ini binaan saya..."⁸⁶

Banyak program pemerintah yang tidak disosialisasikan kepada masyarakat terlebih dahulu. Salah satunya adalah Pusat Informasi Majapahit (PIM). Sama halnya dengan pemerintah daerah, masyarakat Trowulan juga tidak mengetahui tentang pembangunan tersebut.

"Masyarakat awalnya tidak tahu kasus PIM, karena warga tidak bisa masuk karena pagarnya rapat sekali. Sebagai warga, saya sangat tidak setuju dengan adanya PIM disitu apapun alasannya. Seharusnya tempat nya jangan disitu dan harus pindah, tidak boleh disiasati oleh dalih apapun.. Kalau tidak merusak situs, masyarakat tidak pernah diajak bicara untuk pengembangan pariwisata, tahunya setelah mencuat di media. Kalau PIM dibangun tidak merusak situs-situs yang ada.. Masyarakat dibilang maklum bolehlah, karena tidak

⁸⁵Wawancara IT (inisial) pada tanggal 4 Maret 2013.

⁸⁶Wawancara IT (inisial) pada tanggal 4 Maret 2013.

*tahu seluk beluknya, tapi pemerintah yang seharusnya tahu kok malah merusak..*⁸⁷

Masyarakat di Trowulan, baru mengetahui program PIM setelah beberapa media cetak memuat pemberitaan tentang proyek yang diduga telah merusak situs tersebut. Program PIM membawa implikasi pada pandangan masyarakat terhadap pemerintah. Larangan dan batasan terhadap aktivitas masyarakat yang diduga telah merusak situs menjadi sulit untuk diterapkan.

*“Bagaimana bisa melarang warga sini karena itu sudah mata pencaharian, orang-orang yang paling banyak menemukan situs itu yang orang-orang pencari batu bata, Candi Wates Umpak yang menemukan pembuat batu bata, kemudian mereka melapor, didata, dipagar, area sendiri sudah tidak bisa digunakan, tapi bertahun-tahun belum selesai sedangkan masyarakat sudah tidak bisa bekerja...Kompensasi ada untuk barang-barang itu, tetapi seimbang atau tidak kalau dibandingkan dengan dijual ke luar, yang tahu adalah yang menemukan. Harga tidak ada tarifnya, tapi untuk BP3 misalnya di kedaton ada temuan bantu andesit, ratusan keping yang sudah diambil ke BP3, tapi tidak tahu orangnya dikasih berapa, tapi tidak seimbang dan orangnya di stop tidak bekerja, tapi orangnya terus bekerja dan baru-baru ini menemukan lagi, maunya diambil tetapi tidak boleh. Sudah ratusan yang diangkut ke BP3...Lebih banyak warga yang tidak memberikan, karena kompensasi tidak seimbang dan birokrasi yang rumit, di belakang Candi Brahu menemukan satu set pakaian Raja sudah banyak dijual kemudian ketahuan dan sekarang tidak tahu posisinya ada di mana, dan BP3 tidak pernah memberikan informasi itu kepada masyarakat...”*⁸⁸

Bagaimanapun, pemerintah tetap membuat upaya-upaya lain agar masyarakat mau mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Selain memberikan kompensasi –sebagaimana diatur dalam undang-undang –

⁸⁷Wawancara IT (inisial) pada tanggal 4 Maret 2013.

⁸⁸Wawancara IT (inisial) pada tanggal 4 Maret 2013.

kepada masyarakat yang menyerahkan temuan mereka, BPCB Jawa Timur juga mengangkat salah satu anggota keluarga yang menyerahkan atau memberikan informasi temuan kepada pemerintah sebagai juru pelihara. Cara tersebut dianggap ampuh, namun karena pelaksanaannya dalam skala kecil maka belum mempengaruhi kondisi pelstarian di Trowulan secara luas. Setidaknya, pengharapan untuk menjadi pegawai BPCB Jawa Timur juga terlontar oleh sebagian masyarakat.

Banyak masyarakat yang kemudian diangkat menjadi pegawai honorer dan bertugas merawat koleksi museum atau taman di situs-situs Trowulan. Seperti yang dialami oleh bekas buruh linggan, yang secara tidak sengaja pernah menemukan benda kuno berupa tombak emas di Trowulan. Selain mendapatkan kompensasi sebesar 9 juta rupiah oleh pemerintah, ia juga dipekerjakan menjadi pegawai honorer di Museum Trowulan.⁸⁹

Berbagai upaya pemugaran dilakukan pemerintah agar bangunan situs terawat dengan baik. Namun, seolah-olah situs berdiri sendiri dan lepas dari konteks masyarakat. Fasilitas di situs yang sudah dipugar ada yang masih belum diperhatikan, sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat misalnya untuk pertunjukan kesenian.

“Satu situs di Waringin Lawang, penerangan saja tidak ada, dari segi keselamatan misal saja ada yang mencuri atau merusak tidak tahu karena penerangan saja tidak ada, berapa sih biaya untu penerangan, pasang lampu, misalnya di Yogya, tempat-tempat itu bisa dijadikan sebagai tempat event-event, kita pernah minta pekarangannya dirubah biar lebih kondusif, sudah dibebaskan di depan Waringin Lawang tetapi belum juga dikembangkan, kalau ada event kan bagus, di sini kan konsep taman hampir sama, di Bajang Ratu ada halaman kasus nanti ada tari, menarik, kita kalau bikin acara

⁸⁹<http://www.indonesiawaterinstitute.org/sains-a-teknologi/129613-cerita-pembuat-batu-bata-di-metropolitan-majapahit> didownload pada tanggal 28 Oktober 2013, pukul 14.18 WIB.

di Waringin Lawang tetapi di sebelah parkir, karena terhalang dengan taman itu...”⁹⁰

Beberapa memang diperbolehkan menjadi tempat pementasan seni oleh beberapa komunitas kesenian di Trowulan, namun itupun dalam jumlah yang kecil. Selain berfungsi sebagai ruang pertunjukan, beberapa situs di Trowulan telah menjadi objek wisata budaya. Secara tidak langsung, hal itu akan membantu ekonomi masyarakat yang kemudian membuka dagangan di sekitar situs. Berhubungan dengan pemanfaatan situs oleh masyarakat, dapat menjadi contoh kasus yang terjadi di Komplek Makam Troloyo.

“...Troloyo, menurut saya tempat wisata yang paling jarang saat ini, karena warga terlibat di dalam kegiatan itu, mendukung, kalau melihat secara seni budaya, menurut saya candi-candi Bajang Ratu, Brahu, tidak kalah menariknya.. yang harus melibatkan adalah pemerintah daerah...”⁹¹

Komplek Makam Troloyo terletak di Dusun Sidodadi, Desa Sentonorejo, Kecamatan Trowulan. Makam tersebut merupakan bukti adanya komunitas Islam pada masa Majapahit. Salah satu nisan yang berhasil ditemukan di dalam kompleks makam, bertuliskan nama Islam “Zainudin”. Namun, letak nisan yang sebenarnya tidak diketahui secara pasti, sedangkan nama-nama yang dimakamkan di kompleks itu adalah konstruksi kelompok tertentu.⁹² Pemanfaatan Komplek Makam Troloyo tidak dapat dilepaskan dari peran elit lokal, seperti Kepala Desa Sentonorejo.

⁹⁰Wawancara IT (inisial) pada tanggal 4 Maret 2013.

⁹¹Wawancara IT (inisial) pada tanggal 4 Maret 2013.

⁹²Makam-makam yang terdapat di dalam Komplek Makam Troloyo:

- 1) Cungkup makam yang diyakini sebagai makam Syekh Jumadil Kubro, Syekh Abdul Qodir Jailani Sini, Syekh Maulana Skah, dan Syekh Maulana Ibrahim.
- 2) Makam Walisongo.
- 3) Makam Sunan Ngudung.
- 4) Makam Putri Kencono Wungu dan Anjasmoro.
- 5) Makam Tujuh yang berisi tujuh buah makam.

Langkah awal yang dilakukan oleh Kepala Desa Sentonorejo adalah menyusun strategi pemasaran dengan mengundang berbagai tokoh ulama yang memiliki massa pendukung yang besar, seperti kyai-kyai pemimpin tarekat dan terakhir mengundang KH. Abdurahman Wahid atau yang dikenal dengan nama Gus Dur. Cara itu ternyata berhasil, karena banyak para peziarah yang berkunjung ke makam Troloyo. Sebagian besar para peziarah berasal dari luar Trowulan seperti Surabaya, Malang, Gresik, dan Jombang.

Peziarah bukan hanya dari kalangan masyarakat biasa, namun juga para pejabat tinggi di pemerintahan. Komplek Makam Troloyo ramai pada hari-hari tertentu seperti saat malam Jum'at Legi, ketika berlangsung kegiatan haul Syekh Jumadil Qubro, acara Gerebeg Suro, bulan puasa, dan bulan besar kalender hijriah. Upacara-upacara adat juga banyak dilakukan di Komplek Makam Troloyo oleh masyarakat. Bahkan saat ini, Makam Troloyo telah menjadi terkenal sebagai pusat wisata ziarah.

"..Kalau Troloyo Islam yang menyimpulkan itu Gusdur, jadi mempublikasikan sesuatu tergantung figurnya, semua Majapahit itu masih misterius, masih diperkirakan, kita bisa mengklaim selama itu masuk akal, akhirnya berjalan, setelah Gusdur banyak pejabat yang datang ke Troloyo, entah itu kunjungan siluman atau apa, orang sini latah, ikut-ikutan, klaim Majapahit masuk akal dan orang berpengaruh maka akan berjalan. Peziarah yang datang dari luar trowulan, kalau masyarakat Trowulan hanya jajan-jajan saja, sebelum Gusdur, Troloyo itu sepi, dulu itu lapangan, saya main sepakbola di sana.."⁹³

Kepala Desa Sentonorejo telah dengan baik mengkonstruksi tempat ini melalui peran dari Gus Dur yang juga membangun identitas dirinya sebagai keturunan dari leluhur yang dimakamkan di Troloyo. Gus Dur meyakini bahwa dirinya merupakan keturunan Tan Kim Han, salah seorang panglima perang yang menggulingkan Kerajaan Majapahit dan ikut mendirikan Kerajaan Demak. Gus Dur lantas mengidentifikasi

⁹³Wawancara IT (inisial) pada tanggal 4 Maret 2013.

bahwa Syekh Abdul Qodir yang namanya tertulis di salah satu nisan Komplek Makam Troloyo sebagai Tan Kim Han.

Pada awalnya Komplek Makam Troloyo sepenuhnya menjadi area penelitian dibawah koordinasi BPCB Jawa Timur. Namun, dikarenakan ramai pengunjung yang sebagian besar adalah para peziarah, Makam Troloyo kemudian dikelola oleh Disporabudpar Kabupaten Mojokerto dan dan Kepala Desa Sentonorejo. Sebagai salah satu peninggalan dari Majapahit, Troloyo seharusnya berada di bawah wewenang BPCB Jawa Timur.

Namun, muncul informasi bahwa peninggalan yang dianggap asli di Trowulan sudah tidak ada, kecuali struktur kanal yang sudah tidak utuh dan hancur yang membentang di dalam tanah lokasi Makam Trowloyo berdiri. Pertimbangan tersebut, yang menentukan posisi BPCB Jawa Timur untuk tidak lagi terlibat dalam pengelolaan di Makam Troloyo. Walaupun, muncul pertentangan di kalangan arkeolog, yang menyatakan bahwa seharusnya Makam Troloyo tetap dibawah BPCB Jawa Timur karena sisa-sisa struktur di bawah lahan komplek masih penting sebagai data arkeologi.

Pertentangan yang terjadi tidak menghilangkan kenyataan bahwa, Kepala Desa Sentonorejo telah menjalankan sebuah strategi pemanfaatan sebuah situs. Ia mampu bernegosiasi dengan pihak-pihak lain, seperti Disporabudpar Kabupaten Mojokerto dan BPCB Jawa Timur. Sejarah dan nilai-nilai tradisi telah dikonstruksi menjadi produk wisata di makam-makam tersebut. Saat ini, Disporabudpar Kabupaten Mojokerto mulai menambah berbagai fasilitas bangunan untuk memberikan estetika dan kenyamanan bagi pengunjung. Banyaknya peziarah yang berkunjung, juga membawa keuntungan ekonomi bagi masyarakat sekitar yang berjualan di sekitar komplek makam.

Selain Komplek Makam Troloyo, juga ada situs lain yang kini dikelola oleh masyarakat sekitar, yaitu Siti Hinggil. Siti Hinggil berada di Dusun Kedungwulan, Desa Bejjong, Kecamatan Trowulan. Beberapa masyarakat kepercayaan, meyakini Siti Hinggil pernah menjadi tempat pertapaan Raden Wijaya bahkan mengidentifikasinya sebagai makam

Raja Majapahit pertama tersebut. Awal mulanya, situs itu teridentifikasi sebagai sebuah bangunan candi. Para paneliti dari BPCB Jawa Timur dan akademisi terlibat dalam identifikasi tersebut. Siti Hinggi muncul setelah ditemukan tengkorak, kerangka yang dipercaya oleh beberapa masyarakat sebagai Raden Wijaya.⁹⁴ Padahal dalam keyakinan Hindu, ketika ada yang meninggal dunia, maka tubuhnya akan dibakar. Seperti pada upacara Ngaben di Bali, sehingga dapat dipastikan tidak ada sisa kerangka di Siti Hinggil.

3.5 Pusat Informasi Majapahit

Sama halnya ketika zaman kolonial, pemugaran situs-situs bersejarah dibangun sedemikian rapi dan menarik. Pemberian pagar di sekeliling bangunan dilakukan untuk menambah nilai estetika. Produk akhir dari perlindungan tersebut, menjadi sebuah kebanggaan bagi pemerintah kolonial. Ketika zaman reformasi, upaya itu dilanjutkan dengan membangun berbagai fasilitas lainnya, yang tetap terfokus pada preservasi bangunan situs.

Pada tahun 2007-2008, pemerintah membuat pendekatan baru dengan membangun Pusat Informasi Majapahit (PIM) yang berada dekat Museum Trowulan. PIM akan dijadikan sebagai pusat sebuah kawasan Trowulan yang terintegrasi dengan situs-situs yang berada di sekelilingnya. PIM atau juga dikenal Taman Majapahit adalah salah satu program yang direncanakan pemerintah untuk mengembangkan sektor pariwisata di Trowulan. Begitu yang kita dengar dan tentunya pandangan itu didukung oleh kementerian yang menjadi pengampunya, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

Apalagi, menteri lembaga pemerintah tersebut adalah seorang yang sangat peduli dalam pengembangan pariwisata. PIM didukung oleh anggaran yang relatif besar, karena memang saat itu dijadikan sebagai program unggulan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

⁹⁴Puslitbang Kebudayaan. 2008. *Kajian Integratif Pelindungan dan Pengembangan Situs Peninggalan Majapahit*, Jakarta: Puslitbang Kebudayaan, hlm. 247.

Pembangunan PIM diharapkan dapat mendukung sektor ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar Trowulan, dan tentunya menaikkan citra pariwisata Indonesia di mata internasional. Dengan banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Trowulan, tentu akan menaikkan pemasukan negara dari sektor pariwisata. Tentu hal itu dapat menjadi sebuah kebanggaan bagi Kementerian terutama Menteri itu sendiri.

Menurut beberapa mantan anggota tim ahli, pendirian PIM diawali dari keinginan Pak Menteri. Selain bertujuan untuk mengembangkan kawasan Trowulan, terutama untuk sektor Pariwisata, ada kecenderungan Pak Menteri untuk menghubungkan identitas Hindu Bali dengan Majapahit di Trowulan. Sejarah memperlihatkan hubungan yang erat antara Majapahit dengan Bali. Beberapa sejarawan menyatakan ketika Demak menyerang Majapahit, banyak bangsawan dan masyarakat Majapahit yang melarikan diri ke Bali. Hipotesis itu, didukung oleh kesamaan pola bangunan dan agama Majapahit dengan yang ada di Bali saat ini. Banyak peziarah dari Bali yang datang ke Trowulan untuk memuaskan hasrat spiritual. Bahkan ada pendatang yang sampai membangun pura di Trowulan dengan menganggap dirinya sebagai keturunan raja Majapahit. Dalam konteks pembangunan PIM, dapat dikaitkan dengan latar belakang Menteri Kebudayaan dan Pariwisata yang juga berasal dari Bali.

Para penguasa di Indonesia cenderung kuat menjaga simbol-simbol identitas dengan para pendahulunya. Tuntutan nilai-nilai spiritual tersebut harus dipenuhi untuk menjaga keseimbangan kekuasaan di dunia. Melalui cara itu, kekuasaan yang ia dapatkan di dunia akan tetap langgeng dan terpelihara baik. Pandangan itu sejalan dengan konsep kepemimpinan di Jawa. Misalnya di Trowulan, yang dianggap memiliki banyak situs bernilai spiritual tinggi.

Keberadaan Trowulan dapat mengakomodir para penguasa yang membutuhkan nilai-nilai spiritual tersebut. Bisa dikatakan, sebagian besar penguasa nomor satu di Indonesia pernah berkunjung ke Siti Hinggil yang dianggap sebagai petilasan Raden Wijaya. Bahkan Gus Dur merekonstruksi keterkaitan dirinya dengan nama-nama tokoh di

nisan Makam Troloyo, dan sejak saat itu, banyak pemimpin bangsa Indonesia yang berkunjung ke makam tersebut.

Keinginan Pak Menteri ditangkap oleh pejabat-pejabat dibawahnya dengan baik. Dalam kaitan dengan pelaksanaan program di tingkat negara, seorang bawahan dalam struktur kekuasaan di pemerintahan harus dituntut untuk selalu taat kepada atasan. Sebuah program yang dilontarkan atasan walaupun secara lisan, harus segera ditindaklanjuti oleh para bawahan. Konsekuensi dari seorang bawahan yang berhasil menjalankan tugas, biasanya akan dipromosikan menempati posisi strategis dalam pemerintahan. *Reward* yang menanti akan membuat bawahan bertindak tanpa perencanaan yang matang. Inisiatif para birokrat untuk memenuhi keinginan atasannya dapat terjadi secara sadar karena mereka juga memiliki kepentingan tertentu. Bisa juga sebaliknya, mereka yang tunduk pada kekuasaan sering kali tidak menyadari bahwa kekuasaan itu dijalankan, atau yang kita sebut sebagai kekuasaan terkondisi.⁹⁵

Untuk mempercepat perencanaan, biasanya para birokrat mengumpulkan para ahli dari berbagai latar belakang keilmuan. Seperti pada kasus PIM, berbagai ahli turut dilibatkan untuk merumuskan langkah yang tepat. PIM adalah program pembangunan yang berskala besar, maka diperlukan sebuah perhitungan matang. Salah satu ahli arkeologi yang terlibat, memberikan saran untuk terlebih dahulu dilakukan penelitian sebelum pembangunan dimulai. Menurutnya, pembangunan tidak hanya dilihat dalam lingkup pemberdayaan masyarakat, namun juga menyiapkan masyarakat terlebih dahulu. Ia menyarankan lahan dibuka terlebih dahulu secara arkeologis, dan karena kondisi Trowulan yang kurang menyediakan display komunikasi tentang peninggalan Majapahit, maka dapat mendirikan bangunan diatas temuan.

"...itu adalah tantangan arsitek untuk membuat museum diatas temuan, namun tidak mengganggu situs. Gedung

⁹⁵James A. Caporaso dan Davis P. Levine. 2008. *Teori-Teori Ekonomi Politik*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta, hlm. 424-438.

*dirancang dengan tiang-tiang fleksibel, banyak tidak apa-apa, tetapi kuat menyangga...*⁹⁶

Para ahli yang terlibat dalam pertemuan awal, sepakat untuk merekomendasikan penelitian terlebih dahulu. Namun, perbedaan cara pandang dalam menyikapi metode yang harus dijalankan dalam pembangunan PIM tetap berlangsung di antara mereka. Perbedaan tidak hanya terjadi antara birokrat dengan akademisi, namun juga di antara kalangan akademisi.

Di beberapa situs arkeologi di dunia, terdapat pendekatan baru dalam manajemen situs arkeologi, yaitu mendirikan museum di atas situs. Konsep ini memungkinkan penelitian arkeologi oleh ahli dapat dilakukan bersamaan dengan memberi akses bagi publik. Namun konsep ini masih ditentang oleh arkeolog beraliran konvensional, yang masih beranggapan penimbunan kembali reruntuhan setelah diteliti ialah yang terbaik. Bagi arkeolog konvensional, bangunan di atas reruntuhan walaupun hanya berupa struktur temporer akan mengakibatkan adanya elemen struktur, seperti pondasi yang dapat merusak situs.⁹⁷

Kontestasi dalam proses pembangunan PIM telah terjadi antara arkeolog sejak awal perencanaan. Arkeolog dari UI berbeda dengan UGM, begitu juga dengan arkeolog yang berasal dari lembaga pemerintah, seperti Pusat Arkeologi Nasional. Cara pandang mereka nampak sulit disatukan, bahkan disinyalir adanya konflik yang bersifat personal.

“...Kalau melihat tahapan demi tahapan, itu dimulai dari akademik atau bahkan personal, kemudian kelompok akademik, lalu berkembang kepada masyarakat. Bagaimanapun, akar-akar pemerintahan dari akademisi. Bukan hanya tidak sependapat dengan Pak Manteri, namun

⁹⁶ Wawancara AS (inisial) pada tanggal 2 Maret 2013.

⁹⁷ <http://heptadesain.wordpress.com/2009/01/17/baskoro-tedjo-dan-kontroversi-trowulan/> didownload pada tanggal 19 Oktober 2013, pukul. 13.00 WIB.

*sebetulnya ketidak cocokan dengan pihak-pihak yang mendukung Pak Menteri...*⁹⁸

Bagi para pejabat di lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, pembangunan PIM harus tetap dilaksanakan. Kritik para ahli terhadap suatu program yang telah direncanakan, namun dinilai tidak efektif dan terlalu bermuatan politis, akan diminimalisir dalam bentuk negosiasi. Muatan politis yang ada di dalam program pelestarian, harus dilucuti menjadi gejala yang bersifat non-politis. Para ahli yang dilibatkan diarahkan untuk menerjemahkan aspek politis, menjadi sekedar persoalan teknis. Bagi mereka yang menolak pembangunan, maka otomatis tidak akan dilibatkan dalam program PIM.

Seperti diungkapkan oleh seorang akademisi yang pernah dilibatkan pada awal persiapan pembangunan PIM. Keterlibatannya dalam pembuatan konsep pembangunan PIM dimulai sejak diberi tugas untuk membuat *masterplan*. Namun, ia hanya dilibatkan selama tiga bulan. Menarik, ketika namanya tetap tercantum bagian dari tim selama kegiatan sosialisasi.⁹⁹

Program PIM selanjutnya dikawal oleh pihak -baik akademisi maupun birokrat- yang setuju pembangunan tetap berjalan. Terkait itu, pihak BP3 Jawa Timur mendapat kepercayaan untuk menjadi pelaksana di tingkat daerah. Langkah awal yang dipersiapkan adalah pembuatan desain bangunan. Pada tahun 2007, arsitektur bangunan PIM dibuat oleh tim *masterplan* Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Bangunan mengadopsi bentuk arsitektur Jawa, berupa panggung dengan atap bentuk tajuk dan limasan, sehingga tidak memerlukan banyak tiang. Rencana pembangunan PIM diterima oleh Dirjen Sejarah dan Purbakala, namun desain bangunan berubah selama proses persiapan. Desain baru dibuat oleh arsitek Baskoro Tedjo, dengan desain utama berdenah Bintang Surya Majapahit.

⁹⁸Wawancara AS (inisial) pada tanggal 2 Maret 2013.

⁹⁹Wawancara AS (inisial) pada tanggal 2 Maret 2013.

Desain PIM tahun 2007



*Sumber: Dirjen Sejarah dan Purbakala, 2010;
<http://heptadesain.wordpress.com/2009/01/14/desain-trowulan/>*

Pada tanggal 3 November 2008, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata meletakkan batu pertama pembangunan PIM. Sebuah isyarat dari Pak Menteri, agar pelaksana proyek segera memulai pembangunan. Sesuai kesepakatan para ahli sebelumnya, sebelum pembangunan berjalan, harus melalui proses ekskavasi dan penggalian lahan dilakukan secara arkeologis oleh BPCB Jawa Timur.¹⁰⁰ Namun, pembangunan berjalan beriringan dengan proses ekskavasi. Dampaknya, ekskavasi tidak berjalan baik, sebaliknya kerusakan situs semakin meluas.

Pemerintah cenderung memaksa pembangunan untuk terus berjalan. Bahkan, saat itu berkembang adanya informasi tentang manipulasi data yang diberikan oleh oknum BPCB Jawa Timur kepada pemerintah pusat. Data yang diberikan bukan data yang sebenarnya ada di lapangan. Manipulasi dilakukan dengan cara memindahkan sisa-sisa struktur kuno di lahan yang nanti akan menjadi tempat berdirinya pondasi bangunan.

¹⁰⁰ BPCB Jawa Timur. *Taman Majapahit: Revitalisasi Bekas Ibukota Majapahit*. Bahan Paparan BPCB Jawa Timur 2010.

Desain PIM tahun 2008



Sumber: *Dirjen Sejarah dan Purbakala, 2010.*

Pengambilan gambar dilakukan di lubang yang sudah ‘steril’, sehingga cukup meyakinkan kalau di lahan itu memang tidak terdapat struktur kuno. Proses tersebut ternyata diketahui oleh media. Menjadi salah satu *headline* di surat kabar ternama nasional, kasus PIM dibongkar habis bahwa terdapat ketidakberesan dalam pembangunannya.

Merespon pemberitaan tersebut, pemerintah pusat lantas membentuk tim evaluasi untuk mengecek kebenaran di lokasi pembangunan. Tim evaluasi pembangunan PIM dibentuk oleh Direktur Peninggalan Purbakala pada tanggal 5 Desember 2008. Tim beranggotakan; Mundardjito, Daud Aris Tanudirdjo, Arya Abieta, Osriful Oesman, Anam Anis, dan Direktur Purbakala. Berdasarkan hasil pengamatan, tim menyimpulkan bahwa lokasi PIM adalah area padat temuan benda peninggalan Majapahit, untuk itu diperlukan evaluasi terhadap pembangunannya.¹⁰¹

¹⁰¹BPCB Jawa Timur. *Taman Majapahit: Revitalisasi Bekas Ibukota Majapahit*. Bahan Paparan BPCB Jawa Timur 2010.

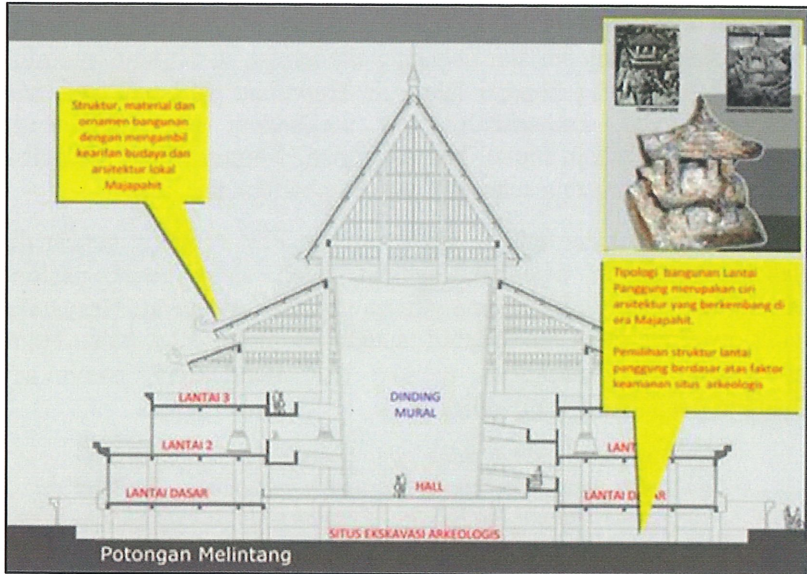
Banyak pihak mempertanyakan posisi pemerintah yang seharusnya bertanggung jawab atas pelestarian di Trowulan, malah sebaliknya menjadi pihak yang ikut melakukan pengrusakan. Sudah seharusnya, pimpinan di tingkat pusat mengetahui kondisi lokasi PIM. Mereka adalah birokrat yang berlatar belakang akademisi, sudah tentu memiliki pengetahuan tentang kondisi lahan di Trowulan. Terlebih lagi, pada awal rancangan, pemerintah turut melibatkan para ahli untuk memberikan masukan model pembangunan. Namun ironis, kesalahan masih tetap berlangsung selama proses pembangunan.

Pemberitaan di media tentang pembangunan PIM semakin gencar dan telah menjadi isu nasional, bahkan salah satu media nasional memberitakan kisruh ini selama satu minggu berturut-turut. Masyarakat sendiri awalnya tidak mengetahui tentang pendirian PIM, kalau bukan dari media. Pada dasarnya, mereka ikut mendukung, hanya saja dibangun pada lokasi yang tepat.

“Masyarakat awalnya tidak tahu kasus PIM, karena warga tidak bisa masuk karena pagarnya rapat sekali. Sebagai warga, saya sangat tidak setuju dengan adanya PIM di situ apapun alasannya. Seharusnya tempatnya jangan disitu dan harus pindah, tidak boleh disiasati oleh dalih apapun.... Menurut saya tempat yang sepi harus dibangun seperti PIM, misalnya di Pakis, bisa mengangkat masyarakat sekitar. Tapi mungkin juga karena di situs tanahnya BP3 jadi prosesnya lebih enak...”¹⁰²

¹⁰² Wawancara IT (inisial) pada tanggal 4 Maret 2013.

Konstruksi Desain Awal



Sumber: *Dirjen Sejarah dan Purbakala, 2010;*
<http://heptadesain.wordpress.com/2009/01/14/desain-trowulan/>

Arsitek Baskoro Tedjo yang terlibat dalam pembangunan PIM turut dikaitkan dalam pemberitaan. Ia dianggap ikut bertanggungjawab atas kesalahan desain bangunan yang digunakan. Menanggapi tuduhan itu, perkumpulan arsitek Institut Teknologi Bandung (ITB) melalui situs resminya ikut mengklarifikasi polemik PIM. Menurut mereka, desain yang dimuat di media adalah desain yang bukan dibuat oleh Baskoro Tedjo, namun desain awal yang dibuat oleh Tim Kementerian. Desain

yang dibuat Baskoro Tedjo sangat meminimalisir kerusakan, dan jauh berbeda dengan desain lama yang mereka anggap lebih merusak.¹⁰³

Baskoro Tedjo setuju mendesain PIM karena beberapa faktor. *Pertama*, karena sebuah pusat informasi itu diperlukan. Sesuai dengan hasil Konferensi UNESCO di New Delhi dari tanggal 5 November sampai 5 Desember 1956. *Kedua*, kerusakan situs di Trowulan sudah sangat masif. Penyelidikan arkeologis (yang biasanya membutuhkan waktu) berkejaran dengan perusakan yang terjadi di sekitarnya. *Ketiga*, terpanggil untuk memberi alternatif terhadap desain bangunan dari Masterplan tahun 2007.

Baskoro Tedjo menduga desain bangunan yang lama dapat berpotensi menimbulkan polemik karena struktur bangunan yang dapat merusak situs. Baskoro Tedjo sempat mengusulkan untuk memindahkan lokasi, namun pada akhirnya situs tetap pada tempat semula karena pemerintah tidak memiliki dana untuk membebaskan lahan lain.¹⁰⁴

Pembangunan PIM memang cenderung menjadi program yang dipaksakan oleh pemerintah. Isu yang berkembang menjadi beragam sekali, dari persoalan anggaran yang harus segera digunakan karena sudah akhir tahun, hingga dugaan politis yang kemudian mengharuskan pembangunan tetap berjalan.

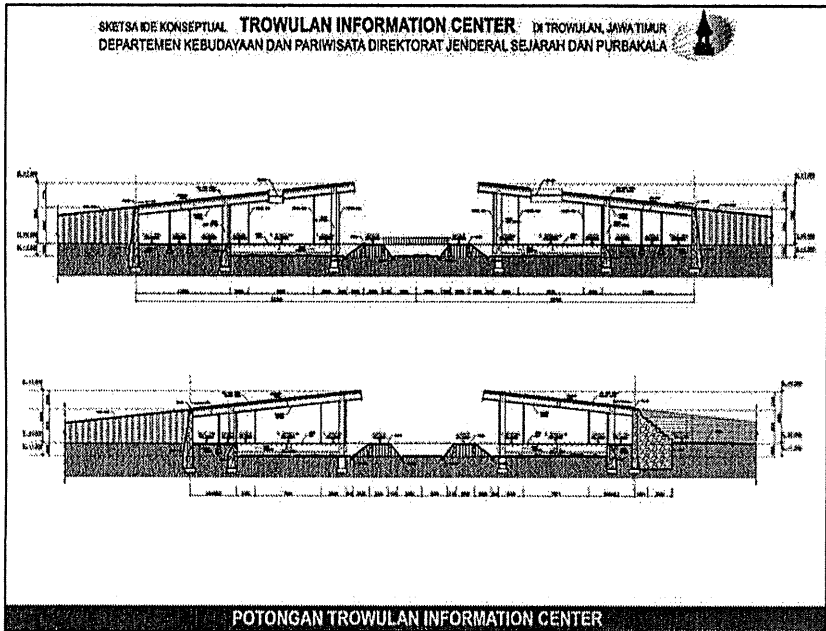
Keinginan untuk terus melanjutkan pembangunan mendapat tanggapan keras dari berbagai pihak. Menanggapi situasi tersebut, pemerintah meminta tim ahli untuk melaksanakan ekskavasi arkeologi tahap II pada titik-titik calon tiang bangunan dengan penamaan kotak gali berukuran 4 meter x 4 meter. Cara itu dilakukan untuk meminimalisir pengrusakan. Namun, karena kegiatan ekskavasi berjalan tetap beriringan dengan pembangunan. Maka, pada tanggal 22 Desember

¹⁰³<http://heptadesain.wordpress.com/2009/01/14/desain-trowulan/>
didownload pada tanggal 19 Oktober 2013, pukul. 13.10 WIB.

¹⁰⁴<http://heptadesain.wordpress.com/2009/01/14/desain-trowulan/>
didwonload pada tanggal 19 Oktober 2013, pukul. 13.10 WIB.

2008, kegiatan pembangunan PIM dihentikan, karena dapat merusak situs yang lebih luas.

Konstruksi Baskoro Tedjo



Sumber: *Dirjen Sejarah dan Purbakala, 2010;*
<http://heptadesain.wordpress.com/2009/01/14/desain-trowulan/>

Berbagai pihak meminta pihak kementerian bertanggung jawab atas dampak pengrusakan situs yang diakibatkan oleh pembangunan PIM. Pada tanggal 21 Januari 2010, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata membentuk Tim Evaluasi PIM, beberapa anggotanya adalah Mundardjito, Soeroso, Daud Aris Tanudirjo, dan Junus Satrio Atmodjo. Tugas Tim Evaluasi adalah melakukan evaluasi teknis arkeologis terhadap pembangunan PIM yang sudah berjalan, menyusun konsep dan rencana Pengembangan PIM, menentukan langkah-langkah

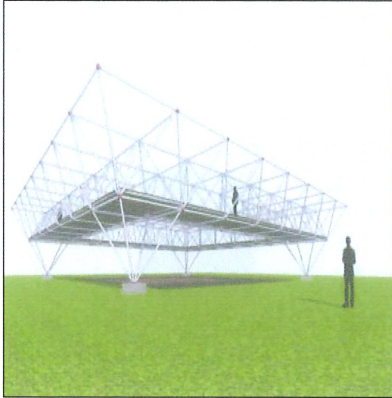
relokasi, rehabilitasi, dan rancang ulang pembangunan PIM di Trowulan sesuai dengan kaidah arkeologi.

Sebagai seorang ketua tim, Mundardjito adalah orang yang pada awalnya menentang pendirian PIM. Pernah menjadi Guru Besar di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, Mundardjito dianggap sebagai bapak Arkeologi Indonesia karena pengalamannya bekerja dan mengabdikan di bidang arkeologi. Pemikirannya hamper sejalan dengan Junus Satrio Atmodjo, ia adalah pakar arkeologi sekaligus birokrat di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Ketika awal perencanaan PIM berlangsung, ia menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Junus Satrio Atmodjo termasuk birokrat yang merekomendasikan tinjauan ulang pembangunan PIM, karena berdasarkan penelitian yang dilakukan di unit kerjanya, pembangunan PIM dapat merusak situs di Trowulan.

Dugaan kami, Mundardjito dan beberapa arkeolog yang tergabung dalam tim evaluasi PIM kedua adalah mereka yang cenderung memiliki pandangan konvensional. Cara pandang mereka telah menentukan arah perbaikan dalam pembangunan PIM. Misalnya, ketika mereka terlibat dalam proses sayembara desain yang baru. Sayembara diikuti oleh lebih dari 100 arsitek. Pemenang sayembara *masterplan* bangunan adalah Ir. Adi Siswanto M.Arch dari Semarang, sedangkan pemenang Model bangunan PIM tahap dua memiliki desain seperti sarang laba-laba.¹⁰⁵

¹⁰⁵Sugih Biantoro dan Endang Turmudi. 2012. *Kajian Ekonomi Politik Pelestarian Tinggalan Majapahit di Kawasan Trowulan*. Jakarta: PT. Gading Prima dan LIPI, hlm. 67.

Gambar
Konsep PIM Tahap 2



Sumber: BPCB Jawa Timur,

Gambar
PIM Tahap 2



Sumber: BPCB Jawa Timur, 2012

Pengunjung dapat melihat sisa-sisa peninggalan Majapahit dari atas bangunan. Dugaan kami, konsep itu nampak mengakomodasi kepentingan dua pandangan arkeologi yang berbeda, tentang boleh tidaknya bangunan didirikan diatas situs. Masyarakat Trowulan sendiri, menyayangkan desain bangunan PIM yang baru, karena tidak mencerminkan simbol atau identitas Majapahit.

Pandangan masyarakat tersebut juga diamini oleh sebagian arkeolog, yang menyatakan bahwa tujuan bangunan seperti ini tidak dapat memberikan informasi yang jelas kepada pengunjung. Sisa-sisa struktur yang telah digali kurang memberikan informasi lengkap objek, karena sudah banyak struktur yang mengalami kerusakan. Bagi mereka, desain PIM yang seperti rencana awal dapat digunakan, yang terpenting adalah penentuan lokasi yang tidak mengandung peninggalan arkeologi.

Ketika proses hukum dalam menyelesaikan persoalan PIM berlangsung, pihak kementerian menetapkan Kepala BPCB Jawa Timur sebagai

pihak yang bersalah. Ia dianggap bertanggung jawab atas tindakan manipulasi data pada awal perencanaan pembangunan. Keputusan bersalah itu, membuat Kepala BPCB Jawa Timur dimutasi ke Jakarta menjadi staf biasa. Namun, tidak butuh lama bagi mantan Kepala BP3 Jawa Timur untuk duduk kembali di posisi strategis. Tidak butuh waktu lama bagi dirinya untuk diangkat kembali menjadi kepala BPCB di daerah lainnya.

Kondisinya memang berbanding terbalik dibandingkan dengan pihak yang pernah menolak pembangunan PIM. Mereka adalah para akademisi dan sebagian birokrat di pemerintahan. Misalnya, Endro Waluyo, pegawai BPCB Jawa Timur yang dianggap membocorkan informasi tentang PIM, dimutasi ke Museum Trinil, Jawa Timur.

Pembangunan PIM kini masih berlangsung. Pihak-pihak yang berperan selama kisruh PIM pertama sudah tidak banyak terlibat. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata nampaknya telah menyerahkan kembali urusan pembangunan kepada BPCB Jawa Timur. Namun, kami meyakini implikasi dari kesalahan pemerintah pada pembangunan PIM telah membangun citra negatif di masyarakat Trowulan. Keraguan besar menghinggapi mereka atas keseriusan pemerintah untuk mengembangkan Trowulan, misalnya dalam pemilihan model bangunan PIM yang tidak mencerminkan simbol Majapahit.

“Misalnya Troloyo, seharusnya identik dengan bangunan Majapahit, juga PIM kenapa tidak dibangun dengan gaya Majapahit, kenapa tidak menyambung dengan konsep Majapahit, nanti warga mengikuti...”¹⁰⁶

Keraguan masyarakat telah membangun sikap ketidakpatuhan dan ketidakdukungan masyarakat terhadap kebijakan pelestarian pemerintah. Seperti penolakan sebagian masyarakat terhadap penetapan Trowulan sebagai kawasan cagar budaya. Penolakan itu mencuat bersamaan dengan kasus pendirian pabrik baja di Trowulan baru-baru ini. Dampak

¹⁰⁶Wawancara IT (inisial) pada tanggal 4 Maret 2013.

lainnya adalah kemunculan berbagai kelompok yang mampu mengenali kepentingan bersama. Misalnya saat ini, semakin banyak NGO yang ingin ‘masuk’ ke Trowulan. Mereka menjadi lembaga yang kritis terhadap kebijakan pemerintah. Pertemuan mereka dengan program pelestarian telah membentuk dasar bagi gagasan dan aksi politik mereka.¹⁰⁷

3.6 Akademisi, NGO, dan Media: Posisi Kritis?

Trowulan adalah warisan budaya dengan cakupan wilayah yang luas. Bekas kota peninggalan Majapahit ini menjadi ruang bagi penelitian para akademisi, baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam lingkup nasional, akademisi yang paling banyak menaruh perhatian terhadap Trowulan adalah para arkeolog. Di Indonesia, hanya ada empat perguruan tinggi yang membuka program studi arkeologi, yaitu Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Universitas Udayana, dan Universitas Hasanuddin. Jadi sudah dapat dipastikan, para arkeolog yang pernah melakukan penelitian di Trowulan berasal dari empat perguruan tinggi tersebut.

Di antara keempatnya, para arkeolog dari Universitas Indonesia dan Universitas Gajah Mada yang paling intens melakukan penelitian di Trowulan. Kondisi itu didukung oleh letak wilayah kampus mereka yang lebih dekat dengan Trowulan dari pada dua perguruan tinggi lainnya. Selain keempat perguruan tinggi di atas, perguruan tinggi seperti Universitas Airlangga di Surabaya dan Universitas swasta lain, baik yang ada di dalam maupun luar Mojokerto juga melakukan penelitian di Trowulan. Namun, mereka mengambil aspek yang berbeda, seperti persoalan sejarah atau geografi kewilayahan.

Para ahli yang sebagian besar dari kalangan akademisi adalah salah satu pihak yang turut berperan dalam upaya pelestarian warisan budaya di Trowulan. Kelompok tersebut, dapat bertindak secara individu, menjadi bagian dari tim bentukan pemerintah, atau berada di bawah

¹⁰⁷Tania Murray Li. 2012, hlm. 49.

naungan perguruan tinggi. Pada tingkat kebijakan, para birokrat tidak dapat melepaskan peran para akademisi ketika merumuskan berbagai program pelestarian. Para akademisi adalah narasumber bagi lembaga-lembaga pelestari pemerintah.

Statemen mereka dapat menjadi acuan bagi berbagai rancangan program pelestarian. Misalnya, hipotesis $9 \times 11 \text{ km}^2$ oleh Nurhadi Rangkuti, yang kemudian dianggap pemerintah sebagai batas kawasan Trowulan. Padahal di kalangan akademisi sendiri, muncul perbedaan pendapat tentang batas kota Majapahit di Trowulan.

Akademisi yang berperan dalam pelestarian warisan budaya di Trowulan, didominasi oleh ilmu-ilmu sosial, terutama arkeologi. Misalnya, pada pembuatan RIA Bekas Kota Kerajaan Majapahit, sebagian besar ahli yang dilibatkan oleh pemerintah saat itu berasal dari kalangan arkeolog. Pendekatan 'situs' yang identik menjadi konsep perlindungan dalam *masterplan* tersebut, patut diduga merupakan andil dari cara pandang para arkeolog yang terlibat.

Lembaga pemerintah seperti Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, banyak menggunakan bantuan para arkeolog, terutama dari Universitas Indonesia dan Universitas Gajah Mada untuk membantu merumuskan berbagai program pelestarian warisan budaya yang bersifat *tangible* (kebendaan). Dalam perumusan RIA Bekas Kota Kerajaan Majapahit, arkeolog dari Universitas Indonesia banyak yang terlibat dalam perumusan, salah satunya adalah Mundardjito yang ketika itu ditunjuk sebagai ketua tim.

Para arkeolog sendiri, memiliki perbedaan cara pandang dalam melihat konsep pelestarian. Salah satu arkeolog dari UGM, mencotahkan perbedaan cara pandang yang muncul dalam pelaksanaan program Penelitian Arkeologi Terpadu Indonesia (PATI) di Trowulan.¹⁰⁸ Pada bulan Juli hingga Agustus 2008, 80 mahasiswa dan 20 pengajar dari empat perguruan tinggi, Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Universitas Udayana, dan Universitas Hasanudin terlibat dalam

¹⁰⁸Wawancara AS (inisial) pada tanggal 2 Maret 2013.

PATI 1 yang seluruhnya didanai oleh Yayasan Hasyim Djojohadikusumo.¹⁰⁹ Empat tahun kemudian, tepatnya pada bulan September 2012, PATI 2 dilaksanakan. Lebih dari 100 arkeolog melakukan penelitian dan eskavasi di Trowulan selama dua minggu. Mereka berasal dari empat perguruan tinggi yang sama di PATI 1. Penelitian kembali dibiayai oleh Yayasan Arsari Djojohadikusumo.¹¹⁰

Menurut salah satu arkeolog yang terlibat dalam PATI, keberlangsungan program itu tidak berjalan dalam persepsi yang sama di antara empat perguruan tinggi. Walaupun dinamakan penelitian terpadu, namun ternyata masing-masing perguruan tinggi memiliki perbedaan persepsi sehingga pelaksanaannya menjadi tidak terpadu.¹¹¹ Para arkeolog dari UI berbeda dengan UGM, Universitas Udayana, maupun Universitas Hasanuddin. Di permukaan terlihat sama, namun di arus bawah ada perbedaan mendasar yang tidak menunjukkan kesatuan, karena konsepnya memang berbeda. Menyiratkan ada keinginan untuk mendominasi pihak yang lain. Dalam kasus PATI, UI memiliki konsep yang berbeda dengan lainnya. Mengingat UI yang menjadi *leader*, maka komplain yang ada disampaikan kepada UGM. Mungkin situasi itu juga berlaku ketika UGM sebagai leadernya, maka komplain akan diarahkan ke UGM.

Hingga saat ini, masyarakat Trowulan masih melihat para arkeolog terlalu sibuk dengan urusannya sendiri. Kegagalan dalam menyampaikan makna baru kepada masyarakat Trowulan mengakibatkan para arkeolog tidak mendapat tempat di kalangan masyarakat. Kondisi

¹⁰⁹Penelitian Arkeologi Terpadu Indonesia (PATI I) 2008 Berhasil Mengungkap Kedaton Majapahit. <http://arkeologi.web.id/articles/berita-arkeologi/49-penelitian-arkeologi-terpadu-indonesia-pati-i-2008-berhasil-mengungkap-kedaton-majapahit>, didownload pada tanggal 25 September 2013 pukul 7.02 WIB.

¹¹⁰100 Arkeolog Ungkap Jejak Kerajaan Majapahit di Trowulan, <http://news.detik.com/read/2012/09/26/224226/2038984/10/100-arkeolog-ungkap-jejak-kerajaan-majapahit-di-trowulan?nlogo>, didownload pada 25 September 2013 pukul 6.55 WIB.

¹¹¹Wawancara AS (inisial) pada tanggal 2 Maret 2013.

tersebut, diakui oleh sebagian para arkeolog yang ingin melakukan ekskavasi di Trowulan, bahwa keberadaan mereka seolah kurang diterima oleh masyarakat setempat. Sudah seharusnya, para arkeolog memberikan alasan jelas dan masuk akal mengapa suatu warisan budaya harus dilestarikan.¹¹²

Selain para akademisi, terdapat berbagai organisasi non-pemerintah (NGO) yang ikut berperan dalam mengawal berbagai program pelestarian warisan budaya di Trowulan. Di antara NGO tersebut, juga memiliki kepentingan berbeda. Bidang-bidang yang mereka tekuni berkenaan dengan perlindungan cagar budaya, kesenian, atau pemberdayaan masyarakat. Salah satu NGO yang dikenal kritis di Trowulan adalah Gotrah Wilwatikta. NGO itu diketuai oleh Anam Anis, yang pernah terlibat ketika kisruh PIM berlangsung. Secara kelembagaan, Gotrah Wilwatikta aktif dalam berbagai pertemuan membahas persoalan di Trowulan. Namun, saat ini keberadaan NGO tersebut, tidak begitu 'vokal' di Trowulan. Bahkan, salah satu anggotanya melahirkan lembaga baru dengan tujuan meneruskan tujuan awal dari Gotrah Wilwatikta.

Ketika kasus pendirian pabrik baja di Trowulan berlangsung tahun 2013, muncul NGO lain yang juga kritis menyikapi persoalan di Trowulan bernama Wilwatikta (Majapahit). NGO tersebut, diketuai oleh Deddy Endarto dan memiliki banyak pendukung di dunia maya. Wilwatikta sempat membuat gerakan penolakan pabrik baja dengan membangun jargon '*Save Trowulan*' sebagai simbol perjuangan mereka.¹¹³ Bahkan mereka berani membuat petisi untuk Presiden.¹¹⁴

¹¹²Daud Aris Tanudirjo. tt. *Warisan Budaya Majapahit Dalam Perspektif Manajemen Sumber daya Arkeologi*. Jurusan Arkeologi, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (*unpublished*).

¹¹³Masyarakat Trowulan menolak dikatakan bahwa gerakan aksi mereka menentang pendirian pabrik baja ditopang oleh Wilwatikta, hanya kebetulan saja tujuan dari masyarakat Trowulan dan NGO ini sama. Hasil Wawancara dengan IT (inisial) pada tanggal 4 Maret 2013.

¹¹⁴Program-program pemerintah merangsang tanggapan politik ketika masyarakat lokal dan LSM pendukung mereka sampai pada analisis kritis

Wilwatikta mendapat dukungan dari Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI), organisasi yang bergerak dalam urusan pelestarian cagar budaya di Indonesia. BPPI bahkan membawa kepentingan Trowulan hingga ke luar negeri untuk memperoleh dukungan dunia internasional. Organisasi yang berada di bawah kepemilikan Hasyim Djojohadikusumo tersebut, juga berperan ketika memasukkan Trowulan sebagai situs yang terancam punah tahun 2013.

NGO-NGO tersebut adalah *shareholder*, walaupun tidak memiliki sumber daya, keinginan untuk terlibat dalam upaya pelestarian di Trowulan cukup besar. Cara kerja mereka sebetulnya sama dengan pemerintah, mengadvokasi masyarakat untuk membentuk suatu cara pandang baru tentang konsep pelestarian. Selain NGO, juga ada *shareholder* lain yang juga menjadi kelompok yang penting di Trowulan, yaitu media. Pendirian PIM dan Pabrik baja mulai diketahui oleh masyarakat luas karena peran media.

Media adalah pihak yang aktif dalam memberitakan informasi ketika muncul persoalan dalam upaya pelestarian di Trowulan. Media dapat mengarahkan opini di kalangan masyarakat, sehingga banyak pihak yang menjadikannya sebagai alat untuk merespon dan mengkritisi berbagai program pelestarian pemerintah.

mereka sendiri mengenai apa sebenarnya persoalan yang menimbu mereka. Lihat Tania Murray Li, *The Will To Improve*, hlm.226.

BAB 4

RUANG KONTESTASI

Belum ada fakta Masyarakat Trowulan adalah keturunan langsung dari orang Majapahit.¹¹⁵ Ketika Raffles mulai menginjak tanah Trowulan, masih sangat sedikit orang yang tinggal di daerah tersebut. Beberapa hipotesis menyatakan bahwa setelah kejatuhan Majapahit, Trowulan berhasil dikuasai oleh Islam, sehingga daerah itu ditinggal penduduknya. Mereka hijrah ke Bali atau daerah lain yang dianggap lebih kondusif. Salah satu penduduk lokal di Trowulan menceritakan bagaimana kakeknya dulu berasal dari Magelang, Jawa Tengah yang hijrah ke Trowulan, Mereka saat itu membuat tempat tinggal dengan mendirikan rumah gubuk.

Semakin lama, banyak kerabat yang datang untuk menetap di Trowulan. Beberapa diantaranya, terkait dengan gejolak pemberontakan yang terjadi di daerah asal.¹¹⁶ Pada tahun 1830 an, Mojokerto masih pantas disebut sebagai sebuah desa, karena belum ada bangunan permanen di sana.¹¹⁷ Kami menduga, saat ini masyarakat Trowulan terdiri dari beberapa kelompok. *Pertama*, adalah masyarakat awal (sekitar 1830). Kelompok masyarakat ini terdiri dari masyarakat kepercayaan, perajin, dan masyarakat Islam (NU). Masyarakat kepercayaan hampir mirip dengan masyarakat 'kejawen', yang selalu

¹¹⁵Kemungkinan sudah ada penduduk antara 1815 sampai 1850, sepertinya yang disampaikan oleh (stuartheim enigma, 413). "Sisa-sisa bata adalah abad pertengahan, tapi ziarah Islam tertanggal antara 1815 dan 1850 dan mungkin telah sengaja disiapkan oleh penduduk setempat untuk mencegah akses ke situs oleh pengusaha lokal Belanda yang tertarik mengamankan batu bata untuk pembangunan pabrik gula mereka"

¹¹⁶Berdasarkan hasil wawancara dengan YD (inisial) pada tanggal 5 Maret 2013.

¹¹⁷Handinoto. *Kebijakan Politik Dan Ekonomi Pemerintah Kolonial Belanda Yang Berpengaruh Pada Morfologi (Bentuk Dan Struktur) Beberapa Kota Di Jawa*. Dimensi Teknik Arsitektur Vol. 32, No. 1, Juli 2004: 19 – 27.

mengkaitkan keyakinannya dengan para leluhur. Masyarakat perajin terkait dengan keahlian membuat kerajinan patung, terakota, dan lainnya yang diwariskan sejak zaman kolonial. Mereka tidak ada hubungannya dengan masyarakat Majapahit yang sudah mahir membuat patung. Masyarakat Islam (NU) memiliki hubungan dengan perkembangan Islam di Mojokerto dan Jombang.¹¹⁸ *Kedua*, adalah masyarakat pendatang, beberapa yang teridentifikasi adalah para perajin batu bata dan mereka yang membentuk berbagai komunitas kesenian.

Bagi masyarakat kepercayaan, perajin, dan komunitas kesenian, keberadaan sisa-sisa peradaban Majapahit di Trowulan begitu penting. Mereka terus berupaya untuk menjaganya, bahkan sengaja dikonstruksi agar dapat bangkit kembali. Upaya mereka tersebut dapat menghadirkan keuntungan bagi mereka, baik kepuasan spritual maupun ekonomi. Sikap resistensi akan diperlihatkan, ketika muncul kelompok lain yang berbeda pandangan dengan mereka. Salah satu contohnya ketika dunia usaha mulai hadir di Trowulan. Apabila kehadiran dunia usaha tersebut, dianggap dapat merusak warisan budaya di Trowulan, maka dengan berbagai cara mereka akan menentangnya.

4.1 Pabrik Baja

Setelah kasus PIM telah berakhir, kini Trowulan kembali dihadapkan pada masalah pembangunan pabrik baja. Sekitar awal bulan Juli 2013, sejumlah warga berunjuk rasa di sekitar lahan seluas 3,6 hektar di Kecamatan Trowulan. Mereka menolak pembangunan pabrik baja yang direncanakan mengambil lokasi di dekat tempat tinggal mereka, Desa Jati Pasar dan Desa Wates Umpak. Alasan penolakan warga karena lokasi tersebut berada di dekat situs Waringin Lawang dan Candi Wates Umpak yang merupakan warisan budaya Majapahit.

¹¹⁸ Peristiwa 1965 membawa dampak terhadap keyakinan masyarakat – masyarakat “dipaksa” untuk memeluk suatu agama yang diakui oleh pemerintah – kecenderungan untuk memilih Islam (hubungan yang baik dengan tradisi dan pengaruh wilayah sekitar, misal Jombang)

Berbeda dengan pembangunan PIM yang didukung oleh pemerintah dan beberapa stakeholder karena dianggap sebagai bagian dari pengembangan situs Trowulan, pendirian pabrik baja adalah murni bisnis. Pembangunan pabrik ini memang di luar perdebatan atau perbedaan pandangan berbagai pihak tentang bagaimana membangun situs Trowulan dan menjaga warisan budaya yang ada di wilayah ini. Pembangunan pabrik ini kemudian ditolak oleh masyarakat karena dianggap bisa merusak situs Trowulan dan juga benda cagar budaya yang ada di dalamnya. Masalah pabrik baja ini perlu disinggung dalam laporan ini bukan saja karena di luar program pelestarian, tetapi juga karena bisa merusak situs.

Awalnya masyarakat mengetahui rencana pembangunan pabrik baja dari sosialisasi yang dilakukan oleh pihak perusahaan, PT. Manunggal Sentral Baja. Nampaknya, sosialisasi bukan dalam rangka meminta pertimbangan masyarakat, karena izin mendirikan bangunan sudah didapatkan pihak perusahaan atas rekomendasi Bupati Mojokerto.¹¹⁹ Sosialisasi lebih ditujukan untuk memastikan dukungan penuh masyarakat atas pendirian pabrik baja. Namun, situasi yang berlangsung adalah penolakan sebagian masyarakat Trowulan. Situasi ini sepertinya tidak dibayangkan sebelumnya oleh perusahaan yang sudah mendapatkan sebagian dukungan dari masyarakat Trowulan lainnya. Sebagian masyarakat mempertanyakan alasan Bupati Mojokerto merekomendasikan izin IMB, padahal lahan tersebut berada di sekitar situs-situs Majapahit. Pada pertemuan tersebut, perusahaan berdalih telah mendapatkan rekomendasi dari pihak BPCB Jawa Timur, yang menyatakan bahwa di lokasi bakal berdirinya pabrik tidak ditemukan situs. Rencananya Dari lahan seluas 3,6 hektar, yang akan digunakan untuk pabrik baja hanya sekitar 0,6 hektar.¹²⁰

¹¹⁹Bappeda Kabupaten Mojokerto: Kami Tak Sembrono. <http://surabaya.tribunnews.com/> 2013/07/19/bappeda-kabupaten-mojokerto-kami-tak-sembrono Didownload pada tanggal 15 September 2013, pukul 15.00 WIB.

¹²⁰Hasil Wawancara dengan NM (inisial) pada tanggal 15 September 2013.

Terkait rekomendasi, pihak BPCB Jawa Timur telah membantahnya, mereka yang sempat bertemu dengan pihak perusahaan sebelumnya, hanya memberikan informasi tentang status pabrik lama di lokasi pendirian.¹²¹ Bantahan ini sendiri bertolak belakang dengan hasil investigasi dari tim ahli cagar budaya, yang mendapatkan bukti keterangan surat yang berisi tidak dipersoalkannya pendirian pabrik baja oleh BPCB Jawa Timur.¹²² Terlepas benar tidaknya informasi tersebut, pihak BPCB Jawa Timur sendiri menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk melarang pendirian pabrik, karena hingga sekarang Trowulan belum ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya, baik oleh pemerintah daerah maupun pusat.

Berbagai macam cara dilakukan perusahaan agar proyek ini tetap berjalan, salah satunya melalui pemberian sejumlah materi kepada masyarakat yang mau mendukung mereka. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari tokoh masyarakat setempat, Dusun Jati Sumber ditawarkan kompensasi berupa materi dengan jumlah yang besar untuk mendukung pendirian pabrik. Dalam jangka waktu yang relatif singkat, sebagian besar aparat Desa Jati Pasar memberikan dukungan kepada perusahaan.¹²³ Dari 3,6 hektar lahan pabrik, sekitar 90% berada di lahan Desa Jati Pasar. Namun, ternyata upaya ini tidak berhasil diterapkan di Dusun Jati Sumber, Desa Wates Umpak. Walaupun, hanya sekitar 10% lahan pabrik baja berada di lahan desa tersebut, menurut masyarakat Dusun Jati Sumber, dampak pencemaran yang diakibatkan limbah pabrik lebih dirasakan Dusun Jati Sumber daripada Desa Jati Pasar.

Selain menggunakan pendekatan materi dengan jumlah yang relatif besar, perusahaan menebar janji untuk memberikan pekerjaan kepada

¹²¹Pembangunan Pabrik Baja di Trowulan dihentikan. <http://national-geographic.co.id/berita/2013/07/pembangunan-pabrik-baja-di-trowulan-dihentikan>. Didownload pada tanggal 15 September 2013, pukul. 15.15 WIB.

¹²²Hasil wawancara dengan salah satu tim ahli cagar budaya, NJ (inisial) pada tanggal 20 November 2013.

¹²³Wawancara dengan NM (inisial) pada tanggal 15 September 2013.

masyarakat di pabrik yang akan didirikan. Upaya ini kembali menemui kegagalan, karena masyarakat Dusun Jati Sumber tetap menolaknya. Berdasarkan keterangan sebagian masyarakat Dusun Jati Sumber, mereka sadar betul bahwa mereka tidak memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, keahlian mereka sebagai perajin patung, terakota, ataupun seniman jelas tidak sesuai dengan jenis pekerjaan yang akan diberikan perusahaan. Bila pada akhirnya, tawaran pekerjaan ini mereka terima, mereka hanya akan ditempatkan pada posisi-posisi rendah dalam pabrik.

Sebagian besar masyarakat Dusun Jati Sumber bekerja sebagai perajin dan seniman. Hasil-hasil patung karya perajin dan karakter seni pertunjukan yang ditampilkan oleh seniman identik dengan simbol-simbol Majapahit. Trowulan adalah tempat mereka mencari kehidupan, membentuk ruang budaya yang identik dengan Kemajapahitan. Apabila ditengah-tengah lingkungan mereka berdiri pabrik dengan skala besar, maka dapat merusak identitas Trowulan sebagai kawasan budaya, dan secara tidak langsung mengganggu aktivitas ekonomi mereka.¹²⁴

DPRD sendiri sudah merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Mojokerto menghentikan proses pemberian izin karena cacat hukum. Memang secara hukum ada kesalahan yang terjadi ketika Izin HO (Izin Gangguan) belum beres namun IMB sudah sudah keluar. Namun memang, pemberian izin yang telah diberikan Pemkab Mojokerto

¹²⁴Dalam salah satu aksi unjuk rasa, masyarakat menampilkan teatrikal yang menggambarkan rakyat jelata yang setia pada kerajaan, namun kehidupan makmur mereka diresahkan oleh pendatang, yakni pemilik PT Sentral Manunggal Baja, Sundoro Sasongko. Masyarakat yang resah lantas mengadu ke kerajaan. Patih Gajah Mada yang diutus kerajaan, segera membawa kereta kencana dan bala tentara ke lokasi pembangunan pabrik. Patih tersohor ini mengamuk dan seolah menggagalkan pembangunan pabrik itu. Lihat *Pembangunan Pabrik Baja di Aera Situs Majapahit Didemo*. [http://news.detik.com /read/2013/07/19/141855/2308075/475/pembangunan-pabrik-baja-di-area-situs-majapahit-didemo](http://news.detik.com/read/2013/07/19/141855/2308075/475/pembangunan-pabrik-baja-di-area-situs-majapahit-didemo) didownload pada tanggal 15 September 2013, pukul. 15.20 WIB. Situasi yang menggambarkan kontruksi yang kuat masyarakat Trowulan dengan Majapahit di Trowulan.

sendiri tidak terlepas dari otonomi daerah yang memberi kewenangan pemerintah kabupaten mengeluarkan izin prinsip. Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah mengeluarkan izin gangguan pendirian perusahaan industri pengecoran besi dan baja melalui Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Pemkab Mojokerto pada 14 Juni 2013 lalu. Surat izin itu juga disertai pernyataan bahwa jika dalam waktu 10 hari sejak terbitnya pemberian izin tidak ada keberatan dari masyarakat, maka permohonan dianggap tidak ada masalah. Namun, masyarakat baru mengetahui izin tersebut setelah lewat 10 hari dari tanggal penerbitan izin.

Pihak perusahaan menyatakan bahwa pada tahun 1970-an pernah berdiri sebuah pabrik di lokasi yang sama, sehingga menurut mereka tidak akan menjadi sebuah persoalan. Data ini juga didukung oleh Kepala BPCB Jawa Timur yang menyatakan bahwa di atas lahan tersebut pernah dibangun pabrik atas nama PT Pembangkit Ekonomi Desa yang sudah ada sejak tahun 1970-an bergerak di bidang pengolahan hasil pertanian.¹²⁵ Bagi masyarakat, khususnya Dusun Jati Sumber, itu bukanlah justifikasi kuat untuk kemudian mendirikan pabrik baru di lokasi yang sama. Bagi masyarakat, bangunan yang pernah berdiri tahun 1970-an belum bisa dikatakan sebagai sebuah pabrik karena skalanya yang tidak besar. Jenis usahanya pun tidak menghasilkan limbah yang dapat mencemarkan lingkungan, berbeda dengan usaha pabrik baja.¹²⁶

Bupati Mojokerto memiliki latar belakang sebagai pengusaha. Kedekatannya dengan pemilik PT. Sentral Manunggal Baja tentu dapat dipahami sebagai relasi antara pengusaha. Sebuah pabrik baja membutuhkan berbagai macam alat berat, dan untuk memudahkan akses transportasinya maka dibutuhkan ruas jalan yang lebar. Jalan

¹²⁵Situs Trowulan jadi Pabrik Baja. <http://nationalgeographic.co.id/berita/2013/07/situs-trowulan-jadi-pabrik-baja> Didownload pada tanggal 15 September 2013, pukul. 15.40 WIB.

¹²⁶ Wawancara dengan NM (inisial) pada tanggal 15 September 2013.

Surabaya – Jombang dapat dikatakan memenuhi syarat untuk kondisi tersebut.¹²⁷

Di sisi lain, penolakan oleh masyarakat terhadap pendirian pabrik baja, tidak menyiratkan bahwa mereka telah menutup akses bagi dunia usaha -dan nilai-nilai kapitalisnya- untuk masuk ke Trowulan. Pandangan ini dapat dibuktikan, ketika masyarakat mendukung pendirian hotel besar ‘Sun Palace’ di Trowulan pada tahun 2013. Berbeda dengan pabrik, pembangunan hotel dapat mendukung sektor pariwisata di Trowulan, masyarakat pun secara tidak langsung diuntungkan dengan banyaknya wisatawan yang berkunjung.

Seperti dijelaskan sebelumnya, peran NGO dan organisasi pecinta warisan budaya terlihat nyata ketika mereka bersama-sama masyarakat melakukan aksi unjuk rasa penolakan panrik baja. BPPI membawa masalah pembangunan pabrik baja di sekitar situs Trowulan dalam pertemuan *The 15th International Conference of National Truts di Entebbe*, Uganda, Afrika, 30 September – 4 Oktober 2013. Dalam konferensi tersebut, Ketua BPPI, mempresentasikan ancaman pendirian pabrik baja di Trowulan. Menurutnya, masyarakat pelestari pusaka dunia ikut prihatin dengan persoalan Trowulan yang kemudian ikut menandatangani petisi online “Save Trowulan”.¹²⁸

Berbagai cara dilakukan oleh pihak-pihak yang menolak pendirian pabrik baja. Petisi dianggap sebagai salah satu jalan keluar agar pemerintah mau turun menanggapi persoalan pendirian pabrik baja ini. Petisi yang salah satunya ditujukan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan segera ditanggapi oleh lembaga pemerintah tersebut, di antara beberapa poin tanggapan:

“Rekomendasi dari Tim Ahli Nasional Cagar Budaya sebagai bagian dari proses penetapan Trowulan sebagai Kawasan Cagar Budaya Nasional telah disusun (amanat dari

¹²⁷Wawancara dengan NJ (inisial) pada tanggal 20 November 2013.

¹²⁸Lihat *Dunia Minta Trowulan Diselamatkan*, Kompas, 3 Oktober 2013.

UU RI No 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya). Rekomendasi tersebut akan dijadikan dasar oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk menetapkan Trowulan sebagai Kawasan Cagar Budaya Nasional dalam waktu dekat.”¹²⁹

Berdasarkan tanggapan dari pemerintah diatas, nampaknya mereka sadar bahwa status Trowulan yang belum ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya menjadi salah satu faktor penyebab sulitnya mengatasi persoalan pabrik baja. Setelah melewati upaya ‘negosiasi’ dari pihak perusahaan yang bahkan rela untuk datang ke Jakarta, pihak Kementerian Pendidikan dan kebudayaan bersama Gubernur Jawa Timur, membuat keputusan agar upaya pembangunan pabrik baja dihentikan.

Untuk menyikapi persoalan tersebut selanjutnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bertindak represif dengan menjalani serangkaian kajian untuk mempercepat proses penetapan Trowulan sebagai kawasan cagar budaya. Sejalan dengan upaya tersebut, muncul aksi unjuk rasa berskala lokal oleh ratusan warga Desa Jati Pasar, menolak rencana pemerintah menetapkan Trowulan sebagai kawasan cagar budaya. Mereka beralasan dengan penetapan status kawasan cagar budaya, banyak warga di Trowulan yang akan terancam kehilangan pekerjaan sebagai petani dan pembuat bata. Seperti pernyataan koordinator unjuk rasa, Mulyadi:

“Kalau pemerintah menetapkan Trowulan sebagai kawasan cagar budaya, apa pemerintah siap menanggung biaya hidup warga di Trowulan, yang membuat bata merah. Jangan karena usulan segelintir orang saja, pemerintah lalu menyengsarakan masyarakat umum...”¹³⁰

¹²⁹Tanggapan pemerintah atas petisi yang dibuat oleh organisasi masyarakat peduli Majapahit 23 Juli 2013.

¹³⁰Warga Tolak Trowulan Jadi Cagar Budaya. [http://dutaonline.com / 07/11/2013/warga-tolak-trowulan-jadi-cagar-budaya/download](http://dutaonline.com/07/11/2013/warga-tolak-trowulan-jadi-cagar-budaya/download) pada tanggal 13 November 2013, pukul. 15.50 WIB.

Dalam unjuk rasa tersebut, masyarakat yang mayoritas berasal dari Desa Jati Pasar meminta Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa untuk memberikan izin pembangunan pabrik baja di Trowulan. Menurut mereka, berdirinya pabrik akan mampu menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar. Pernyataan pejabat tentang Trowulan yang harus steril dari segala bentuk kegiatan termasuk industri membuat resah masyarakat. Penetapan Trowulan sebagai kawasan cagar budaya dianggap dapat merugikan masyarakat, karena ruang gerak aktivitas masyarakat terbatas dengan kawasan situs purbakala. Aktivitas yang sedang berlangsung saat ini saja masih dianggap masyarakat belum memberikan kesejahteraan.

Sejak pendirian pabrik baja menjadi kontroversi, masyarakat di Trowulan terpecah menjadi dua kelompok. Bagi kelompok yang menolak, pendirian pabrik dikhawatirkan mengancam situs dan menyebabkan polusi. Di lain pihak, masyarakat yang pro, beralasan pendirian pabrik dapat membuka lapangan pekerjaan. Perbedaan kepentingan ini, patut diduga sebagai akumulasi dari konsekuensi pengaturan Trowulan oleh pemerintah yang belum berhasil. Selama ini masyarakat Desa Jati Pasar mungkin saja belum mendapatkan keuntungan dari Trowulan dengan berbagai program pelestarian yang dijalankan oleh pemerintah.

Bahkan sebaliknya, aturan-aturan pemerintah telah membatasi gerak mereka dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Keberhasilan politik uang dalam konteks mempengaruhi tindakan tertentu, akan semakin besar bila ditunjukkan kepada mereka. Berbeda dengan masyarakat Dusun Jati Sumber, yang mampu melakukan rekonstruksi Trowulan sebagai ruang budaya dengan mempertahankan identitas dan simbol-simbol Majapahit. Selain halnya juga menjadikan Trowulan sebagai ruang ekonomi, dengan menggunakan simbol-simbol tersebut untuk menambah nilai jual produk-produk kerajinan dan kesenian mereka.

4.2 Para Pencinta Majapahit

Masyarakat Mojokerto memang beragam dalam menjawab atau merespon isu pelestarian dan pengembangan kebudayaan Majapahit. Selain mereka yang umumnya menerima dan bahkan mendukung, di Mojokerto terdapat juga orang-orang terkesan berlebihan dalam menanggapi upaya pelestarian situs Majapahit di Trowulan. Mereka adalah orang-orang yang menginginkan Majapahit kembali hidup, meskipun secara fisik mereka merasakan kesulitan untuk merealisasikannya. Mereka mengharapkan Majapahit, setidaknya secara kultural bisa hidup kembali di tengah Masyarakat Indonesia modern, terutama di daerah Mojokerto.

Budhi adalah seorang Jawa yang memimpikan kembalinya Majapahit tersebut. Meskipun alasan Budhi kadang tidak begitu kuat dan tidak masuk akal, mimpi kembalinya Majapahit tadi telah lama menjadi obsesinya. Itulah sebabnya dia kemudian mendirikan suatu kelompok yang dia namai “Relawan Majapahit”. Organisasi atau perkumpulan yang baru dia dirikan beberapa tahun belakangan ini mendapat sambutan sebagian kecil masyarakat Mojokerto yang kemudian menjadi anggotanya. Mereka kelihatannya mempunyai ide yang sama, yaitu bukan saja mendukung pelestarian atau konservasi benda-benda cagar budaya dan memelihara situs Majapahit pada umumnya, melainkan juga menghidupkan kembali Majapahit itu sendiri. Dia menyebutnya dengan nama Majapahit II yang harus dibangun kembali di Mojokerto.

“Saya berharap betul agar Majapahit II bisa lahir muncul kembali di Mojokerto. Kebesaran Majapahit telah tercatat dalam sejarah. Akan tetapi, harapan untuk lahirnya kembali Majapahit tersebut agaknya masih banyak hambatan.”

Demikian ungkap Budhi ketika diwawancarai oleh penulis. Meskipun Budhi adalah seorang Muslim, kebanggaannya terhadap Majapahit tetap tertanam di dalam hatinya. Lebih lanjut Budhi mengatakan bahwa harapan seperti itu terutama muncul pada masyarakat Hindu Bali yang

merasa leluhurnya ada di Mojokerto. Orang seperti Budhi memang bermunculan termasuk di daerah Trowulan sendiri, karena mereka mempunyai keinginan kuat untuk menghidupkan kembali kebudayaan Majapahit yang dengan demikian diharapkan akan memberi kesejahteraan pada masyarakat lokal. Dengan hidupnya kebudayaan Majapahit, maka kesejahteraan masyarakat lokal akan meningkat karena hadirnya Majapahit ini dapat mendorong kalangan Hindu untuk berziarah ke Trowulan, yang berarti juga mendatangi Mojokerto. Menurutny sudah banyak anggota masyarakat Bali yang mengadakan ritual di Trowulan.

Konon Budhi pernah mengusulkan kepada Bupati untuk membuat replika Majapahit. Usulan Budhi ini disetujui oleh Bupati, sehingga dia kemudian mendatangi Menteri Pariwisata dan mendiskusikan keinginannya tersebut bersama Bupati. Upaya-upaya ini dilakukan Budhi, terutama ketika kepemimpinan negara dipegang oleh Megawati. Menurut Budhi, dia berharap sekali bahwa kelahiran Majapahit II tadi disertai dengan segala kemajuannya, termasuk dibangunnya kembali berbagai pura di wilayah Mojokerto dengan maksud agar masyarakat Mojokerto sejahtera, karena menurutnya, didirikannya berbagai pura tadi, akan secara otomatis mengundang datangnya masyarakat Bali dari yang tua sampai yang muda berkunjung ke Mojokerto.

Banyaknya kunjungan tadi, dalam harapan Budhi, akan ikut mensejahterakan orang-orang Mojokerto. Cindera mata akan berkembang sesuai dengan kebutuhan para turis. Dengan demikian, ekonomi Mojokerto akan ikut berkembang sejalan dengan perkembangan turisme tersebut. Akan tetapi, Budhi merasakan masih banyaknya orang yang tidak setuju dengan idenya, terutama orang-orang yang seakan-akan “Islam betul” (maksudnya kalangan Islam santri). Menurut Budhi kekhawatiran kalangan Islam tadi berkaitan dengan berkembangnya agama Hindu yang seolah terfasilitasi oleh berkembangnya turisme tadi. Orang seperti Budhi memang tidak mempersoalkan masalah-masalah agama, karena yang dia inginkan adalah berkembangnya kesejahteraan yang bisa dimunculkan melalui perkembangan kebudayaan atau khususnya turisme.

Hubungan antara pariwisata dan peningkatan kesejahteraan pastilah ada. Pikiran praktis yang dimiliki oleh orang seperti Budhi adalah bahwa perekonomian dalam masyarakat Trowulan dan Mojokerto pada umumnya bisa diperbaiki dengan mengembangkan pariwisata di daerah tersebut, mengingat melalui bidang lain hal tersebut terasa agak sulit dilakukan. Tetapi untuk membuka dan mengembangkan pariwisata tersebut sederet persyaratan harus dipenuhi, yaitu hadirnya objek-objek wisata yang berasal dari warisan budaya Majapahit. Dengan demikian, para perencana haruslah melihat kembali keagungan Majapahit, lalu membuatnya hal ini seperti berujud lagi sekarang. Budhi menegaskan bahwa dengan warisan budaya yang ada, orang-orang dari luar Mojokerto akan datang melihatnya meskipun hanya berupa budaya tak bergerak.

Seperti sudah disebutkan di atas, Budhi memang tidak sendirian dalam hal ide mengembangkan kebudayaan Majapahit itu. Di Mojokerto juga terdapat sejumlah LSM yang juga mempunyai ide yang mirip dengan ide Budhi. Kepala Desa Trowulan yang kebetulan memimpin Desa di wilayah situs Majapahit, misalnya, ternyata mempunyai angan-angan seperti Budhi. Menurutnya, dengan datangnya orang-orang asing yang beragama Hindu ke Trowulan, maka dengan sendirinya akan menyediakan banyak kegiatan mulai dari mengembangkan bisnis sampai pada hal lainnya yang dilakukan oleh masyarakat Trowulan sendiri. Kades ini yakin sekali bahwa orang-orang India akan mendatangi Trowulan jika di sana dibangun banyak pura karena Trowulan bagi orang Hindu adalah tempat agama Hindu dikembangkan di Nusantara dan bahkan pernah menjadi pusat agama Hindu.

“...Pura, saya ingin pura besar didirikan di Trowulan, untuk kasus pendirian pura ada yang menolak orang-orang di sekitar itu... Bali ingin setengah mati mendirikan pura di Trowulan, saya suruh mengambil contoh wihara, dulu tidak dibicarakan sebesar itu, kalau penolakan idealisme agama itu tidak masuk akal, misalnya kalau Wihara, tidak ada satu pun yang bergeser menjadi Buddha, tp kenapa ditakutkan? Pembangunan wihara, ekonomi menambah untuk masyarakat, pernah ada teman Bali, bisa dibangun

di Bejjong sekitarnya dulu karena disini mendukung, yang menolak hanya di Desa Trowulan. Tahun baru, wihara ramai, ekonomi masyarakat sekitar meningkat, parkir, minta kegiatan apa, minta bantuan apa bisa diberikan...¹³¹

Majapahit memang telah menginspirasi orang seperti Budhi yang punya keinginan untuk membangunnya kembali dengan nama Majapahit II. Menurut kerajaan ini begitu besar dan telah memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Pada masa Majapahit, menurut Budhi, telah berkembang juga agama lain seperti Islam, di mana masyarakatnya hidup berdampingan. Apa yang penting dalam kehidupan Majapahit adalah tumbuhnya toleransi antara pemeluk agama saat itu, sehingga kehidupan “*gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kertoraharjo*” yang menggambarkan kesejahteraan telah dicapai di zaman itu. Oleh karena itu, membangun kembali Majapahit adalah upaya yang harus diperjuangkan agar bisa memperkuat toleransi yang tidak mudah dilakukan oleh anak bangsa sekarang ini.

Toleransi yang membawa kerukunan adalah keharusan, karena kerukunan umat beragama pasti akan membawa kesejahteraan, karena dengan kerukunan berarti bukan saja tidak ada kebencian tetapi juga di sana akan ada saling mendukung antar umat beragama. Karena kerukunan adalah kunci bagi hidupnya keberagaman dalam beragama, dan keberagaman adalah bagian penting bagi pengembangan kebudayaan dan pengembangan kebudayaan adalah faktor penting bagi kesejahteraan, maka orang-orang seperti Budhi mengharapkan dibuatnya peraturan yang lebih longgar agar pendirian tempat-tempat ibadah bisa dipermudah. Pembatasan-pembatasan yang ada, dalam penilaian Budhi, adalah indikasi tidak rukunnya umat beragama karena di sana terdapat upaya-upaya untuk menghambat atau bahkan menjatuhkan agama lain.

Lebih jauh Budhi menjelaskan bahwa Majapahit bukanlah negara kaya, tetapi dalam Majapahit tergambar adanya kebesaran yang diciptakan

¹³¹Wawancara IT (inisial) pada tanggal 4 Maret 2013.

oleh masyarakatnya yang cerdas. Lebih dari itu, apa yang perlu diciptakan sekarang sebagai replika kecerdasan itu adalah diberikannya kebebasan dan toleransi dalam perbedaan yang dulu menandai kebesaran Majapahit. Perbedaan dalam bidang agama adalah salah satu saja dari indikator yang mempengaruhi kebesaran Majapahit. Konon saat itu perbedaan agama cukup dihargai atau setidaknya dibiarkan ada, karena saat itu meskipun Hindu menjadi agama masyarakat dan mungkin juga agama negara, Islam telah berkembang dan dibiarkan perkembangannya sedemikian rupa.

Dengan kenyataan seperti itu, menurut Budhi, maka sebetulnya keragaman keagamaan seperti itu harus juga dibiarkan berkembang sekarang di Trowulan ini. Lebih-lebih, keragaman itu juga akan menjadi daya tarik para wisatawan atau penziarah, yang ingin melihat warisan atau gambaran Majapahit yang berada di Trowulan itu. Dengan hadirnya pura di sekitar Trowulan, mereka yang berasal dari Bali yang merasa punya hubungan historis dengan Trowulan sebagai ibu kota Majapahit akan datang ke desa kecil di wilayah Mojokerto ini. Bahkan dimungkinkan mereka yang berasal dari India akan juga mengunjungi Trowulan, sebagai daerah yang dulunya merupakan tempat berkembangnya agama Hindu. Dengan kata lain, dalam pandangan Budhi, Trowulan akan menarik mereka yang beragama Hindu untuk datang ke sana sebagai bagian dari kegiatan religius, seperti halnya orang Islam mengunjungi Mekkah.

Trowulan sendiri, menurut kadesnya, adalah desa mati, karena secara ekonomi tidak menghasilkan apa-apa. Sejauh ini, masyarakat desa di sini sangat membantu BP3 dalam upaya mengembangkan atau menjaga warisan budaya Majapahit. Oleh karenanya, desa ini harus dibangun melalui pariwisata, mengingat secara jujur diakui bahwa Trowulan belum memberikan manfaat apa-apa bagi masyarakatnya. Pembangunan bangunan-bangunan milik pemerintah di sana terkadang juga dengan mengabaikan tenaga kerja lokal yang sebenarnya sangat membutuhkan pekerjaan. Jadi, masyarakat tentu saja sudah memberikan dukungan bagi upaya pelestarian, tetapi kalau hanya mendukung saja hal tersebut tidak juga menyelesaikan masalah, karena

mereka dari sisi lain harus meningkatkan taraf dan kehidupan ekonominya.

Pada tahun 1970an, banyak orang Trowulan memproduksi bata merah. Keahlian yang turun temurun itu sekarang sudah jauh menurun, karena di samping adanya aturan, yang meminta masyarakat supaya tidak menggali tanah agar benda-benda cagar budaya yang mungkin ada di bawahnya tidak tergores atau rusak karena galian, juga karena kualitas tanah di Trowulan sebenarnya sudah menurun. Dengan demikian, maka produksi bata merah yang biasa disebut sebagai linggan itu makin menurun jumlahnya. Penurunan ini jelas ikut menurunkan perekonomian masyarakat yang kebanyakan hidup dari kegiatan produksi ini, sehingga dengan demikian banyak tenaga yang kemudian menganggur.

Menurut kades Trowulan, pengangguran di desanya cukup besar, karena tanah di sini sudah tidak produktif lagi bagi pengembangan usaha. Untuk pengembangan produksi bata saja, orang Trowulan mendatangkan tanah dari tempat lain. Sementara pertanian yang bertumpu pada pananaman padi sudah sejak lama tersingkir oleh hadirnya tebu yang dari sisi irigasi tidak berkembang, karena tebu memang tidak memerlukan air sebanyak padi. Kades Trowulan lebih jauh menegaskan bahwa sisa yang ada yang bisa mendorong pengembangan ekonomi desanya adalah pariwisata dan khususnya wisata religi. Dengan melihat sejarah Majapahit yang bercokol di Trowulan dan sekaligus menjadikan wilayah ini dulunya sebagai tempat atau pusat agama Hindu, maka wisata religi yang mungkin, dalam pandangan Kades, adalah dengan mengembangkan simbol-simbol kehinduan dengan mana masyarakat Hindu yang berasal dari berbagai negara bisa berziarah ke Trowulan.

Meskipun demikian, kehati-hatian menurutnya perlu diberikan karena dengan harapan seperti ini akan muncul orang-orang yang menggunakan agama Hindu dan simbol-simbolnya untuk kepentingan pribadi. Hal seperti ini memang terjadi, misalnya dengan hadirnya Pak Suryo yang mengaku sebagai raja Majapahit ke X yang kemudian

mendirikan pura di sekitar kolam segaran. Pembuktian Hyang Suryo sebagai keturunan Raja Majapahit terakhir dibuktikan dengan silsilah keluarga kerajaan yang ia miliki. Bahwasanya apa yang ia yakini merupakan sebuah kebenaran sejarah. Mengenai sejarah Majapahit sendiri ia cenderung memiliki versi yang berbeda pada umumnya. Terutama sejarah yang berasal dari para akademisi. Hyang Suryo percaya pada tradisi dan keyakinan leluhur Majapahit. Dari situlah kemudian ia melahirkan apa yang dinamakan sebagai agama Majapahit, keyakinan yang eksis di puranya.

Keyakinan Hyang Suryo banyak mendapat tentangan dari masyarakat sekitar. Dari keyakinan ia sebagai keturunan Majapahit, ajaran-ajarannya, hingga pendirian pura. Niat Hyang Suryo untuk mendirikan Pura mendapat penolakan dari masyarakat sekitar. Cerita diawali, sekitar tahun 1997 ketika Hyang Suryo membeli rumah dari warga setempat. Hyang Suryo lantas membangun pura di belakang rumah tersebut, sedangkan di depannya dibangun menara dan gapura. Saat itu dan mungkin hingga sekarang, itu adalah satu-satunya pura yang ada di Trowulan.

Beberapa kali masyarakat melakukan protes kepada Hyang Suryo. Sebagai catatan, banyak pondok-pondok pengajian di Trowulan, karena mayoritas masyarakat adalah Islam NU. Alasannya pendirian Pura oleh Hyang Suryo tidak berdasarkan ketentuan pendirian tempat ibadah (SKB tiga menteri). Ajaran Hyang Suryo memang identik dengan agama Hindu, ia juga dikaitkan dengan pemuka agama di Bali. orang-orang yang sembahyang di pura yang sebagian besar berasal dari luar Trowulan, seperti Surabaya, Bali, dan Jakarta.

Melalui negosiasi dengan masyarakat sekitar dan pemuka agama, akhirnya tercapai sebuah kesepakatan yang didapat antara kedua belah pihak yaitu Pura Majapahit tetap diperbolehkan berdiri asal jangan dibuka untuk umum. Keberadaan pura dapat diterima apabila tidak ada umat yang menggunakannya, terutama dari luar Trowulan. Sampai saat ini, pura masih berdiri walaupun sudah jarang pengunjung yang datang. Pura nampak sudah ditutup sebagai tempat ibadah umum, dan hanya

digunakan oleh orang-orang tertentu yang kemungkinan kerabat dari Hyang Suryo. Kondisi saat ini, Hyang Suryo memiliki sekitar 3 anak buah yang membantunya untuk mengurus Pura Majapahit.¹³²

Menurut pembantunya, Hyang Suryo sangatlah sibuk dengan kegiatannya, beliau dipanggil kemana-mana di setiap daerah di Indonesia untuk mengajarkan keyakinannya.¹³³ Hyang Suryo menganggap bahwa apa yang dilakukannya bukanlah berdasarkan pada keyakinan satu agama saja, namun semua keyakinan dapat masuk ke dalam Pura majapahit. Karena pura ini melambangkan kemajapahitan, simbol kebangsaan dan persatuan kesatuan di antara berbagai pemeluk agama dan keyakinan.

Menurut kades Trowulan, klaim Pak Suryo tersebut adalah bualan yang tidak punya dasar. Karena tidak berdasar itulah, maka tidak ada yang mengakuinya sebagai keturunan Raja Majapahit. Hal seperti ini bisa terjadi juga di masa mendatang. Hanya memang menjadi pertanyaan kenapa kalangan Hindu tidak secara tegas menyatakan bahwa pak Suryo tidaklah mewakili kepentingan penganut Hindu.

Pembangunan pura oleh Hyang Suryo memang mendapat tentangan dari masyarakat sekitar, namun tidak sedikit masyarakat yang beranggapan bahwa penolakan itu sepantasnya tidak dilakukan. Terutama bagi mereka yang memiliki kecenderungan keyakinan yang

¹³² Wawancara dengan RSG (inisial) pada tanggal 27 Juni 2012. Ia diberikan kepercayaan oleh Hyang Suryo untuk mengurus Pura Majapahit yang terletak di Trowulan. Romo berasal dari Sidoarjo, Jawa Timur. Beliau terlibat dalam kepemimpinan sejak Pura Majapahit berdiri hingga saat ini. Selain itu, ada juga pegawai Hyang Suryo yang lain bernama Bapak Aam asal Surabaya, namun tergolong baru karena hanya satu tahun lebih bekerja dengan Hyang Suryo. Hyang Suryo sendiri sulit sekali ditemukan, beliau memiliki tempat tinggal tidak hanya di Trowulan, bahkan beliau lebih sering menetap di Bali. Di Bali, Hyang Suryo juga memiliki Pura Majapahit.

¹³³ Menurut Hyang Suryo, ditutupnya Pura Majapahit membawa hikmah tersendiri bagi dirinya. Dirinya kerap dipanggil ke luar daerah di Indonesia bahkan ke luar negeri (Surat Kabar Warta Bali, 5 Februari 2003).

sama dengan Hyang Suryo. Berdasarkan pengamatan penulis, cukup banyak masyarakat yang tergolong sebagai “kelompok kepercayaan” menetap di Trowulan. Yang menarik banyak di antara mereka yang berasal dari luar Trowulan.

Banyak candi-candi di Trowulan yang menjadi tempat pemujaan baru bagi masyarakat kepercayaan. Misalnya, Candi Tikus yang sering dijadikan tempat pemujaan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar dan luar, terutama umat Hindu dan Buddha dengan cara berdoa sesuai kepercayaan dan meletakkan sesaji-sesaji di bagian muka candi. Aktifitas pemujaan biasanya dilakukan pada waktu tertentu, yaitu hari Selasa-Kamis-Jumat kliwon, hari besar agama seperti, Syuro, Nyepi, Galungan, dan saat diselenggarakan hajatan pernikahan, panen, membangun rumah, dan sebagainya.

Sejak tahun 1970-an, selain situs-situs purbakala lama yang menjadi tempat pemujaan baru, muncul dengan intensitas yang lebih tinggi situs-situs pemujaan legendaris yang berkembang melalui penyebaran informasi oleh para penggagas dan pengguna situs pemujaan tersebut. Hal itu dijumpai pada kasus Siti Hinggil dan Pendopi Agung yang justru banyak dimanfaatkan oleh publik luar daerah sebagai tempat mencari berkah untuk menduduki jabatan pemerintahan, kesuksesan berdagang, dan sebagainya.¹³⁴

Konstruksi tentang situs ini menjadi bagian dari upaya untuk mendatangkan masyarakat yang percaya akan kebenarannya. Tidak hanya masyarakat namun mereka yang termasuk pejabat pemerintah yang menjadikan Siti Hinggil sebagai tempat ziarah. Besarnya nilai spiritual dan mistis Siti Hinggil, membuka akses seluas-luasnya kepada

¹³⁴Wara Indira Rukmi. *De-Teritorialisasi Ruang Sakral: Fakta "Kolonisasi" Ide di Kawasan Pusat Situs Majapahit Trowulan*. <http://wacana-kajiantrowulan.blogspot.com/2009/02/3.html>. didownload pada tanggal 24 September 2013, pukul 15.10 WIB. Dikomunikasikan pada Kongres ASPI: Perencanaan dan Perubahan Bangsa, USU, Medan 2006.

pengunjung yang ingin melakukan ritual dan ziarah.¹³⁵ Walaupun, masyarakat tidak dikenakan tiket masuk, namun banyak dari mereka yang memberikan sumbangan untuk pemeliharaan situs. Menurut Juru Pelihara di situs tersebut, sebagian besar bangunan baru yang mengelilingi situs berasal dari bantuan dana para pejabat pemerintah. Hingga kini, biaya untuk perawatan bangunan dapat tertutupi dari tamu-tamu negara dan masyarakat umum yang berkunjung.¹³⁶

Berkaitan dengan lahirnya gairah Majapahitan, masyarakat di Trowulan mulai mengadakan acara-acara yang berorientasi Majapahit, seperti kirab sesaji atau ruwatan desa yang menandakan syukuran atau berterima kasih kepada yang kuasa. Kirab ini memang bisa merupakan lambang atau pertanda sadarnya orang-orang Trowulan akan besarnya budaya Majapahit, sehingga kemudian mereka meniru atau sekedar memperingati saja. Akan tetapi, mengingat mereka bukanlah keturunan Majapahit, seperti sering dilansir orang, maka pelaksanaan tradisi semacam itu bisa saja terbatas pada upaya menghidupkan kebudayaan yang ada. Hal seperti ini sebenarnya merupakan gejala umum berkaitan dengan gairah orang atau ikut-ikutannya orang dalam menghidupkan tradisi yang hampir punah itu.

Dengan lahirnya Majapahit II, Mojokerto akan menjadi Bali kedua. Harapan menjadi Bali II ini dikaitkan dengan kemungkinan efek ekonomis yang diakibatkannya. Menurut mereka, dengan hadirnya Majapahit II ini berarti masyarakat akan dihindangi kesejahteraan yang melimpah. Mereka mencontohkan Bali dengan segala kebudayaannya yang bisa menjadi konsumsi para turis asing. Dengan hadirnya Majapahit II, kebudayaan agung dan kehidupan damai akan menandai masyarakatnya. Dengan hadirnya budaya itu yang tentunya dengan

¹³⁵Juru pelihara Siti Hinggil membedakan pengertian antara ziarah dan ritual. Pemaknaan ziarah diberikan kepada mereka yang biasanya bersama-sama datang ke makam atau tempat spritual dengan dipimpin satu orang yang dipercaya. Sedangkan ritual adalah kegiatan yang dilakukan secara sendiri-sendiri tanpa dipimpin oleh siapapun dengan tujuan meminta petunjuk.

¹³⁶Wawancara dengan KP (inisial) pada 27 Januari 2012.

segala perangkat budaya fisiknya, seperti hadirnya pura-pura dan tempat ibadah umat lainnya, maka bukan hanya keindahan kebudayaannya yang akan jadi daya tarik orang-orang asing ini tetapi juga dalam Majapahit II terdapat daya tarik bathin yang akan menyedot para penganut Hindu, termasuk dari India misalnya, untuk datang ke Trowulan.

Para pendukung ide ini memang telah berupaya, misalnya, dengan cara menghubungi pihak pemerintah untuk memfasilitasi segala hal yang dibutuhkan bagi pembangunan atau merealisasikan Majapahit II tersebut. Meskipun ide ini kurang terkonstruksi secara logis, seperti terlihat dari penilaian tentang akan datangnya orang-orang Bali ke Trowulan untuk berziarah dan mengkaitkannya dengan hadirnya para turis asing, harapan atau bahkan mimpi ini seperti mendapat dukungan. Ide itu dikatakan mimpi, karena rekonstruksi Majapahit dengan segala wujud fisiknya seperti masih sangat jauh dari kemungkinan direalisasi, mengingat upaya yang dilakukan baik oleh para arkeolog maupun dukungan pemerintah hanya terbatas pada penggalian barang atau benda cagar budaya dan menjaganya agar benda-benda yang masih berada di bawah tanah Trowulan itu tidak rusak karena ulah manusia. Para pihak kesenian, meskipun mereka mempunyai aspirasi yang agak berbeda, adalah yang paling kuat memberikan dukungan bagi terealisirnya ide atau mungkin mimpi tentang Majapahit II ini, meskipun dengan nuansa yang berbeda.

4.3 Masyarakat Islam Santri

Pada dasarnya hampir semua orang Trowulan sepakat tentang perlunya pelestarian atau pemeliharaan cagar budaya Majapahit. Pelestarian dan pemeliharaan ini adalah upaya mencatat dan bahkan memperlihatkan kepada dunia tentang kekayaan dan keluhuran kebudayaan Indonesia. Bangsa apapun akan bangga dengan kebudayaan yang diciptakan oleh nenek moyangnya dengan tanpa melihat apakah asal usul etnis dan agama nenek moyang tadi sama dengan mereka. Itulah sebabnya bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merouke bangga, misalnya, dengan hadirnya candi Borobodur yang dinilai banyak orang bahkan

sebagai salah satu keajaiban dunia. Hal yang sama terjadi dengan berbagai peninggalan dari kerajaan Majapahit.

Penggalian dan pelestarian cagar budaya hasil cipta orang-orang Majapahit dan pemeliharaan situs Majapahit di daerah Trowulan adalah upaya mewujudkan kebanggaan bangsa tersebut. Majapahit sebagai kerajaan besar diduga menghasilkan produk budaya yang bernilai tinggi. Berkaitan dengan keluhuran hasil-hasil budaya ini, masyarakat setempat yang dimotori oleh beberapa orang memberikan dukungan pada upaya-upaya pelestarian dan pemeliharaan tersebut. Pemeliharaan cagar budaya yang sudah ada dan penggalian benda-benda budaya yang diduga masih berada di bawah tanah situs Majapahit akan memunculkan kebanggaan budaya yang pada sisi lain bisa menjadi modal bagi pengembangan pariwisata di daerah tersebut. Dengan pariwisata, perkembangan ekonomi masyarakat Trowulan akan terbantu.

Di wilayah Trowulan sendiri memang sudah berkembang wisata ziarah, di samping adanya objek-objek wisata seperti candi dan benda-benda lainnya. Wisata ziarah bisa dikatakan lebih besar dan memberi dampak ekonomi bagi masyarakat di sana dibandingkan dengan wisata lainnya. Setidaknya ada beberapa objek wisata ziarah di daerah Trowulan ini, yaitu makam Putri Cempo, Kubur Panjang dan makam Troloyo, yang biasa didatangi oleh masyarakat dari berbagai daerah terutama di Jawa. Di lihat dari sisi jumlah pengunjungnya makam Troloyo adalah yang terbesar dan berhasil mengundang ratusan ribu pengunjung dalam setiap bulannya. Bahkan banyak yang memperkirakan bahwa lebih dari 1,5 juta orang berkunjung ke makam ini dalam setiap bulannya, mengingat makam ini terbuka 24 jam untuk mereka yang mau berziarah. Dengan situasi yang seperti ini, para pedagang kecil lokal, dengan jumlah sekitar 200 lapak, membuka dagangan mereka untuk mengais rizki di sana.

Dengan dasar untuk pengembangan pariwisata yang bisa menguntungkan masyarakat lokal, berbagai kalangan memang mendukung program BP3 untuk memelihara dan melakukan

penggalan untuk mendapatkan benda-benda cagar budaya. Sadar dengan kemungkinan bahwa hal seperti itu mempunyai dampak bagi peningkatan ekonomi masyarakat, kalangan Islam santri di Trowulan telah pula ikut memberikan dukungannya.

Akan tetapi, dukungan bagi pelestarian cagar budaya dan situs Majapahit memang tidak sekedar berhenti pada titik untuk membangun kebanggaan budaya dan pengembangan pariwisata, karena dalam masyarakat terdapat juga mereka yang menggunakan kesempatan ini untuk kepentingan kebudayaan dan bahkan kepentingan agama mereka. Seperti sudah disebut di atas, di Trowulan ini terdapat sedikit orang yang memimpikan kembalinya kerajaan Majapahit. Meskipun mereka tidak mempunyai konsep yang jelas berkaitan dengan mimpinya tersebut, mereka berupaya untuk menghadirkan apa yang mereka sebut sebagai Majapahit II.

Upaya menghadirkan Majapahit II ini memang dimulai dengan pembelian lahan oleh orang bersangkutan secara diam-diam. Pembelian ini terutama berkaitan dengan penyediaan lahan untuk pendirian pura sebagai simbol Majapahit yang telah menggunakan Hindu sebagai agama kerajaan. Ini artinya bahwa mereka telah membeli lahan dari masyarakat di sana dengan tanpa memberitahukan peruntukan lahan tersebut. Pembelian seperti ini dimaksudkan agar tidak memunculkan masalah, karena bila saja sejak awal telah diberitahukan bahwa lahan tersebut akan digunakan untuk pembangunan pura, maka bisa dipastikan lahan tersebut tidak akan dijual. Rencana mendirikan pura itu memang sudah agak matang, akan tetapi karena masyarakat terkejut dan kemudian menolak, maka lahan yang berada di dekat candi tikus tersebut menjadi terbengkalai.

Perkembangan seperti itu telah memunculkan ke-khawatiran sebagian masyarakat Islam, karena perwujudan kembali Majapahit II berarti kembalinya Hinduisme dalam kehidupan masyarakat Trowulan¹³⁷.

¹³⁷Wawancara dengan tokoh Islam Trowulan, KH. Irfan pada 6 Juni 2013.

Mimpi sebagian kecil masyarakat tentang Majapahit II ini juga diwujudkan oleh mereka, misalnya dalam upaya mereka membangun tempat ibadah agama Hindu tadi. Upaya ini kemudian memunculkan konflik karena sebagian besar umat Islam di Trowulan tidak menghendaknya, bukan saja karena hal tersebut di luar rencana pelestarian dan penggalian kebudayaan Majapahit dengan menampilkan benda cagar budaya yang ada di dalam tanah Trowulan tetapi juga sudah masuk pada wilayah membangkitkan semangat agama.

Oleh karena itulah, rencana penggalian dan sekaligus pelestarian budaya Majapahit ini disikapi dengan was-was oleh kalangan masyarakat Islam. Upaya mendirikan pura yang dilakukan oleh orang Hindu berasal dari Bali ditolak mentah-mentah oleh masyarakat setempat. Pendirian pura di depan Kolam Segaran telah memunculkan protes yang kemudian terbuka dan akhirnya juga melibatkan pemerintah dalam menyelesaikannya. Pak Suryo yang mendirikan pura tersebut dihujat oleh masyarakat dan diminta agar pura yang sudah berdiri tersebut dibongkar. Dalam hal ini masyarakat merasa dibohongi oleh yang bersangkutan yang semula membangun pura tersebut untuk kepentingan tempat ibadah pribadi tetapi kemudian menjadikannya sebagai tempat ibadah umum umat Hindu.

Kasus Suryo memang bergulir cukup ramai, sehingga hal tersebut melibatkan para pejabat pemerintah untuk menyelesaikannya. Seperti segelintir orang di Mojokerto, Suryo adalah orang yang memimpikan lahirnya Majapahit II. Tetapi apa yang membuat sebagian orang Islam protes dan bahkan marah dengan upayanya mendirikan pura adalah karena dia dianggap menghina Islam, yang disebutnya sebagai agama pendatang. Selain itu, dia juga membuat mushola di dalam pura, yang merupakan tempat ibadah umat Hindu itu.¹³⁸ Suryo kemudian meminta

¹³⁸Dua kali kami (peneliti) mampir ke rumah Suryo untuk wawancara, tetapi selama itu pula kami tidak bisa menjumpainya. Ketika sampai di rumahnya, kami disambut oleh para pembantu Suryo yang mempersilahkan kami menunggu di toko kecil di depan rumahnya. Pembantu

maaf kepada umat Islam atas pernyataannya tadi, yang dia tulis dalam surat bersegel dengan diketahui oleh saksi-saksi, di antaranya Camat dan Kapolsek Trowulan. Dalam surat tersebut, Suryo juga menegaskan bahwa dia akan mencabut papan nama bertuliskan “Pura Majapahit” yang dia pasang di beberapa tempat, di samping akan memendekkan tinggi pura dari 9 menjadi 5 meter. Protes lain pun muncul dari masyarakat disertai teguran dari camat Trowulan karena Suryo tidak memenuhi janjinya seperti dia nyatakan dalam surat bersegel tersebut.

Dengan kejadian seperti itu, maka masyarakat Islam di Trowulan dan sekitarnya resah. Penggalan benda cagar budaya Majapahit atau pelestariannya dianggap sama dengan orang Hindu akan masuk kembali atau akan menghidupkan Hindu kembali di Trowulan setelah adanya orang-orang Hindu yang mau membangun pura di sana. Sementara itu, tak satu pun masyarakat di Trowulan beragama Hindu.

Tentu saja persepsi tersebut memunculkan kekhawatiran, bukan saja karena Hindu memang berbeda dengan Islam tetapi juga bagi orang Islam ini artinya penyerangan terhadap Islam sendiri. Kekhawatiran ini didasarkan pada bukti bahwa belakangan ini ada upaya-upaya dari orang Hindu untuk membangun pura di sekitar Trowulan tadi. Apa yang paling nyata adalah bahwa di Trowulan sekarang ini telah berdiri sebuah pura persis di depan segaran (danau) yang konon dulu merupakan danau di depan istana Majapahit.

Selain upaya mendirikan pura, sebagian kecil masyarakat memang juga sudah mulai menghidupkan budaya atau ber-perilaku sebagai pewaris Majapahit. Di Trowulan ini, misalnya, ada satu atau dua orang anggota masyarakat dan bahkan kepala desanya yang akhir-akhir ini memakai blankon yang sebenarnya dalam kehidupan masyarakat di sana merupakan hal yang tidak biasa. Pemakaian ini adalah bagian dari simbolisasi Majapahit dengan maksud untuk memperlihatkan apresiasi mereka terhadap Majapahit dan keinginan mereka untuk menghidupkan

tersebut masuk ke rumah, dan tak berapa lama keluar lagi dengan jawaban bahwa Suryo atau Eyang Suryo tidak berada di rumah, melainkan sedang di Bali.

kembali budaya dan simbol-simbolnya. Tindakan penghidupan seperti itu memang punya maksud, yaitu diharapkan bahwa Majapahit akan kembali hidup di wilayah Trowulan ini. Jika hidup, dalam pandangan Kepala Desa Trowulan, maka hal itu akan memberikan manfaat bagi masyarakat bersangkutan, karena dengan demikian bukan saja produk-produk lokal berupa patung atau benda kesenian lainnya akan hidup kembali tetapi juga, pada sisi lain, diduga akan memberikan keuntungan ekonomi.

Dengan demikian, keberatan masyarakat dengan perkembangan yang ada adalah karena hal tersebut membawa di dalamnya nilai-nilai agama atau ikut menghidupkan kembali keagamaan Hindu. Akan tetapi, kalangan Islam ini tidak mempermasalahkan soal pariwisata dalam kegiatan pelestarian cagar budaya yang ada, karena hal itu akan membantu ekonomi masyarakat. Apa yang mereka tidak setuju adalah jika upaya-upaya itu disertai dengan pengembangan agama Hindu.

Penolakan tersebut memang sudah terjadi bahkan pada sepuluh tahun yang lalu, yaitu pada tahun 2001. Meskipun demikian, sikap sebagian kecil masyarakat Trowulan dan Mojokerto pada umumnya berkaitan dengan mimpinya tentang Majapahit II ini terus berlanjut. Dengan bermacam alasan, orang-orang ini bukan hanya mentolerir didirikannya pura-pura, seperti di masa jaya-jayanya Majapahit, tetapi juga keberadaan pura tersebut menjadi keharusan karena hal itu adalah bagian yang akan menarik wisatawan.

Dengan melihat kejadian di atas, kontestasi antar berbagai pemangku kepentingan dalam kaitannya dengan pelestarian dan pemeliharaan situs Majapahit ini tak terelakkan terjadi. Untuk beberapa kelompok atau pemangku kepentingan, kontestasi tersebut berkaitan dengan pengakuan ke-Majapahit-an. Majapahit telah dikonstruksi oleh mereka sebagai lambang dan simbol keagungan dalam kehidupan berbangsa masyarakat Jawa dan Nusantara. Kepala Desa Jatipasar, yang rumahnya berada di depan pintu gerbang masuk Majapahit, misalnya, menegaskan tentang kebesaran Majapahit ini. Meskipun demikian, berbeda dengan para pemimpi tadi dia melihat kebesaran ini sebagai

fakta sejarah yang tidak harus diwujudkan dalam bentuk fisik dalam kehidupan masyarakat sekarang.¹³⁹ Menurutnya, sangat tidak mungkin untuk mengembalikan Majapahit pada kehidupan masyarakat sekarang, sehingga membangun dan mendirikan kembali kerajaan Majapahit adalah mimpi yang tidak berdasar. Apa yang penting, menurutnya, adalah mengambil nilai-nilai kebudayaan Majapahit, yang bisa dilihat dari produk budayanya.

Penilaian keagungan Majapahit seperti itu telah menyebabkan munculnya beragam kelompok dengan meng-klaimnya sebagai bagian atau keturunan dari Majapahit, atau setidaknya mengaku sebagai bagian dari kelompok atau bangsa Majapahit. Pengakuan seperti itu memang sudah dibantah secara tidak langsung oleh beberapa orang tokoh masyarakat Trowulan sendiri. Mereka menyatakan bahwa tidak ada keturunan Majapahit di daerah Trowulan tersebut. Para penduduk Trowulan sekarang dan daerah sekitarnya adalah para pendatang dari daerah Jawa lainnya. Menurut penegasan para tokoh ini, mereka yang benar-benar keturunan Majapahit adalah kalangan Hindu yang ada di Bali sekarang ini. Itulah sebabnya kenapa kemudian muncul klaim dari orang Bali yang bertandang ke Trowulan bahwa merekalah keturunan Majapahit yang asli.

Meskipun demikian, perlu ditegaskan di sini bahwa bagi sebagian umat Islam di Trowulan soal ke-Majapahit-an tadi memang bukanlah masalah. Mereka dalam hal ini bersikap seperti kebanyakan orang Indonesia pada umumnya yang bangga dengan Majapahit bukan karena mereka merasa sebagai bagian dari Majapahit. Mereka tidak peduli mau disebut sebagai keturunan Majapahit atau bukan. Andai pun mereka ini disebut sebagai bagian atau keturunan Majapahit, maka hal itu tidak akan mengurungkan ketidaksetujuan mereka dalam hal pendirian pura yang oleh sebagian kecil orang di Trowulan dianggap sebagai simbol keagungan Majapahit. Mereka setuju dengan pelestarian benda cagar budaya Majapahit dan upaya pemerintah dan berbagai

¹³⁹Hasil FGD 'Pengelolaan Cagar Budaya di Indonesia' pada tanggal 5 Juni 2013 di Museum Trowulan, Mojokerto.

pemangku kepentingan untuk memelihara benda budaya Majapahit yang ada. Tetapi mereka tidak setuju dengan pendirian pura-pura tersebut karena hal itu berkaitan dengan pengembangan agama Hindu. Mereka khawatir akan terjadi pemurtadan (perpindahan agama) terhadap umat Islam yang ada.

Sebagian dari umat Islam memang menyambut spirit kebangunan kembali Majapahit atau keinginan banyak orang untuk menyelamatkan situs Majapahit di Trowulan. Penyambut-an ini selain hanya diperlihatkan oleh sebagian kecil dari mereka juga memang terbatas pada atau disebabkan oleh adanya kepentingan ekonomi. Mereka senang bahwa pemeliharaan situs di Trowulan secara keseluruhan dan pengembangan wisata sebagai akibat dari dihidupkannya kembali sindrom Majapahit, akan mendatangkan keuntungan ekonomi. Dalam hal ini para pedagang yang hidup dari para wisatawan yang datang ke sana menyambut gembira rencana, baik berkaitan dengan pemeliharaan situs Majapahit maupun penggalian benda-benda cagar budaya yang terdapat di dalamnya.

Klaim terhadap identitas Majapahit juga datang dari kelompok Islam. Ketika Tim Kajian Kesultanan Majapahit dari Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) yang berada dibawah organisasi Muhammadiyah Yogyakarta, menerbitkan buku yang berjudul 'Kesultanan Majapahit, Fakta Yang Tersembunyi', edisi terbatas Muktamar Satu Abad Muhammadiyah Yogyakarta Juli 201. Dalam buku tersebut memaparkan fakta-fakta tersembunyi dengan berbagai dasar temuan sehingga mencapai suatu kesimpulan bahwa kerajaan Majapahit adalah merupakan kerajaan Islam yang berbentuk "Kesultanan Majapahit". Sedikitnya si penulis mengemukakan beberapa fakta yang mendukung pernyataan tersebut, seperti Gajah Mada adalah orang Islam, dan klaim-klaim lainnya.¹⁴⁰

¹⁴⁰Majapahit Bukan Kerajaan/Kesultanan Islam. <http://wongjawa670.blogspot.com/2011/04/majapahit-bukan-kerajaankesultanan.html>, didownload pada tanggal 25 September 2013 pukul 7.30 WIB.

Dengan demikian, jelaslah bahwa kontestasi yang muncul berkaitan dengan pembangunan kembali Majapahit atau pemeliharaan situs Majapahit cukup bervariasi, seperti juga diperlihatkan oleh bervariasinya para *stakeholder* yang terlibat. Ada yang benar-benar bermotif ekonomi seperti para pedagang kecil di sekitar benda-benda cagar budaya, seperti candi dan lainnya, dan ada pula yang bermotif agama seperti diperlihatkan oleh beberapa orang Hindu yang berdatangan ke Trowulan. Selain itu, para akademisi, arkeolog dan pemerintah juga mempunyai kepentingan yang berbeda berkaitan dengan masalah atau issue pemeliharaan situs di Trowulan ini. Pemerintah dalam hal ini akan diposisikan oleh para *stakeholder* lain sebagai pelaku yang ikut terlibat dalam pembangunan dan pelestarian situs Majapahit itu dan pemeliharaan benda-benda budayanya meskipun sebenarnya lebih bertindak sebagai regulator.

BAB 5

P E N U T U P

Pelestarian warisan budaya di Trowulan sebenarnya telah dimulai sejak zaman kolonial dengan diawali oleh hadirnya komunitas-komunitas pecinta benda-benda antik. Tapi potensi budaya dan ekonomi yang melekat pada warisan budaya tersebut telah mendorong penguasa kolonial memberi perhatian besar dan bahkan ikut mengatur pelestariannya. Rafless, sang Gubernur Jenderal Inggris yang berhasil menulis *The History of Java*, telah memerintahkan bawahannya untuk mengkaji Trowulan, yang tentunya dengan maksud untuk kepentingan kolonialismenya. Hal yang sama juga dilakukan oleh Belanda, yang kemudian menjadikan Trowulan untuk kajian arkeologis mereka.

Trowulan, di mana situs Majapahit berada, memang penting bagi pemerintah kolonial, sehingga mereka kemudian mengambil alih kewenangan pengelolaan dan pelestarian warisan budayanya. Dengan menggunakan bantuan para ahli indologi, kontruksi warisan budaya Majapahit di Trowulan dilakukan sesuai dengan kepentingan kolonial. Keterlibatan pemerintah kolonial dalam hal ini tidak dimaksudkan untuk pelindungan terhadap warisan budaya Trowulan tetapi lebih ditujukan untuk menaikkan citra mereka di mata internasional. Selain itu, keterlibatan ini juga dimaksudkan untuk membedakan derajat mereka dengan masyarakat pribumi, yang dianggapnya inferior.

Keterlibatan negara atau penguasaannya dalam pengelolaan warisan budaya juga terjadi pada masa Indonesia merdeka. Lembaga-lembaga pemerintah kolonial yang bergerak dalam pelestarian warisan budaya ini telah bermetamorfosis menjadi lembaga-lembaga pelestarian di bawah pemerintah Indonesia. Metamorfosa serupa juga terjadi dalam aturan hukum Belanda yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yang tentunya memiliki substansi sama meskipun dengan versi yang berbeda. Dengan perkembangan seperti itu, pemerintah Indonesia lah, melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

(sempat berubah nomenklatur menjadi Kementerian Pendidikan dan Pariwisata), yang mengatur warisan budaya, termasuk di Trowulan. Melalui para birokratnya dengan dibantu oleh para ahli, terutama dengan latar belakang akademis, pemerintah merumuskan berbagai kebijakan program pelestarian di Trowulan.

Terutama pada masa Orde Baru, perhatian pemerintah terhadap Trowulan makin meningkat, dengan cara memperkenalkan simbol-simbol Majapahit, dengan maksud untuk kepentingan kesatuan, di samping juga pernah menjadikannya sebagai alat politik untuk memperluas kekuasaan wilayah NKRI, karena Majapahit juga ditempatkan sebagai kontruksi politik. Dengan kecenderungan pemerintah seperti itu, upaya-upaya melestarikan peninggalan-peninggalan Majapahit akhirnya menjadi perhatian umum dan hipotesis para akademisi bahwa Trowulan sebagai ibukota Majapahit telah digunakan oleh pemerintah untuk untuk menjustifikasi upaya-upaya pelestariannya. Tahun 1986, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merumuskan Rencana Induk Arkeologi (RIA) Bekas Kota Kerajaan Majapahit Trowulan. *Masterplan* RIA tersebut kemudian dijadikan sebagai pedoman dan batasan-batasan dalam menjalankan misi perlindungan sisa-sisa peninggalan Majapahit di Trowulan.

Dalam perumusan RIA Bekas Kota Kerajaan Majapahit Trowulan, pemerintah dengan bantuan para akademisi menggunakan konsep “situs” dan “pelestarian” dalam konteks perlindungan fisik situs. Tetapi perhatian berlebih terhadap fisik situs ini mengakibatkan terlupakannya aspek lain dari situs, yaitu keberadaan masyarakat, padahal masyarakat Trowulan telah menjalani kehidupan mereka di sekitar situs jauh sebelum pemerintah merumuskan RIA.

Pengabaian terhadap masyarakat telah menjadikan pelestarian Trowulan menjadi semakin kompleks. Seperti diketahui sebelum RIA dibentuk, banyak aktivitas masyarakat dianggap merusak sisa-sisa peninggalan Majapahit di Trowulan, seperti penggalian untuk pencarian harta karun, pembuatan semen merah dari batu bata kuno, atau penggalian lahan untuk sawah dan industri bata, di samping

adanya klaim masyarakat atas bangunan Majapahit. Berbagai aktivitas tersebut tidak serta merta berakhir, dan malah makin menjadi-jadi, justru setelah RIA dijalankan, karena masyarakat tidak diajak komunikasi dalam rencana pelestarian tersebut.

Dalam perjalanannya, masalah pelestarian di Trowulan ini terasa semakin kompleks karena terdapat sebagian oknum pemerintah yang memanfaatkan kesempatan pada setiap program pelestarian. Bahkan dalam kasus ini diduga adanya oknum pemerintah yang terlibat dalam perdagangan ilegal benda-benda peninggalan Majapahit di Trowulan. Negara dalam hal ini dianggap atau dinilai belum mampu merumuskan politiknya di bidang kebudayaan, karena apa yang terjadi adalah dominannya kepentingan politik dan ekonomi dengan mengatasnamakan pelestarian warisan budaya. Sebagai contoh adalah kasus pendirian Pusat Informasi Majapahit, yang bukan memunculkan kepentingan berbeda antara masyarakat dan pemerintah, melainkan juga muncul di sana kepentingan lembaga swadaya masyarakat (LSM-LSM) yang bergerak atas nama klaim pelestarian.

Dalam upaya pelestarian ini pemerintah dianggap lebih berpihak pada dunia usaha, seperti nampak ketika pendirian pabrik baja di Trowulan. Kali ini bahkan bukan pemerintah pusat yang berhubungan dengan pengusaha, melainkan bupati yang ikut terlibat dalam memberikan lahan kepada dunia usaha dimaksud. Mungkin dalam hal ini bisa dikatakan bahwa pemerintah seolah tidak peduli dengan kawasan Trowulan, karena pendirian pabrik baja bukan saja tidak ada kaitannya dengan pelestarian situs Trowulan melainkan juga justru akan menghancurkan atau merusak sebagian benda cagar budaya yang diduga berada di bawah tanah Trowulan.

Meskipun demikian, karena pihak yang mempunyai wewenang mengeluarkan izin atas lahan di Trowulan adalah pemerintah pusat, maka berjalannya proses pembangunan pabrik baja tersebut mengindikasikan adanya oknum pemerintah pusat yang terlibat. Masyarakat Trowulan memang marah dengan rencana pendirian pabrik

ini, tetapi di sana juga ada yang secara diam-diam setuju, sehingga dalam kasus ini terdapat dua kubu masyarakat.

Dengan munculnya kasus-kasus di atas memang terlihat bahwa pemerintah memang bukan “entitas tunggal” dalam kaitannya dengan persoalan yang muncul akibat program-program pelestarian. Meskipun sebenarnya hanya oknum tertentu yang terlibat dalam memanfaatkan program-program pelestarian untuk kepentingan politik dan ekonomi mereka, hal ini telah memperburuk citra pemerintah di depan masyarakat. Tapi perlu dicatat bahwa citra jelek ini sebagai akibat dari tidak seriusnya mereka dalam memahami persoalan yang hadir dalam pelestarian warisan budaya di Trowulan. Mereka selalu merasa sudah memahami sekali program-program pelestarian tersebut, padahal sesungguhnya dalam beberapa kasus pelestarian di Trowulan, klaim-klaim pelestarian telah dimanfaatkan untuk menutupi kepentingan politik ekonomi semata.

Dengan situasi seperti itu, program pelestarian Trowulan telah memunculkan beragam masalah, mulai dari munculnya berbagai kepentingan antara *stakeholder* sampai pada konflik antar kelompok masyarakat, seperti kasusnya pak Suryo yang mendirikan pure Majapahit. Karenanya, intervensi pelestarian melalui program-program yang ada dalam prakteknya tidak pernah mencapai tujuan yang direncanakan. Tidak lengkapnya diagnosa terhadap masalah yang ada, dan tidak kuatnya motivasi pemerintah untuk benar-benar melakukan pelestarian serta kurangnya mempertimbangkan kepentingan masyarakat pada umumnya adalah faktor penyebab yang memunculkan masalah tersebut.

Kasus pembangunan Pusat Informasi Majapahit (PIM) dapat dijadikan sebagai contoh di mana pemerintah yang awalnya ingin mengembangkan kepentingan pelestarian, menghadapi berbagai macam persoalan karena persiapan yang tidak matang dan munculnya aktor-aktor yang ingin memanfaatkan situasi. Upaya pelestarian yang diharapkan telah berubah menjadi upaya yang menyebabkan adanya kerusakan cagar budaya Trowulan oleh pemerintah. Tapi perlu dicatat bahwa kegagalan

seperti ini bukan semata-mata karena kurangnya perencanaan, melainkan juga disebabkan karena banyaknya kepentingan tadi, termasuk dari kalangan pemerintah sendiri. Para ilmuwan yang terlibat, terkadang harus bernegosiasi dengan para birokrat pemerintah, sehingga seperti melebar dari tujuan awal pelestarian. Kompromi distribusi kekuasaan seolah terjadi di sana, dan mereka yang tetap kritis pada akhirnya akan menjadi orang-orang yang tersingkirkan.

Dari proses pelestarian seperti yang dibahas di atas jelaslah bahwa hal itu telah menciptakan kontestasi antar berbagai stakeholders. Perebutan atau persaingan dalam menggarap situs Trowulan, baik antara orang-orang dalam pemerintahan maupun antara mereka dengan para ilmuwan, seperti terjadi dalam kasus PIM, atau hadirnya orang-orang seperti pak Suryo yang mendirikan pura di atas situs Trowulan dengan kepentingan yang bersifat “ideologis”, seolah memperlihatkan bahwa upaya pelestarian ini agak bersifat politis. Selain itu, hadirnya masyarakat lokal yang ingin mendapatkan keuntungan dari situs Trowulan setelah munculnya orang-orang yang ingin menjadikannya sebagai destinasi wisata yang bisa mendatangkan uang, seolah menjadikan situs ini sebagai asset ekonomi. Kenyataan ini menunjukkan bahwa upaya pelestarian Trowulan bukan hanya menciptakan perjuangan untuk mendapatkan kekuatan politik bagi sebagian stakeholders tetapi juga “perjuangan untuk menguasai ruang, memori dan identitas.”¹⁴¹

Dari kasus-kasus yang ada memang jelas bahwa pengelolaan cagar budaya akan melibatkan banyak pihak, di mana mereka, mulai dari pemerintah, akademisi, masyarakat, sampai pada dunia usaha mempunyai posisi penting dalam perencanaan pengelolaan dan pengaturan warisan budaya Trowulan. Dalam hal ini semua pihak harus mempunyai visi yang sama dan mengesampingkan kepentingan pribadi

¹⁴¹Marina Svensson menemukan hal yang sama berkaitan dengan pelestarian cultural heritage di China. Lihat Marina Svensson. *Cultural Heritage Contestations in Chinese Villages*. Working paper no.17. Centre for East and Southeast Asian Studies, Lund University, Sweden.

atau kelompok, dengan mengarahkan program yang ada pada pengembangan Trowulan sebagai kawasan strategis, di mana warisan budaya Majapahit harus dijaga dan dilestarikan.

Upaya pelaksanaan program yang ada seharusnya jauh dari kepentingan-kepentingan selain untuk menjaga warisan budaya tersebut. Untuk itu, koordinasi yang integratif antara *stakeholder* mungkin dapat menjadi langkah awal dari upaya pelestarian di Trowulan agar menjadi lebih efektif. Selain itu, lahirnya aturan hukum yang implementatif, seperti peraturan pemerintah tentang warisan atau cagar budaya, perlu segera disahkan. Pemerintah juga harus menciptakan situasi yang “harmonis” di tengah-tengah kontestasi yang berlangsung, di samping merevisi RIA yang sudah dianggap tidak lagi sesuai dengan kondisi lingkungan di Trowulan. Hal lain yang perlu dilakukan pemerintah adalah mempertegas batas-batas kawasan Trowulan, karena masalah batas inilah yang akan menjadi justifikasi untuk menetapkan Trowulan sebagai kawasan cagar budaya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anderson, Benedict. 2001. *Imagined Communities*. Yogyakarta: Insist Press.
- Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
- Biantoro, Sugih dan Endang Turmudi. 2012. *Kajian Ekonomi Politik Pelestarian Tinggalan Majapahit di Kawasan Trowulan*. Jakarta: PMB-LIPI dan PT. Gading Prima.
- Blombergen, Marieke dan Martijn Eickhoff. *Conserving The Past, Mobilizing The Indonesian Future: Archaeological Sites, Regime Change and Haritage Politics in Indonesia in the 1950s*. Bijdragen tot de Taal-, Land-en Volkenkunde, Vol. 167, No. 4 (2011), hlm. 405 – 436.
- Caporaso, James A. dan Davis P. Levine. 2008. *Teori-Teori Ekonomi Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1986. *Rencana Induk Arkeologi, Bekas Kota Kerajaan Majapahit Trowulan*. Proyek Pemugaran dan Pemeliharaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Jakarta.
- DFID. *Political Economy Analysis How To Note*, A DFID Practice Paper, July 2009.
- Direktorat Peninggalan Purbakala, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. 2007. Rekapitulasi data pelestarian situs/benda cagar budaya tidak bergerak seluruh Indonesia sampai dengan Februari 2007.

- Djafar, Hasan. 2012. *Masa Akhir Majapahit: Girindrawardhana dan Masalahnya*. Depok: Komunitas Bambu.
- Gomperts, Amrit, Arnoud Haag and Peter Carey. 2008. *Stutterheim's Enigma: The mystery of his mapping of the Majapahit kraton at Trowulan in 1941*. *Bijdragen tot de Taal-, Land-en Volkenkunde (BKI)* 164-4 (2008).
- _____, *Rediscovering The Royal Capital of Majapahit*. The Newsletter, No.53 | Spring 2010.
- Gunawan, Restu. 2005. *Muhammad Yamin dan Cita-cita Persatuan*. Yogyakarta: Ombak.
- Handinoto. *Kebijakan Politik dan Ekonomi Pemerintah Kolonial Belanda Yang Berpengaruh pada Morfologi (Bentuk Dan Struktur) Beberapa Kota di Jawa*. *Dimensi Teknik Arsitektur* Vol. 32, No. 1, Juli 2004: 19–27.
- Ilhami. *Pengembangan Kawasan Pariwisata Majapahit Trowulan-Mojokerto*, bahan dalam Rapat Evaluasi Hasil Pemugaran Bekas Kota Kerajaan Majapahit, Jombang, 25-26 Februari 2000. Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Mojokerto, 2000.
- Kusumajaya, I Made. tt. *Mengenal Kepurbakalaan Majapahit Di Daerah Trowulan*, Mojokerto: BP3 Jatim.
- Li, Tania Murray. 2012. *The Will To Improve*, Tangerang: Marjin Kiri.
- Li, Tania Murray. 2000. *Articulating Indigenous Identity in Indonesia: Resource Politics and the Tribal Slot*. *Comparative Studies in Society and History*, Vol. 42, No. 1. (Januari, 2000), hlm. 149-179.
- Lombard, Denys. 2005. *Nusa Jawa: Silang Budaya 1, Batas-Batas Pembaratan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Loulanski, Tolina. 2006. "Revising the Concept for Cultural Heritage: The Argument for a Functional Approach" dalam *International Journal of Cultural Property* 13, hlm. 207–233.

- Nordholt, Henk Schulte, Bambang Purwanto, dan Ratna Hapsari. 2008. "Memikir Ulang Historiografi Indonesia" dalam Henk Schulte Nordholt, Bambang Purwanto, dan Ratna Hapsari (ed). *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, KITLV – Jakarta; Denpasar: Pustaka Larasan.
- Pemberton, John. 2010. "(Dis)Orientasi Budaya "Jawa" dalam Budi Susanto (ed). *Indonesia di Mata (mata-i) Postkolonialitas*. Yogyakarta: Kanusius.
- Puslitbang Kebudayaan. 2008. *Kajian Integratif Pelindungan dan Pengembangan Situs Peninggalan Majapahit*, Jakarta: Puslitbang Kebudayaan.
- Raffles. Thomas Stamford. 2008. *The History of Java*. Hamongan Simanjuntak dan Revianto B. Santosa (ed). Yogyakarta: Penerbit Narasi.
- Said, Edward. 1977. *Orientalism*. London: Penguin.
- Samuel, Hanneman. 2010. *Genealogi Kekuasaan, Ilmu Sosial Indonesia: dari Kolonialisme Belanda hingga Modernisme Amerika*. Depok: Kepik Ungu.
- Soediman. 1965. *Pusaka Madjapahit di Trowulan*. Mojokerto.
- Soewarsono, dkk. 2007. *Nasionalisme Indonesia dalam Konteks Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPI Press.
- Svensson, Marina. *Cultural Heritage Contestations in Chinese Villages*. Working paper no.17, 2006. Centre for East and Southeast asian Studies, Lund University, Sweden.
- Tanudirdjo, Daud Aris. *Cultural Landscape Heritage Management in Indonesia An Archaeological Perspective*. Makalah dalam First International Symposium on Borobudur Cultural Landscape Heritage 2007, di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 20 April 2007.

- _____, 1995. "Theoretical trends in Indonesian archaeology" dalam Peter J. Ucko (ed.), *Theory In Archaeology: A World Perspective*. London: Routledge.
- _____, tt. *Warisan Budaya Majapahit dalam Perspektif Manajemen Sumber Daya Arkeologi*. (unpublished)
- _____, 2003. *Warisan Budaya Untuk Semua Arah Kebijakan Pengelolaan Warisan Budaya Indonesia Di Masa Mendatang*. Makalah disampaikan dalam Kongres Kebudayaan V di Bukittinggi, Sumatra Barat pada Sumatera Barat 19-23 Oktober 2003.
- Timothy, Dallen J dan Gyan P. Nyaupane (ed). 2009. *Cultural Heritage and Tourism in the Developing World: A Regional Perspective*. London and New York: Routledge.
- Vickers, Adrian. 2008. "Mengapa tahun 1950-an penting bagi Kajian Indonesia" dalam dalam Henk Schulte Nordholt, Bambang Purwanto, dan Ratna Hapsari (ed). *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, KITLV – Jakarta; Denpasar: Pustaka Larasan.
- Vlekke, Bernard H.M. 2008. *Nusantara: Sejarah Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG).
- Widyosiswoyo, Supartono. 2006. *Sejarah Kebudayaan Indonesia (edisi revisi)*. Jakarta: Universitas Trisakti.

Surat Kabar

Dunia Minta Trowulan Diselamatkan, Kompas, 3 Oktober 2013.

Surat Kabar Warta Bali, 5 Februari 2003.

Wawancara

Wawancara NJ (inisial) pada tanggal 20 November 2013.

Wawancara YD (inisial) pada tanggal 5 Maret 2013.
Wawancara IT (inisial) pada tanggal 4 Maret 2013.
Wawancara SN (inisial) pada tanggal 19 Oktober 2013.
Wawancara AS (inisial) pada tanggal 2 Maret 2013.
Wawancara NM (inisial) pada tanggal 15 September 2013.
Wawancara RSG (inisial) pada tanggal 27 Juni 2013.
Wawancara KP (inisial) pada tanggal 27 Januari 2012.
Wawancara KH. Irfan pada tanggal 6 Juni 2013.

Internet

- Bappeda Kabupaten Mojokerto: Kami Tak Sembrono. <http://surabaya.tribunnews.com/2013/07/19/bappeda-kabupaten-mojokerto-kami-tak-sembrono> Didownload pada tanggal 15 September 2013, pukul 15.00 WIB.
- Jejak McLaine Pont dan Kerajinan Logam. <http://tokoh-kajianthrowulan.blogspot.com/2009/03/jejak-mclaine-pont-dan-kerajinan-logam.html>. (didownload pada tanggal 24 September 2013, pukul 6.54 WIB). Diambil dari Galih Widjil Pangarsa. *Merah putih arsitektur Nusantara*. Yogyakarta: Penerbit Andi untuk Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya, 2006.
- Majapahit Bukan Kerajaan/Kesultanan Islam. <http://wong.jawa670.blogspot.com/2011/04/majapahit-bukankerajaankesultanan.html>, didownload pada tanggal 25 September 2013 pukul 7.30 WIB.
- Perdesaan-Lahan-Budaya di Hadapan Industri Konstruksi Perkotaan. <http://lingkungan-kajianthrowulan.blogspot.com/2009/03/perdesaan-lahan-budaya-di-hadapan.html>. didwonload pada 24 September 2013, pukul. 22.52.

- Pembangunan Pabrik Baja di Aera Situs Majapahit Didemo. <http://news.detik.com/read/2013/07/19/141855/2308075/475/pembangunan-pabrik-baja-di-area-situs-majapahit-didemo> didownload pada tanggal 15 September 2013, pukul. 15.20 WIB.
- Pembangunan Pabrik Baja di Trowulan dihentikan. <http://nationalgeographic.co.id/berita/2013/07/pembangunan-pabrik-baja-di-trowulan-dihentikan> Didwonload pada tanggal 15 September 2013, pukul. 15.15 WIB.
- Penelitian Arkeologi Terpadu Indonesia (PATI I) 2008 Berhasil Mengungkap Kedaton Majapahit <http://arkeologi.web.id/articles/berita-arkeologi/49-penelitian-arkeologi-terpadu-indonesia-pati-i-2008-berhasil-mengungkap-kedaton-majapahit>, didownload pada tanggal 25 September 2013 pukul 7.02 WIB.
- Situs Trowulan jadi Pabrik Baja. <http://nationalgeographic.co.id/berita/2013/07/situs-trowulan-jadi-pabrik-baja> didownload pada tanggal 15 September 2013, pukul. 15.40 WIB.
- Wara Indira Rukmi. *De-Teritorialisasi Ruang Sakral: Fakta "Kolonisasi" Ide di Kawasan Pusat Situs Majapahit Trowulan.* <http://wacana-kajiantrowulan.blogspot.com/2009/02/3.html>, didownload pada tanggal 24 September 2013, pukul. 15.10 WIB. Dikomunikasikan pada Kongres ASPI: Perencanaan dan Perubahan Bangsa, USU, Medan 2006.
- Warga Tolak Trowulan Jadi Cagar Budaya. <http://dutaonline.com/07/11/2013/warga-tolak-trowulan-jadi-cagar-budaya/> didownload pada tanggal 13 November 2013, pukul. 15.50 WIB.
- 100 Arkeolog Ungkap Jejak Kerajaan Majapahit di Trowulan, [http://news.detik.com/read/2012/09/26/224226/2038984/10/100-arkeolog-ungkap-jejak-kerajaan-majapahit-di-trowulan?](http://news.detik.com/read/2012/09/26/224226/2038984/10/100-arkeolog-ungkap-jejak-kerajaan-majapahit-di-trowulan?nlogo) *nlogo* (didownload pada 25 September 2013 pukul 6.55 WIB).
- 30 Tahun Status Trowulan Tidak Jelas. [http://sains.kompas.com/read/2013/07/25/0747585/30 Tahun Status Trowulan Tidak](http://sains.kompas.com/read/2013/07/25/0747585/30_Tahun_Status_Trowulan_Tidak)

Jelas. Didownload pada tanggal 26 September 2013, pukul. 11.25.

<http://heptadesain.wordpress.com/2009/01/14/desain-trowulan/>
didownload pada tanggal 19 Oktober 2013, pukul 13.00 WIB.

<http://www.indonesiawaterinstitute.org/sains-a-teknologi/129613-cerita-pembuat-batu-bata-di-metropolitan-majapahit>
didownload pada tanggal 28 Oktober 2013, pukul 14.18 WIB.

Lain-Lain

BPCB Jawa Timur. *Taman Majapahit: Revitalisasi Bekas Ibukota Majapahit*. Bahan Paparan BPCB Jawa Timur 2010.

Hasil diskusi '*Seminar Penelitian Cagar Budaya*', Pusat Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB), LIPI pada tanggal 28 November 2012 di Jakarta.

Hasil FGD '*Pengelolaan Cagar Budaya di Indonesia*' oleh Pusat Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB) LIPI pada tanggal 5 Juni 2013 di Museum Trowulan, Mojokerto.

Tanggapan pemerintah atas petisi yang dibuat oleh organisasi masyarakat peduli Majapahit 23 Juli 2013.

